

**JURNALISME MAKNA DALAM BERITA UTAMA KOMPAS DAN
KEDAULATAN RAKYAT BULAN MEI 2009 DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM BENTUK SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN DI SMA KELAS XI SEMESTER II**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah**



**Disusun Oleh :
Yulius Dwi Pramono
Nim : 031224048**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2010

**JURNALISME MAKNA DALAM BERITA UTAMA KOMPAS DAN
KEDAULATAN RAKYAT BULAN MEI 2009 DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM BENTUK SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN DI SMA KELAS XI SEMESTER II**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah**



**Disusun Oleh :
Yulius Dwi Pramono
Nim : 031224048**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2010

SKRIPSI

**JURNALISME MAKNA DALAM BERITA UTAMA *KOMPAS* DAN
KEDAULATAN RAKYAT BULAN MEI 2009 DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM BENTUK SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN DI SMA KELAS XI SEMESTER II**

Oleh :

Yulius Dwi Pramono

NIM : 031224048

Telah disetujui oleh :

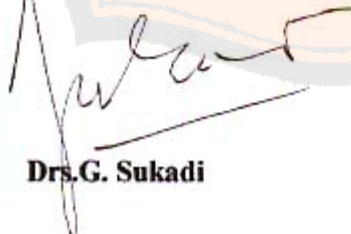
Pembimbing I



Drs. J. Prapta Diharja S.J., M.Hum

Tanggal, 4 Februari 2010

Pembimbing II



Drs.G. Sukadi

Tanggal, 26 Januari 2010

SKRIPSI

**JURNALISME MAKNA DALAM BERITA UTAMA KOMPAS DAN
KEDAULATAN RAKYAT BULAN MEI 2009 DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM BENTUK SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN DI SMA KELAS XI SEMESTER II**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Yulius Dwi Pamono

NIM : 031224048

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

pada tanggal 6 Maret 2010

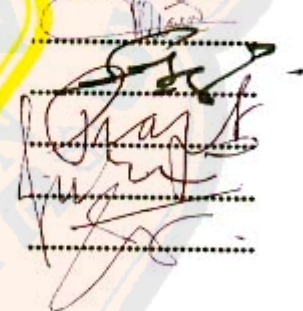
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama lengkap

Tanda Tangan

Ketua	Dr. Yuliana Setyaningsih
Sekretaris	Y. F. Setya Tri Nugraha, S.Pd., M.Pd
Anggota	Drs. J. Prapta Diharja S.J., M.Hum
Anggota	Drs. G. Sukadi
Anggota	Dr. B. Widharyanto, M.Pd



Yogyakarta, 6 Maret 2010

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

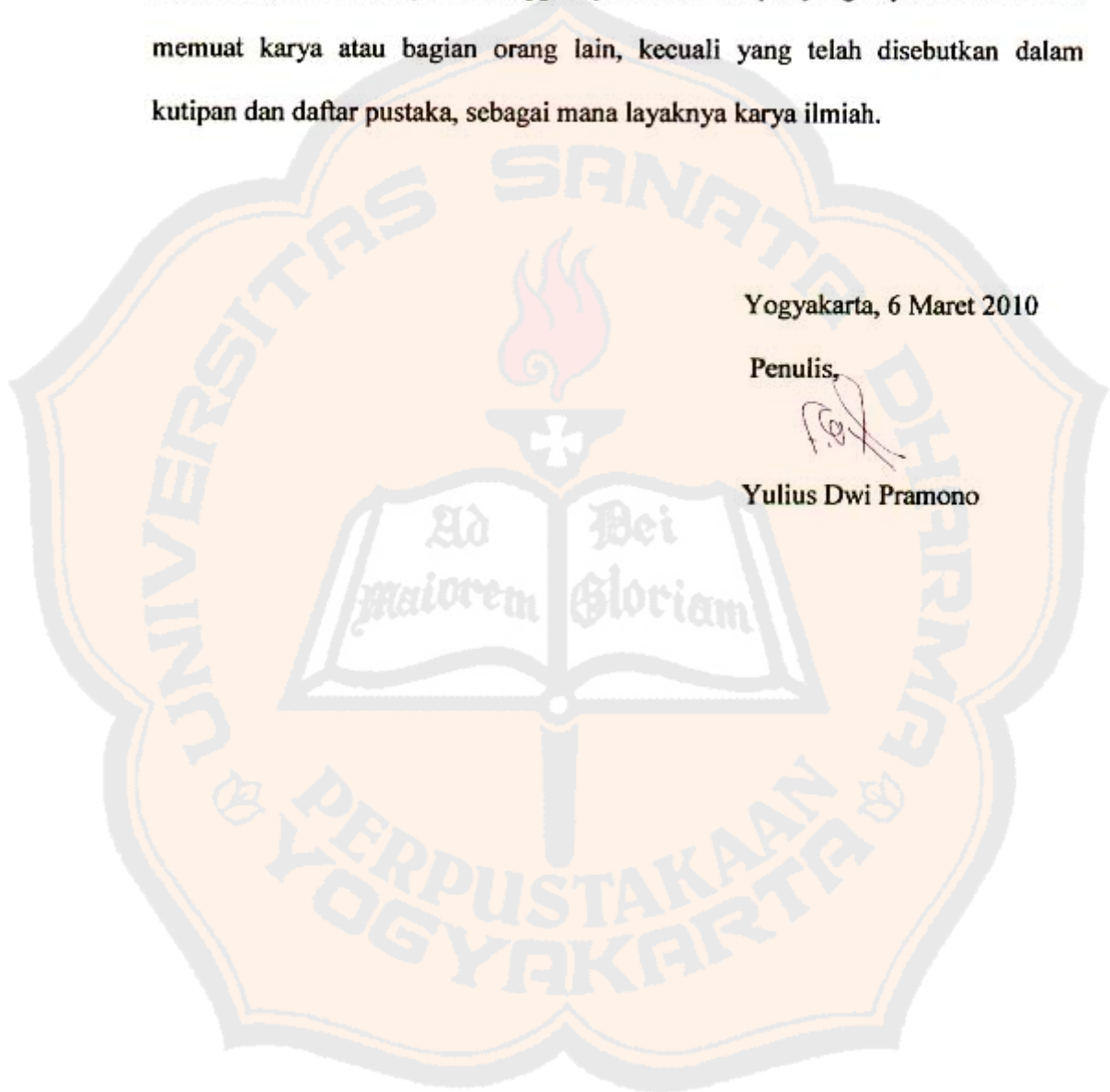
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagai mana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 6 Maret 2010

Penulis,



Yulius Dwi Pramono



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yulius Dwi Pramono

Nomor Mahasiswa : 031224048

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**JURNALISME MAKNA DALAM BERITA UTAMA KOMPAS DAN
KEDAULATAN RAKYAT BULAN MEI 2009 DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM BENTUK SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN DI SMA KELAS XI SEMESTER II.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis, tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 6 Maret 2010

Yang menyatakan



(Yulius Dwi Pramono)

MOTO

“Tertinggal bukan karena tak mampu mengejar, tetapi mencari celah untuk jati diri yang lain”

(penulis)

“Di dunia ini tidak ada hal yang mudah tapi, juga tidak ada hal yang tidak mungkin untuk ditaklukkan”

(Mario Teguh)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Bapa di surga, Yesus Kristus, dan Bunda Maria, terima kasih atas berkat, cinta dan bimbinganNya hingga terselesaikannya skripsi ini.
- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, FA. Mardiyono dan Th. Sumini atas dukungan, kasih sayang, dan kesabarannya selama studi sampai lulus.
- ❖ Kakakku Ana Eka dan Adikku Antonius Sudibyo, terima kasih atas dukungannya.
- ❖ Teman-teman PBSID 2003 atas kebersamaan dan kekeluargaan selama ini.

ABSTRAK

Pramono, Yulius Dwi. 2010. *Jurnalisme Makna dalam Berita Utama Kompas dan Kedaulatan Rakyat Bulan Mei 2009 dan Implementasinya dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Kelas XI Semester II*. Skripsi. Yogyakarta: PBSID, Universitas Sanata Dharma.

Penelitian ini berisi tentang *Jurnalisme Makna dalam Berita Utama Kompas dan Kedaulatan Rakyat Bulan Mei 2009 dan Implementasinya dalam Bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Kelas XI Semester II*. Tujuan penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui apakah jurnalisme makna sudah dimanfaatkan dalam berita utama harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat*, (2) mendeskripsikan ciri-ciri jurnalisme makna dalam berita utama harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* pada bulan Mei 2009, dan (3) mendeskripsikan implementasi ciri-ciri jurnalisme makna dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan metode pengembangan untuk menjawab rumusan masalah. Objek kajiannya adalah ciri-ciri jurnalisme makna (konteks masa lalu, sekarang, dan prediksi ke depan) dalam berita utama tersebut. Jumlah berita utama yang dikumpulkan pada bulan Mei 2009 sebanyak 58 berita yaitu, 29 berita utama harian *Kompas*, dan 29 berita utama dari harian *Kedaulatan Rakyat*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) dari 58 berita utama yang terkumpul, ditemukan sebanyak 24 berita utama yang menyajikan interpretasi wartawan yaitu, 17 interpretasi dalam berita utama *Kompas*, dan 10 interpretasi dalam berita utama *Kedaulatan Rakyat*, (2) dari 17 interpretasi pada harian *Kompas*, ditemukan 6 konteks masa lalu, 9 konteks sekarang, dan 2 konteks prediksi ke depan, (3) dari 10 interpretasi pada harian *Kedaulatan Rakyat*, ditemukan 1 konteks masa lalu, 9 konteks sekarang, sedangkan konteks prediksi ke depan tidak ditemukan. Jadi, secara keseluruhan ditemukan 27 interpretasi.

Dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa media massa Indonesia seperti *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat*, telah memanfaatkan jurnalisme makna dalam penyajian beritanya. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XI semester 2 dengan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) karena, sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai perkembangan jurnalisme di dunia dan di Indonesia.

ABSTRACT

Pramono, Yulius Dwi. 2010. *Meaning Journalism in Kompas and Kedaulatan Rakyat Headlines on May 2009 and its Implementation in the Form of Syllabus and Teaching Plan for the Second Semester of Eleventh Grade of High School*. Thesis. Yogyakarta: PBSID, Sanata Dharma University.

This research discusses about *Meaning Journalism in Kompas and Kedaulatan Rakyat Headlines on May 2009 and its Implementation in the Form of Syllabus and Teaching Plan for the Second Semester of Eleventh Grade of High School*. This research aims to find out, (1) to know whether the meaning journalism has been applied in the headlines of *Kompas* daily and *Kedaulatan Rakyat* daily, (2) to describe the characteristics of meaning journalism in *Kompas* and *Kedaulatan Rakyat* headlines on May 2009, and (3) to describe the implementation of the characteristics of meaning journalism in the form of syllabus and teaching plan in high school.

This research uses content analysis method and elaboration method to answer the problem formulation. The object of the study is the characteristics of meaning journalism (in the context of past, present and future prediction) in the headlines. The number of headlines on May 2009 that are collected is 58 news which are, 29 headlines from *Kompas* daily, and 29 headlines from *Kedaulatan Rakyat* daily.

The results that are gained from this research are as follows, (1) from 58 headlines that are collected, 24 headlines present journalist interpretation which are, 17 interpretations in *Kompas* headlines, and 10 interpretations in *Kedaulatan Rakyat* headlines, (2) from 17 interpretations in *Kompas* daily, 6 past, 9 present, and 2 future prediction contexts are found (3) from 10 interpretations in *Kedaulatan Rakyat* daily, 1 past and 9 present contexts are found but there is no future prediction context. Therefore, 27 interpretations are found in general.

From data analysis results, it can be concluded that the mass media in Indonesia like *Kompas* and *Kedaulatan Rakyat*, has applied meaning journalism in presenting the news. This research can be implemented in Bahasa teaching plan for the second semester of eleventh grade of high school using school-based curriculum since it is very useful for the students to know and understand more about the development of journalism in the world and in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga atas terselesaikannya penyusunan skripsi dengan judul *“Jurnalisme Makna Dalam Berita Utama Harian Kompas dan Kedaulatan Rakyat Bulan Mei 2009 dan Implementasinya Dalam Bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Kelas XI Semester II”*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ag. Hardi Prasetyo, S.Pd., M.A, sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Yuliana Setyaningsih, Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah.
4. Bapak Drs. J. Prapta Diharja S.J., M.Hum. Selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. G. Sukadi, selaku dosen pembimbing II yang juga dengan sabar telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah yang telah membekali ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama studi sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
7. Seluruh civitas akademik Universitas Sanata Dharma, para dosen MKU, MKDK, Dekanat FKIP beserta staf, dan pihak perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sekertariat Program Studi Pendidikan Bahasa, sastra Indonesia, dan Daerah yang selalu sabar memberikan pelayanan dan membantu kelancaran penulis.
9. Pusat Informasi *Kompas* Biro Yogyakarta, atas beberpa berita yang dibutuhkan penulis.
10. Bapak dan Ibuku tercinta, Fransiskus Asisi Mardiyo dan Theresia Sumini, atas doa dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kakak, adik-adikku, dan seluruh keluarga besar yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman PBSID 2003, Frans, Bobby, Kotten, Sadewo, Hendri Suwoto, Andreas Wicakso, dan lain-lain, terimakasih atas kebersamaan dan semangat kekeluargaannya.
13. Teman-teman KKN, Alfa, Naomi, Linda, Kadek, Willy, Ita, Ayu, Silvy, dan Mayora (Siten mania), atas sindirannya sehingga penulis lebih bersemangat menyelesaikan skripsi ini.

14. Perpustakaan Harian Pagi *Kedaulatan Rakyat*, atas buku-buku yang dibutuhkan penulis.

15. Tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya sumbangan kritik, saran, dan pemikiran, dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 6 Maret 2010

Penulis

Yulius Dwi Pramono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

1.5 Batasan Istilah	7
1.6 Sistematika penyajian... ..	9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.2 Kerangka teori.....	11
2.2.1 Hakikat Jurnalisme.....	11
2.2.1.1 Prinsip-Prinsip Jurnalisme	12
2.2.2 Sejarah Jurnalisme	15
2.2.2.1 Jurnalisme Fakta	17
2.2.2.2 Jurnalisme Makna	19
2.2.2.3 Jurnalisme Ideologi	23
2.2.2.4 Berita.....	27
2.2.2.5 Ciri-ciri Jurnalisme Makna Dalam Berita	29
2.2.3 Implementasi Pembelajaran Jurnalistik.....	30
2.2.4 Pengembangan Silabus	31
2.2.4.1 Prinsip Dasar Pengembangan Silabus.....	31
2.2.4.2 Unit Waktu Silabus	33
2.2.4.3 Langkah-Langkah Pengembangan Silabus	33
2.2.5 Pengembangan (RPP)	38
2.2.5.1 Prinsip-Prinsip Pengembangan (RPP)	39
2.2.6 Kerangka Berpikir.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Subjek Penelitian.....	43
3.3 Sumber Data Penelitian	43
3.4 Instrumen Penelitian	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data.....	48
4.2 Hasil Analisis Data.....	55
4.2.1 Interpretasi Wartawan Yang Terdapat Dalam Berita Utama Surat Kabar <i>Kompas</i> Mei 2009	56
4.2.2 Interpretasi Wartawan Yang Terdapat Dalam Berita Utama Surat Kabar <i>Kedaulatan Rakyat</i> Mei 2009.....	74
4.2.3 Implementasi Jurnalisme Makna Sebagai Pembelajaran di SMA	82

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	92
5.2 Implikasi.....	93
5.3 Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA	95
----------------------	----

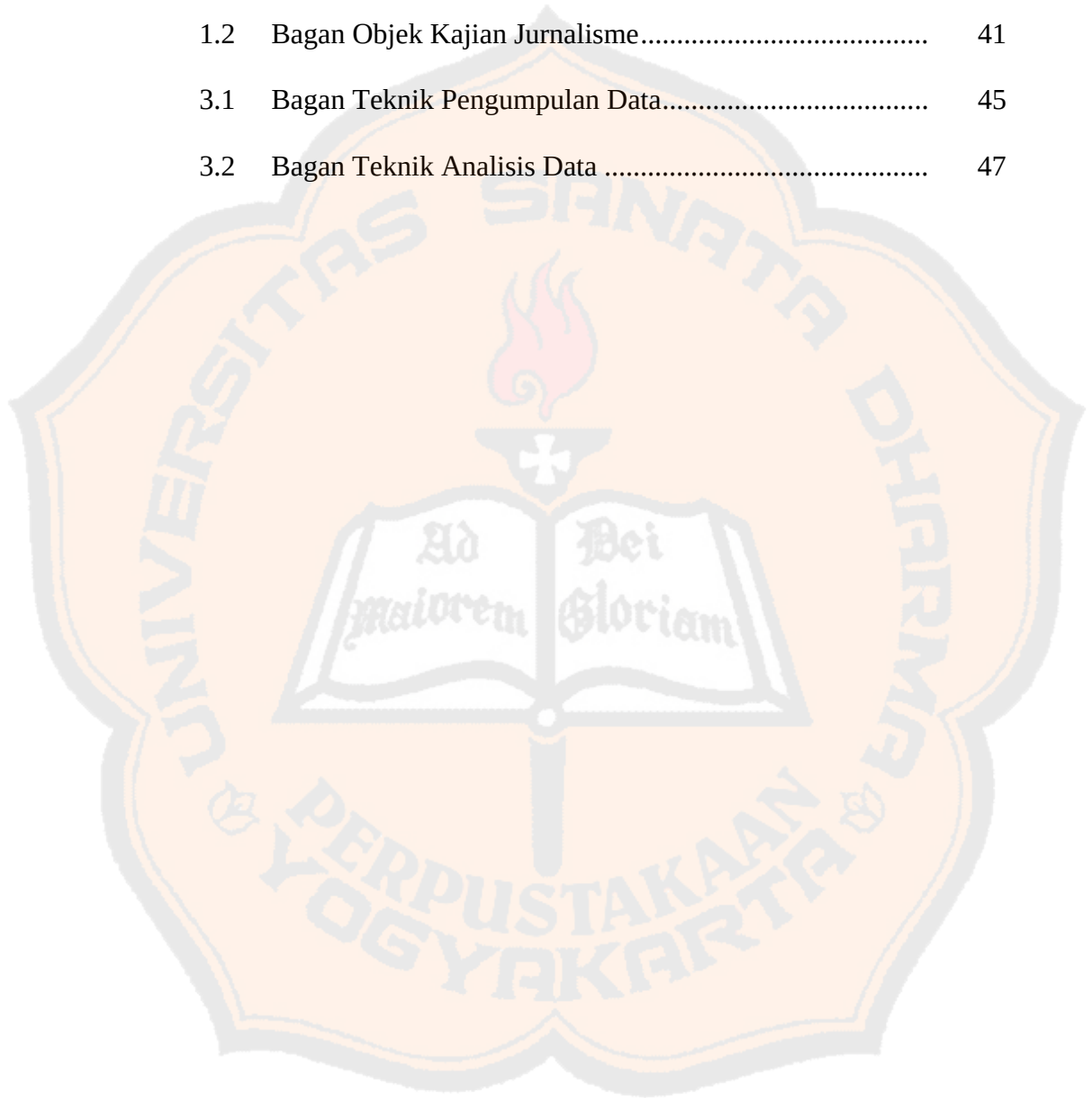
DAFTAR LAMPIRAN	97
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

4.1	Tabel Interpretasi Wartawan Dalam Berita Utama.....	49
4.2	Tabel Hasil Temuan Dalam Berita Utama <i>Kompas</i> Mei 2009.....	49
4.3	Tabel Hasil Temuan Dalam Berita Utama <i>Kedaulatan Rakyat</i> Mei 2009	52
4.4	Tabel Manuver PAN	57
4.5	Tabel Manuver Parpol Jelang Pilpres	58
4.6	Tabel Pertemuan PDI-P dengan Gerindra.....	60
4.7	Tabel Perjalanan Hidup Roh Moo-hyun	61
4.8	Sejumlah Aktivitas Presiden dan Wakil Presiden.....	63
4.9	Tabel Hak Angket DPR 1999-2009	64
4.10	Tabel Sejumlah Kasus Narkoba yang Terbongkar.....	75
4.11	Tabel Silabus.....	83

DAFTAR BAGAN

1.1	Bagan Kerangka Berpikir.....	40
1.2	Bagan Objek Kajian Jurnalisme.....	41
3.1	Bagan Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.2	Bagan Teknik Analisis Data	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Utama Harian Kompas Mei 2009 yang Mengandung Interpretasi Wartawan.....	98
Lampiran 2. Berita Utama Harian Kedaulatan Rakyat Mei 2009 yang Mengandung Interpretasi Wartawan	124



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia yang mendasar ialah memperoleh informasi, karena dengan informasi manusia dapat mengetahui secara pasti kejadian-kejadian yang terjadi disekitarnya dengan cepat dan akurat. Maka dari itu, proses jurnalistik sangat dibutuhkan. Secara teknis, Jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya (Sumardiria, 2005: 3). Ada beberapa bentuk jurnalistik yang sering kita temui seperti: jurnalistik media cetak (surat kabar atau majalah), jurnalistik media elektronik auditif (radio), dan jurnalistik media elektronik audiovisual (televisi).

Dalam jurnalisme media cetak atau surat kabar dikenal terdapat beberapa jenis tulisan seperti: berita, feature, tajuk rencana, pojok, kolom, surat pembaca, iklan, ada pula fiksi, karikatur, dan foto-foto. Berita dan feature dapat digolongkan sebagai fakta. Tajuk rencana bagian pojok, kolom, dan surat pembaca merupakan golongan opini, sedangkan fiksi, dan karikatur merupakan karangan fiktif. Salah satu cakupan dari jurnalistik yang akan digunakan oleh peneliti adalah berita. Menurut Williard C. Bleyer melalui Haris Sumardiria (2005: 64) berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut. Dalam

membuat sebuah berita, hal penting yang harus diperhatikan adalah berpegang pada fakta, supaya informasi yang disampaikan menjadi lebih akurat dan tidak menimbulkan kerancuan penafsiran dari masyarakat yang menjadi konsumen. Berita (*news*) lebih menekankan pada fakta sedangkan opini bersifat subjektif di mana, fakta dari peristiwa hanya menjadi acuan pengembangan-pengembangan pandangan jurnalis.

Sebuah berita yang baik haruslah mencakup 5 W + 1 H, yaitu: *Who* (siapa yang terlibat dalam kejadian), *What* (apa yang terjadi), *When* (kapan peristiwa itu terjadi), *Where* (di mana peristiwa itu terjadi), *Why* (mengapa peristiwa itu terjadi), dan *How* (bagaimana peristiwa itu terjadi). Pandangan yang dikemukakan oleh C.P Scott yang tercantum dalam pidato Jacob Oetomo (2003) berisi bahwa "*Comment is free but facts are sacred*" yang artinya "Opini itu bebas, tetapi fakta itu suci". Pandangan yang menjadi pegangan jurnalis di masa lalu sudah lama ditinggalkan. Berita yang bersifat obyektif sekarang mulai ditinggalkan karena menurut Iswara, banyak orang mendefinisikan obyektifitas dalam arti sempit yaitu hanya melaporkan apa yang penting untuk dikatakan dan dilakukan, dan kurang menghiraukan tentang sebab-musabab. Bahkan ada yang berpendapat bahwa obyektifitas, tidak perlu memberi penjelasan terhadap suatu masalah dan membiarkan pembaca untuk memecahkan sendiri (2005: 44). Oleh karena itu, berita yang bersifat obyektif dirasa kurang efektif karena, berita yang obyektif hanya menyajikan fakta sesuai dengan apa yang dilihat oleh wartawan, tanpa sekaligus menyajikan interpretasi akan arti dan makna dari peristiwa tersebut. Menurut Setiati dalam bukunya yang berjudul *Ragam Jurnalistik Baru* (2005: 43),

di Amerika Serikat, jurnalistik baru lahir dan tumbuh sepanjang tahun 1960-an. Jurnalistik baru yang dirintis oleh para wartawan senior Amerika ini muncul, karena kebosanan mereka terhadap standar baku dalam melakukan tugas peliputan dan penulisan berita. Kebosanan itu juga melanda terkait tata kerja jurnanisme lama yang dianggap kaku dan membatasi ruang gerak wartawan, teknik penulisan, dan bentuk laporan berita. Menurut Ishwara (2005: 47) jurnanisme berdimensi tunggal masa lalu bukan menghasilkan netralitas melainkan kedangkalan. Pembaca masa kini menginginkan kedalaman agar mereka mampu mengetahui dan memahami kejadian-kejadian yang ada dalam peristiwa, selain itu mereka juga ingin untuk dapat menghubungkan berita yang disajikan media dengan kerangka dan pengalaman hidup sehari-hari mereka.

Jurnanisme selalu mengalami perkembangan dari masa kemasa, termasuk juga jurnanisme di Indonesia. Salah satu tren yang sedang berkembang di dunia maupun di Indonesia adalah jurnanisme makna. Menurut Jacob Oetomo (2003) dalam pidatonya menyatakan bahwa, dewasa ini orang lewat media bukan sekedar ingin tahu, bukan berwacana saja, tetapi ingin memahami arti dan makna peristiwa tersebut. Selanjutnya khalayak tidak hanya ingin tahu maknanya saja, tetapi juga ke mana arah dan semangat penyelesaiannya.

Jurnanisme makna merupakan pencerminan perkembangan jurnanisme di Indonesia, wartawan telah diberi kebebasan untuk mengemukakan opininya tentang peristiwa yang ditulis untuk membantu membuka jalan pikiran khalayak. Jacob Oetomo adalah seorang tokoh jurnanisme nasional. Ia memperkenalkan sebuah pemaknaan berita yang tidak hanya berpegang pada keobyektifitasan suatu

kejadian tetapi juga menginterpretasikannya sehingga, berita tersaji lebih menarik dan penuh makna. Pada masa perkembangan jurnalisme saat ini, apakah media massa di Indonesia seperti surat kabar *Kompas* yang merupakan surat kabar yang berskala nasional dan surat kabar yang berskala daerah seperti *Kedaulatan Rakyat*, sudah memanfaatkan jurnalisme modern yang tidak terpaku pada obyektivitas?

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menganalisis jurnalisme makna yang terdapat dalam berita utama surat kabar *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat*. Peneliti tertarik untuk menganalisis jurnalisme makna dalam media massa, salah satunya dikarenakan belum ada penelitian lain yang menganalisis jurnalisme makna. Dengan adanya hasil analisis tersebut, diharapkan dapat memunculkan pemahaman tentang seberapa jauh jurnalisme modern seperti jurnalisme makna dimanfaatkan dalam sebuah berita. Selain itu juga, jurnalisme makna belum tercantum dalam pembelajaran jurnalistik di sekolah. Hal ini dikarenakan, jurnalisme makna merupakan jurnalisme baru dan belum sempat dikuasai oleh guru. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan jurnalisme makna dapat diimplementasikan sebagai pembelajaran jurnalistik di SMA untuk memperkaya pengetahuan siswa tentang jurnalisme.

Jurnalistik bukan merupakan hal baru bagi dunia pendidikan khususnya pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, karena dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) telah tercantum pembelajaran jurnalistik sebatas pengertian fakta dan opini, sampai pada membedakan fakta dan opini dalam tajuk rencana. Pembelajaran jurnalistik di SMA merupakan salah satu bagian pokok

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, walaupun materi yang diajarkan tidak sebanyak pembelajaran sastra. Pendidikan jurnalistik sangat bermanfaat bagi perkembangan kreativitas peserta didik karena, dengan adanya pembelajaran jurnalistik, siswa di sekolah diarahkan untuk mengembangkan kemampuannya dalam berkreaitivitas, salah satunya dengan cara membuat majalah dinding atau majalah sekolah. Tetapi, dikarenakan belum adanya aturan mengenai batasan dan definisi yang jelas, membuat jurnalisme di sekolah belum punya arah. Akibatnya, jurnalisme di sekolah sulit berkembang, Padahal antusiasme pelajar cukup tinggi.

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), setiap sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan pembelajarannya sendiri menurut karakteristik sekolah, satuan pendidikan dan kemampuan peserta didik. Maka dari itu, dengan adanya implemetasi jurnalisme makna terhadap pembelajaran jurnalistik di SMA dapat menjadi salah satu cara agar siswa secara langsung dilibatkan dalam mempelajari dan memahami jurnalisme modern.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut.

1. Apakah jurnalisme makna telah dimanfaatkan dalam berita utama harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* pada Mei 2009?
2. Ciri-ciri jurnalisme makna apakah yang terdapat dalam berita utama harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* Mei 2009?

3. Bagaimanakah implementasi ciri-ciri jurnalisme makna dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMA kelas XI semester II?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah media massa Indonesia sudah memanfaatkan jurnalisme makna dalam penyampaian beritanya.
2. Mendeskripsikan ciri-ciri jurnalisme makna pada berita utama harian *Kompas* dan *Kedaulatan rakyat* pada Mei 2009.
3. Mendeskripsikan implementasi ciri-ciri jurnalisme makna pada berita utama dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA kelas XI semester II.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan sebagai berikut.

1. Bagi Bidang Ilmu Jurnalistik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tentang perkembangan ilmu jurnalistik.

2. Bagi Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan untuk guru Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai salah satu pengembangan pembelajaran jurnalistik di SMA, khususnya berkaitan dengan pembelajaran jurnalistik.

3. Bagi Pembelajaran Jurnalistik di SMA

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada siswa, bahwa jurnalistik itu memiliki ragam-ragam yang menarik yang bisa dikupas dan dikembangkan dalam materi pembelajaran.

4. Peneliti Lain

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi jalan kepada peneliti-peneliti lain yang sejenis dan dapat dijadikan acuan atau tinjauan pustaka untuk peneliti lain selanjutnya.

1.5 Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan memfokuskan penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu :

1. Jurnalisme atau jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya (Sumardiria, 2005: 3).

2. Makna adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepat sebagai gejala-dalam-ujaran (Chaer, 1990).
3. Jurnalisme makna adalah jurnalisme yang bukan sekedar menyajikan fakta menurut urutan kejadiannya, bukan fakta secara linear, melainkan fakta yang mencakup, dan dalam penyajiannya berita bukan sekedar informasi tentang fakta, melainkan berita yang sekaligus menyajikan interpretasi akan arti dan makna dari peristiwa (Jacob Oetomo, 2003).
4. Berita utama merupakan berita yang mengungkapkan peristiwa yang sedang hangat, terdapat di bagian depan dan dibuat dengan sedemikian rupa biasanya disertai dengan foto atau tabel-tabel agar terlihat lebih menarik.
5. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1976: 75).
6. Pembelajaran adalah suatu yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal (<http://chemistry-education-net.blogspot.com/2008/11/pengertian-pembelajaran.html>).

1.7 Sistematika Penyajian

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I dalam penelitian ini berisi pendahuluan. Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penyajian.

Bab II dalam penelitian ini adalah landasan teori. Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori, dan kerangka berfikir.

Bab III dalam penelitian ini berisi metodologi penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV dalam penelitian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menguraikan deskripsi data penelitian dan hasil analisis data.

Bab V dalam penelitian ini berisi penutup. Bab ini akan menguraikan kesimpulan, implikasi, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dikemukakan landasan teori yang akan menguraikan tentang: (1) tinjauan pustaka dari penelitian jurnalistik terdahulu yang relevan, (2) kerangka teori.

2.1. Tinjauan Pustaka

Wahyuni (2000) meneliti tentang *Penyimpangan Pengembangan Paragraf Dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas Tahun 1997*. Masalah yang diteliti adalah: Bagaimanakah penyimpangan pengembangan paragraf pada paragraf-paragraf tajuk rencana *Kompas* 1997? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis penyimpangan pengembangan paragraf dalam tajuk rencana *Kompas* 1997, sampel penelitian adalah paragraf-paragraf dalam tajuk rencana *Kompas* Desember 1997.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti, ditemukan dua jenis penyimpangan pengembangan paragraf dalam tajuk rencana *Kompas*. Pertama, gagasan pokok pada satu paragraf dilanjutkan pada paragraf berikutnya. kedua, adanya penggunaan kata penghubung yang tidak tepat dalam pengembangan paragraf. Dari hasil penelitian tersebut diterangkan kesimpulan bahwa pengembangan dalam tajuk rencana *Kompas* 1997 belum sesuai dengan syarat pengembangan paragraf.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Hakikat Jurnalisme

Menurut Sumardiria (2005: 2) secara etimologi, jurnalistik berasal dari kata *journ*. Dalam bahasa Prancis, *journ* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak dengan secepat-cepatnya (Sumardiria, 2005: 3).

Secara konsep jurnalistik dapat dipahami dari tiga sudut pandang yaitu sebagai proses, teknik, dan ilmu.

1. Sebagai proses, jurnalistik adalah “aktivitas” mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan (jurnalis).
2. Sebagai teknik, jurnalistik adalah “keahlian” (*expertise*) atau “keterampilan” (*skill*) menulis karya jurnalistik (berita, artikel, feature) termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan serta peliputan peristiwa (reportase) dan wawancara.
3. Sebagai ilmu, jurnalistik adalah “bidang kajian” mengenai pembuatan dan penyebaran informasi (peristiwa, opini, pemikiran, ide) melalui media massa. Jurnalistik termasuk ilmu terapan (*applied science*) yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu, jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji

penyampian pesan, gagasan, pemikiran, atau informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahukan, mempengaruhi, atau memberikan kejelasan (<http://samirkhan.wordpress.com/2007/11/1/pengertian-jurnalistik>).

2.2.1.1 Prinsip-prinsip jurnalisme

Menurut Iswara (2005: 8-13) ada sembilan prinsip jurnalisme yang dikembangkan yaitu sebagai berikut.

1. Kewajiban Pertama Jurnalisme adalah pada Kebenaran

Jurnalisme bukan mengejar kebenaran dalam pengertian yang absolut atau filosofis, tetapi bisa dan harus mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik ini adalah suatu proses yang dimulai dengan disiplin profesional dalam mengumpulkan dan verifikasi fakta. Wartawan kemudian berusaha menyampaikan makna tersebut dalam sebuah laporan yang adil dan terpercaya, berlaku untuk saat ini, dan dapat menjadi bahan investigasi lanjutan.

2. Loyalitas Pertama Jurnalisme adalah kepada Warga Masyarakat

Bila wartawan harus menyediakan berita tanpa takut atau memihak, maka mereka harus memelihara kesetiaan kepada warga masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas di atas lainnya. Prioritas komitmen kepada warga masyarakat ini adalah basis dari kepercayaan sebuah organisasi berita.

3. Inti Jurnalisme adalah Disiplin untuk Verifikasi

Wartawan mengandalkan diri pada disiplin profesional untuk memverifikasi informasi. Ketika konsep objektivitas semua disusun, tidak berarti bahwa wartawan itu terbebas dari prasangka_*bias*. Yang obyektif adalah metodenya, tidak wartawannya. Mencari berbagai saksi, menyikap sebanyak mungkin sumber atau bertanya kepada berbagai pihak untuk memberikan komentar, semua mengisyaratkan adanya standar profesional. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan bentuk-bentuk yang lain, seperti propaganda, fiksi atau hiburan.

4. Para Wartawan Harus Memiliki Kebebasan dari Sumber yang Meliput

Kebebasan adalah syarat dasar jurnalisme. Ia menjadi sebuah landasan dari kepercayaan. Kebebasan jiwa dan pemikiran bukan hanya netralitas adalah prinsip yang harus dijaga oleh wartawan walaupun, editorial dan komentator tidak netral namun sumber dari kredibilitas mereka adalah tetap, yaitu akurasi, kejujuran intelektual dan kemampuan untuk menyampaikan informasi, bukan kesetiaan pada kelompok atau hasil tertentu.

5. Wartawan Harus Mengemban Tugas sebagai Pemantau yang Bebas Terhadap Kekuasaan

Prinsip ini menekankan pentingnya para penjaga_*watchdog*. Sebagai wartawan, kita wajib melindungi kebebasan peran jaga ini dengan tidak merendahnya, misalnya dengan menggunakannya secara sembarangan atau mengeksploitasinya untuk keuntungan komersial.

6. Jurnalisme Harus Menyediakan Forum untuk Kritik dan Komentar Publik

Diskusi publik ini bisa melayani masyarakat dengan baik jika mereka mendapatkan informasi berdasarkan fakta, dan bukan atas dasar prasangka atau dugaan-dugaan.

7. Jurnalisme Harus Berusaha Membuat yang Penting Menjadi Menarik dan Relevan

Jurnalisme adalah bercerita dengan suatu tujuan. Karena itu, jurnalisme harus berbuat lebih dari sekedar mengumpulkan *audiences* atau membuat daftar penting. Pendeknya, jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Kualitasnya diukur dari sejauh mana suatu karya melibatkan *audineces* dan mencerahkannya.

8. Wartawan Harus Menjaga Agar Berita itu Proporsional dan Komprehensif

Prinsip disini adalah “jurnalisme adalah suatu bentuk dari kartografi”. Ia menciptakan sebuah peta bagi warga masyarakat guna menentukan arah kehidupan. Menjaga agar berita tetap proporsional dan tidak menghilangkan hal-hal penting adalah juga dasar dari kebenaran. Menggelembungkan peristiwa demi sensasi, mengabaikan sisi-sisi yang lain, stereotip atau bersikap negatif secara tidak imbang akan membuat peta menjadi kurang dapat diandalkan.

9. Wartawan itu Memiliki Kewajiban Utama terhadap Suara Hatinya

Setiap wartawan harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab atau sebuah kompas moral, harus mau bila rasa keadilan dan akurasi mewajibkan

untuk menyuarakan perbedaan dengan rekan-rekan kita, apakah itu di ruang redaksi atau di kantor eksekutif.

2.2.2 Sejarah Jurnalisme

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar. Dengan rasa ingin tahu yang besar itulah yang mendorong manusia untuk berpikir dan berusaha menemukan cara untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Menurut Husban ([Http://husban.blogdrive.com/archive/54.html](http://husban.blogdrive.com/archive/54.html)) pada awalnya informasi diperoleh manusia adalah secara berantai atau sering disebut dari mulut ke mulut. Perkembangan jurnalisme sudah terjadi pada abad ke-8 M, yaitu pada jaman Romawi. Bentuk koran masa kini pada awalnya berasal dari pengumuman-pengumuman resmi yang dinamakan *Acta Diurna* atau *Gazette*. Periklanan serupa juga dikenal di Cina sebagai *Tching-pao* atau kabar istana yang muncul setiap hari.

Revolusi persuratkabaran dipicu dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johan Guttenberg pada tahun 1450, dan koran cetakannya yang berbentuk seperti sekarang ini, muncul pertama kalinya pada 1457 di Nurenberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar adalah penemuan hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika pada tahun 1493. Pada abad ke-17, di Inggris kaum bangsawan umumnya memiliki penulis-penulis yang bertugas membuat berita untuk kepentingan sang bangsawan, sehingga para penulis itu membutuhkan suplai berita. Organisasi pemasok berita (sindikatis wartawan atau penulis) bermunculan bersamaan maraknya jumlah koran

yang diterbitkan. Pada saat yang sama koran-koran eksperimental, yang bukan berasal dari kaum bangsawan mulai diterbitkan pada abad ke-17 terutama di Prancis.

Pada abad ke-18, Jurnalisme lebih merupakan bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Demikian pula keterampilan desain/perwajahan saat itu mulai berkembang dengan kian majunya teknik percetakan. Perkembangan awal jurnalisme ini juga mulai diwarnai dengan perjuangan panjang kebebasan pers. Pers Amerika dan Eropa berhasil menyingkirkan batu-batu sandungan sensorship pada akhir abad ke-18, dan memasuki era jurnalisme modern seperti yang kita kenal sekarang.

Pada Abad ke-19, koran tidak lebih dari sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah atau partai politik. Perceraian antara jurnalisme dengan politik terjadi pada sekitar tahun 1825-an sehingga, wajah jurnalisme sendiri menjadi lebih jelas, independen dan berwibawa. Sejumlah jurnalis yang muncul pada abad itu bahkan lebih berpengaruh ketimbang tokoh-tokoh politik atau pemerintahan, dan jadilah jurnalisme sebagai bentuk profesi yang mandiri.

Perkembangan jurnalisme di Indonesia boleh dikatakan merupakan replika dari seluruh perkembangan tadi. Bermula pada abad ke-19 (lewat tokoh seperti Tirta Adisuryo), memasuki abad ke-20 sebagai pers perjuangan (perpanjangan tangan politik) hingga tahun 1965-an. Tapi, sejak orde baru koran menjadi lebih independen atau bercerai dengan politik. Hingga sekarang jurnalisme di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan-perkembangannya, dengan munculnya ide-ide baru yang membuat jurnalisme semakin beragam dan menarik.

2.2.2.1 Jurnalisme Fakta

Menurut Edisantoso ([Http://edisantoso.com](http://edisantoso.com)? p=36), Jurnalisme fakta atau jurnalisme objektif banyak disamakan dengan istilah netralitas, atau memisahkan antara fakta dan nilai. Dalam perkembangannya kemudian, doktrin objektivitas menjadi strategi jitu para wartawan menghadapi “serangan”. Secara ekonomis strategi ini memang menguntungkan, karena bisa melindungi para wartawan dari tuduhan alat kepentingan politis. Dengan paham netralitas yang dianut, media kemudian tidak pantas untuk disudutkan. Karena sistem netralitas yang dianut wartawan inilah yang dirasa kurang tepat dan mengundang banyak kritikan sehingga, muncul perubahan dari fokus pada netralitas, menjadi penekanan pada akurasi, keseimbangan, dan kejujuran.

Menurut Erjavec (2003) dalam ([Http://edisantoso.com](http://edisantoso.com)? p=36) sebagai sebuah ideologi, jurnalisme obyektif ini mendasarkan pada pandangan empiris atas dunia, yang memisahkan antara fakta dan nilai, dan percaya bahwa eksistensi fakta sebagai hal yang terpisah di luar sana. Berita didefinisikan sebagai wujud yang terpisah dari diri wartawan. Berita adalah fakta yang ada di luar sana yang menunggu dicari dan ditulis, serta kemudian dipublikasikan oleh media.

Westerstahl (1983), dalam buku Nurudin (2009: 82-92) membagi objektivitas ke dalam dua kriteria yakni, faktualitas dan imprasialitas.

1. Faktualitas

Faktualitas adalah bentuk reportase yang berkaitan dengan peristiwa dan pernyataan yang bisa dicek ke narasumber dan bebas dari opini, atau setidaknya bebas dari komentar wartawan. Syarat utama faktualitas adalah kebenaran.

Kebenaran adalah keutuhan laporan, tepat, akurat yang ditopang oleh pertimbangan independen, dan tak ada usaha mengarahkan khalayak.

2. Imparsialitas

Imparsialitas mempunyai dua kategori keseimbangan dan netral. Keseimbangan yang dimaksud adalah pemberitaan yang ditulis wartawan harus bebas dari interpretasi dan opini. Netral yaitu adanya peliputan yang tidak memihak salah satu pihak. Tidak memihak ini dalam kurun waktu lama bisa dilakukan dengan peliputan *cover both side* (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang).

Di bawah ini akan diuraikan kelemahan dan kelebihan jurnalisme fakta yaitu, sebagai berikut.

Kelemahan jurnalisme fakta atau jurnalisme objektif adalah

- a. Dalam penyajiannya hanya melaporkan apa adanya sesuai dengan apa yang dilihat dan bentuk reportasenya bebas dari opini atau bebas dari komentar wartawan.
- b. Dengan hanya menyajikan fakta secara utuh, masyarakat jadi kebanjiran informasi.
- c. Prinsip objektivitas membuat wartawan sebagai penerima yang pasif dari pada sebagai penganalisis dan pemberi penjelasan.
- d. Berita yang bersifat objektif terlihat wartawan seolah-olah terbebas dari dosa setelah mematuhi kaidah pemberitaan yang berimbang, meliput dua pihak yang bertikai tanpa mempedulikan kebenaran dari fakta yang disampaikan, dan seolah-olah wartawan lari dari tanggung jawab atas

kebenaran fakta dengan dalih biarkan khalayak sendiri yang memaknainya.

Kelebihan jurnalisme fakta atau jurnalisme objektif adalah

- a. Menyajikan fakta secara utuh dengan dengan prinsip kebenaran.
- b. Keutuhan laporan secara tepat, akurat dan tidak ada usaha untuk mengarahkan khalayak.
- c. Bersikap netral yaitu tidak memihak salah satu pihak.

2.2.2.2 Jurnalisme Makna

Dalam pidato Jacob Oetomo (2003) dijelaskan bahwa Dewasa ini mulai terdengar pendapat yang bernada mengeluh. Bahwa akhirnya, masyarakat bukan hanya saja kaya akan jaringan informasi yang teknologi maupun tradisional, yang lokal maupun yang global, masyarakat bahkan mulai banjir informasi. Informasi yang dipresepsikan sebagai sumber pengetahuan, mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Kecemasan itu dikarenakan apakah sumber informasi sekedar menyampaikan informasi dengan memaparkan kejadian persoalan atautkah menyajikannya sedemikian rupa sehingga, khalayak memahami arti dan makna kejadian masalah itu. Masyarakat sekarang tidak hanya menginginkan berita yang menerangkan fakta yang menurut kejadiannya saja, tetapi berita yang dilengkapi dengan pemaknaan dan diberi interpretasi atas dasar interaksi fakta dan latar belakangnya sehingga, masyarakat mampu menangkap arti dan makna dari peristiwa.

Pencari makna berita serta penyajian makna berita merupakan pekerjaan rumah dan tantangan media. Jurnalisme obyektif yang merupakan landasan awal, kini mulai ditinggalkan, dan jurnalisme subjektif mulai digunakan. Subjektif dalam arti, secara serius, secara jujur, secara benar, secara profesional mencoba mencari tahu secara lengkap mengapa peristiwa itu terjadi dan apa arti dan maknanya. Seorang wartawan tidak hanya menuliskan informasi berdasarkan fakta, tetapi wartawan juga dapat mencantumkan opininya ke dalam sebuah berita untuk memberikan arti dan makna, seperti memberi pemahaman tentang peristiwa tersebut dalam konteks masa lalu, konteks masa sekarang, atau memberikan konteks prediksi ke depan, yang menurut Jacob Oetomo (2001) adalah konteks bermuka ganda yaitu *pertama*, konteks berhubungan langsung dengan kejadian serta persoalan yang menjadi bahan berita serta informasi, *kedua* konteks yang juga bertali-tali dengan kerangka referensi, dengan *frame of reference*.

Dalam jurnalisme makna peristiwa yang diberitakan tidak sekedar berupa fakta, melainkan disertai dengan interpretasi makna oleh wartawan berdasarkan konteks masa lalu, konteks sekarang atau saat ini, dan konteks prediksi ke depan. Di bawah ini akan di paparkan contoh interpretasi wartawan yang memaparkan konteks sekarang atau saat ini dalam memberikan arti dan makna pada peristiwa yang sedang terjadi. Dalam *Kompas* Rabu, 20 Januari 2009 yang berjudul “Sejarah Baru Amerika”:

Amerika menapaki sejarah baru setelah Barak Obama diambil sumpahnya sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat, Selasa (20/1) pukul 12.00 waktu setempat atau Rabu tengah malam WIB. Pelantikan ini merupakan lompatan besar bagi AS karena untuk pertama kalinya seorang keturunan kulit hitam menjadi presiden.

Interpretasi wartawan yang bertali-tali atau yang disebut memuat makna prediksi ke depan suatu peristiwa. dalam *Kompas* senin, 19 Januari 2009 yang berjudul “Tangki Pertamina Terbakar Masyarakat Diminta Tidak Panik, BBM Dipasok dari Depot Terbakar”:

Kebakaran yang diawali dengan tiga kali ledakan keras menimbulkan getaran kuat ini dikhawatirkan menghambat distribusi bahan bakar, mengingat depot plumping memasok 40 persen kebutuhan bahan bakar di Jabodetabek dan 20 persen bahan bakar di Jawa.

Jurnalis di Indonesia saat ini telah mendapat keleluasaan untuk memberikan opini atau interpretasi pemikirannya dari suatu peristiwa. Terbukti telah adanya peraturan yang tercantum dalam kode etik jurnalime yaitu,

Pada pasal 5 yang berisi,

wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisannya.

Sebuah proses pastilah terdapat pro dan kontra, ada yang sangat mendukung, dan ada juga sebagian yang tidak sependapat dengan adanya kebebasan wartawan untuk memberikan interpretasi pada berita. Dengan adanya kebebasan seperti ini, dikhawatirkan wartawan akan menjadi berat sebelah dan cenderung menyebar “fitnah” sehingga, cenderung merugikan pihak yang menjadi objek berita. Dapat dipastikan bahwa, hal tersebut tidak akan terjadi selama wartawan tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalisme yaitu,

Pada pasal 10 yang berisi,

wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau subjek berita.

Jurnalisme makna secara tidak langsung cukup memberi pengaruh pada penyampaian informasi dalam media massa, karena dengan berkembangnya intelektual masyarakat global, mereka jelas tidak puas dengan informasi yang apa adanya, yang lebih mereka inginkan adalah informasi yang memiliki arti dan makna suatu peristiwa. Selain jurnalisme makna dan dengan seiring berkembangnya jurnalisme di Indonesia, ada beberapa jenis jurnalisme modern yang mulai berkembang seperti jurnalisme empati, jurnalisme kekerasan, jurnalisme damai, jurnalisme omongan, jurnalisme advokasi, jurnalisme alternatif, jurnalisme presisi, dan jurnalisme sastra.

Di bawah ini akan diuraikan kelemahan dan kelebihan jurnalisme makna yaitu, sebagai berikut.

Kelemahan jurnalisme makna adalah:

- ❖ Jika tidak diberikan batasan yang pasti dikhawatirkan akan menjadikan interpretasi berat sebelah dan mengarahkan khlayak.

Kelebihan jurnalisme makna adalah:

- a. Dalam penyajian beritanya bukan hanya menyajikan berita secara utuh tetapi juga diberikan interpretasi oleh wartawan untuk membuka pikiran khlayak.
- b. Memunculkan makna karena pembaca masa kini menginginkan kedalaman agar mereka mampu mengetahui dan memahami kejadian-kejadian yang ada di belakang setiap peristiwa.

2.2.2.3 Jurnalisme Ideologi

Setiap negara di dunia mempunyai sistem pers tersendiri tergantung situasi politik yang berkembang di negara tersebut. Menurut Theodore L. Peterson, Fred S. Siebert, dan Willbur Schramm dalam (<http://adiprakosa.blogspot.com>) terdapat empat teori dasar pers yang ada di dunia saat ini yaitu: pers otoriter (*authoritarian press*), pers liberal (*libertarian press*), pers soviet komunis (*soviet communist press*), dan pers tanggung jawab sosial (*social responsibility press*). Berikut ini penjelasan tentang keempat teori tersebut.

1. Pers Otoriter (*authoritarian press*)

Pada awalnya pers otoriter lahir di negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja-raja atau sultan. Secara umum pers otoriter adalah pers yang mendukung dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan bersikap melayani pemerintah. Pada sistem ini kebebasan pers terbelenggu di mana kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa dianggap tabu. Tetapi, tidak menutup kemungkinan negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial juga menganut sistem pers otoriter. Indonesia pernah diterapkan pers otoriter, yaitu pada masa pemerintahan orde baru. Pada masa itu kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Soeharto mengatur dan mengekang kebebasan pers di Indonesia. Pers dibatasi hanya pada isu-isu yang dianggap pemerintah dapat menaikkan citra pemerintah di mata rakyat dan citra Indonesia di mata dunia.

2. Pers Liberal (*libertarian press*)

Teori liberal berkembang di Inggris dan Amerika pada tahun 1688 yang muncul sebagai akibat dari revolusi industri dan adanya tuntutan kebebasan berpikir. Teori ini merupakan lawan dari teori otoriter. Tugas pers liberal yang terpenting adalah memberikan informasi, menghibur, menjual, membantu menemukan yang terbaik, dan melaksanakan kontrol sosial serta pemerintahan. Pada sistem ini, kebebasan adalah hal yang utama sedangkan kontrol dari pemerintah dipandang sebagai pengekangan kebebasan berpikir. Teori liberal bukan sebagai alat pemerintah melainkan, sebagai alat untuk menyajikan fakta, alasan, dan pendapat rakyat untuk mengawasi pemerintah. Teori ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan ditandai banyaknya media massa-media massa yang muncul sehingga, masyarakat kebanjiran informasi.

3. Pers Soviet Komunis (*soviet communist press*)

Pers soviet komunis berkembang di negara-negara yang menganut sistem ideologi komunis seperti Rusia (Uni Soviet), Korea Utara, dan RRC. Sistem ini hampir sama dengan pers otoriter karena lembaga-lembaga pers dimiliki oleh penguasa atau partai politik yang berkuasa. Sistem ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx yang berisi tentang perubahan sosial. Pers merupakan alat pemerintah atau partai yang berkuasa yang menganut sistem ideologi komunis. Kritik diijinkan selama tidak bertentangan dengan ideologi partai atau pemerintah. Fungsi pers lebih mengacu pada indoktrinasi massa. Di negara yang berhaluan komunis tidak terdapat pers bebas, yang ada hanya pers pemerintah karena semua pengawasan dipegang oleh pemerintah.

4. Pers Tanggung Jawab Sosial (*social responsibility press*)

Pers tanggung jawab sosial muncul pada abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari liberal yang mengakibatkan kemerosotan sosial masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai oleh tanggung jawab kepada masyarakat. Teori pers tanggung jawab sosial, yang merupakan evolusi praktisi media dan hasil kerja komisi kebebasan pers berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberi informasi, menghibur, mencari untung (seperti dalam teori liberal), juga bertujuan untuk membawa konflik kedalam arena diskusi. Pada teori ini media dikontrol oleh masyarakat yang menjadi konsumen dan kode etik profesional dalam hal penyiaran seperti menjunjung tinggi kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.

Selain keempat teori di atas Wonohito dalam (<http://sisil-maserpiace.blogspot.com>) memperkenalkan sebuah teori ideologi yaitu teori Pers Pancasila (*pancasila press theory*). Inti yang terkandung dari Pers Pancasila adalah sebagai berikut.

- ❖ Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- ❖ Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.

- ❖ Hakikat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif. Melalui hakikat dan fungsi pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab.

Teori dasar pers di atas menandakan bahwa jurnalisme tradisional masa itu menjadi salah satu sumber kecemasan masyarakat karena, media massa digunakan sebagai alat untuk penyaluran ideologi. Pada teori pers otoriter dan pers soviet komunis jurnalisme hanya menjadi corong ideologi di mana pemerintah yang berkuasa memegang kendali pengawasan pers. Sedangkan pers liberal lebih menganut kebebasan mutlak sehingga mengakibatkan kemerosotan sosial, pada pers tanggung jawab sosial sistem jurnalisme makin terarah karena muncul akibat dari ketidakpuasan terhadap jurnalisme-jurnalisme sebelumnya. Pada Pers Pancasila, teori dan konsepnya masih terjadi perdebatan dan belum menemukan kesepahaman, karena Pancasila merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh masyarakat dan dikhawatirkan teori dan konsep Pers Pancasila ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Sama halnya dengan jurnalisme di Indonesia, setelah jatuhnya rezim orde baru yang mengekang kebebasan pers, jurnalisme mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media massa berperan menjadi kontrol sosial dan pemerintahan. Jurnalisme makna yang diperkenalkan oleh Jacob Oetomo merupakan jurnalisme

modern yang bukan bersifat ideologi. Jurnalisme makna berusaha menyajikan berita secara profesional dan bertanggung jawab untuk membuka pikiran masyarakat dengan cara memberikan makna dari peristiwa dalam bentuk interpretasi agar masyarakat dapat mengetahui kemana arah penyelesaiannya.

2.2.2.4 Berita

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *on-line* internet (Sumardiria, 2005: 65). Unsur-unsur dalam berita menurut Setiati (2005: 18-19) yaitu:

1. Kebermaknaan (*Significance*): Kejadian dapat berupa kehidupan orang banyak atau pembaca.
2. Besaran (*Magnitude*): Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak.
3. Kebaruan (*Timeliness*): Suatu kejadian menyangkut peristiwa yang baru terjadi.
4. Kedekatan (*Proximity*): Suatu kejadian yang dekat dengan pembaca. Kedekatan itu bisa secara geografis atau emosional.
5. Kemasyhuran/sisi manusiawi (*Prominence/Human Interest*): Suatu kejadian yang memberi sentuhan rasa kepada para pembaca. Mengungkapkan peristiwa terkenal, figur publik, atau masyarakat biasa dalam peristiwa luar biasa.

Ishwara (2007: 51-52), memaparkan bahwa dalam media masa terdapat dua macam berita yaitu *pertama*, berita yang terpusat pada peristiwa yang khas menyajikan peristiwa hangat yang baru terjadi, dan umumnya tidak diinterpretasikan dengan konteks yang minimal serta tidak dihubungkan dengan situasi dan peristiwa lain. *Kedua*, berita yang berdasarkan pada proses yang disajikan dengan interpretasi tentang kondisi dan situasi dalam masyarakat yang dihubungkan dengan konteks yang luas dan melampaui waktu.

Menurut Setiati (2005: 31-32) saat ini, berita jurnalistik terbagi ke dalam 3 jenis yang masing-masing memiliki karakter tersendiri. Ketiga jenis berita tersebut adalah.

1. Berita langsung (*straight/hard/spot/news*)

Berita langsung digunakan untuk menyampaikan kejadian penting yang secepatnya diketahui pembaca. Aktualisasi merupakan unsur yang penting dari berita langsung. Kejadian yang sudah lama tidak lagi bernilai dalam berita langsung. Aktualitas bukan hanya menyangkut waktu, tetapi juga sesuatu yang baru diketahui atau ditemukan.

2. Berita ringan (*soft news*)

Berita ringan tidak mengutamakan unsur penting yang hendak diberitakan, tetapi mengenai sesuatu yang menarik. Biasanya berita ringan dapat menyentuh perhatian dan emosi pembaca.

3. Berita kisah (*feature*)

Berita kisah adalah tulisan tentang kejadian yang dapat menyentuh perasaan atau menambah pengetahuan pembaca lewat penjelasan lengkap

dan mendalam. Nilainya ditekankan pada unsur manusiawi, sekaligus dapat menambah pengetahuan pembaca.

Salah satu berita langsung yang terdapat dalam media massa adalah berita utama. Keberadaan berita utama sangat penting dalam media massa, karena berita utamalah yang mewakili sebuah media massa, apakah pembaca akan tertarik membaca media massa tersebut atau tidak. Oleh karena itu, berita utama biasanya dibuat sedemikian menarik dari peristiwa baru yang paling hangat, agar dapat menarik minat pembaca untuk membeli dan membaca media massa tersebut. Berikut ini ciri-ciri umum dari berita utama:

1. Terdapat di halaman depan atas.
2. Judul ditulis menggunakan huruf besar, dicetak tebal dan dengan kata-kata yang menarik.
3. Biasanya disertai dengan foto atau tabel.
4. Isi dikemas dengan menarik disertai fakta-fakta yang akurat.
5. Mengungkapkan peristiwa yang sedang hangat terjadi.

2.2.2.5 Ciri-Ciri Jurnalisme Makna Dalam Berita

Ciri-ciri jurnalisme makna dalam berita adalah, selain fakta juga terdapat penafsiran makna sebagai berikut,

1. Terdapat penafsiran makna konteks masa lalu dari peristiwa hangat yang sedang terjadi.
2. Terdapat penafsiran makna konteks sekarang dari peristiwa yang sedang terjadi.

3. Terdapat penafsiran makna konteks ke depan (bertali-talian) dari peristiwa hangat yang sedang terjadi.

2.2.3 Implementasi Pembelajaran Jurnalistik di SMA

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006: 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Menurut Mulyasa (2008: 2) Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah. Dengan demikian implementasi KTSP di setiap sekolah dan satuan pendidikan akan memiliki warna yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan kebutuhan wilayah dan daerah masing-masing; sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah dan satuan pendidikan; serta sesuai pula dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan peserta didik.

Guru sangat berperan penting dalam proses pengajaran di sekolah. Secara jujur harus diakui bahwa, sukses tidaknya implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasi kurikulum tersebut dalam pembelajaran (*who is behind classroom*) (Mulyana, 2008: 5). Seorang guru yang mempunyai pengetahuan dan metode yang cukup memadai merupakan salah satu kunci keberhasilan tercapainya tujuan.

Mata pelajaran jurnalistik memang tidak cukup banyak tercantum dalam kurikulum, tetapi pembelajaran jurnalistik sangat penting untuk dipelajari. Dengan adanya pembelajaran jurnalistik di sekolah, diharapkan nantinya para siswa dapat mengenal jenis-jenis jurnalistik, sekaligus dapat mengembangkan kreativitasnya melalui wawancara sampai membuat sebuah berita untuk majalah sekolah.

2.2.4 Pengembangan Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian (BSNP, 2006: 14).

2.2.4.1 Prinsip Dasar Pengembangan Silabus

Dalam implementasi kurikulum satuan tingkat pendidikan, setiap sekolah diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengembangkan silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kondisi dan kebutuhan masing-masing (Mulyana, 2008: 138). Agar pengembangan silabus yang dilakukan sekolah tetap sesuai dengan standar nasional, dalam proses pengembangannya perlu mengikuti prinsip-prinsip pengembangan silabus. Dalam BSNP (2006: 14 - 18) prinsip-prinsip dasar pengembangan silabus yaitu:

a. Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

b. Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, maupun pengembangan fisik.

c. Sistematis

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.

d. Konsisten

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.

e. Memadai

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.

f. Aktual dan kontekstual

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.

g. Fleksibel

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.

h. Menyeluruh

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psiko motorik).

2.2.4.2 Unit Waktu Silabus

- a. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan
- b. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per-semester, pertahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok.
- c. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus SMK/MK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

2.2.4.3 Langkah-Langkah Pengembangan Silabus

A. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Urutan berdasarkan hirarki konsep disiplin ilmu/atau tingkat kesulitan materi, tidak selalu harus sesuai dengan aturan yang ada di SI,
2. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran,
3. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

B. Mengidentifikasi Materi Pokok/pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan

1. Potensi peserta didik
2. Relevansi dengan karakteristik daerah
3. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik,
4. Kebermanfaatan bagi peserta didik,
5. Struktur keilmuan,
6. Aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran,
7. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan dan,
8. Alokasi waktu.

C. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman yang dimaksud dapat terwujud melalui

penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
2. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
3. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
4. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur pencirian yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, kegiatan siswa dan materi.

D. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasikan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk alat penilaian.

E. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek/produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

1. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
2. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
3. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.
4. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.

5. Sistem penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

F. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

G. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

2.2.5 Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, karena RPP merupakan perencanaan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Menurut Mulyana (2008: 155-156), sedikitnya terdapat dua fungsi RPP dalam implementasi KTSP, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan pembelajaran

1. Fungsi Perencanaan

RPP hendaknya dapat mendorong untuk lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran guru wajib memiliki persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Dosa hukumnya bagi guru yang mengajar tanpa persiapan, dan hal tersebut hanya akan merusak mental dan moral peserta didik.

2. Fungsi Pelaksanaan

Untuk menyukseskan implementasi KTSP, RPP harus disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran aktual. Dengan demikian, RPP berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, sekolah, dan daerah. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus terorganisasi melalui serangkaian kegiatan tertentu, dengan strategi yang tepat dan mumpuni.

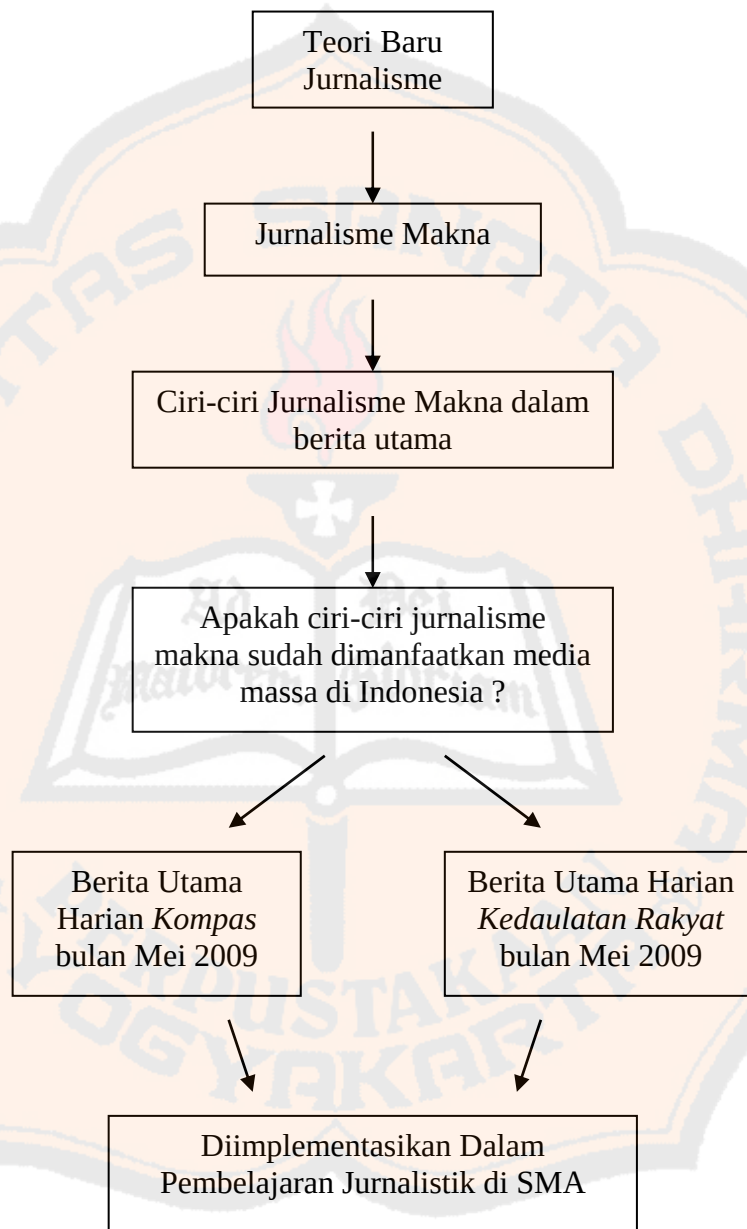
2.2.5.1 Prinsip-prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan RPP yaitu:

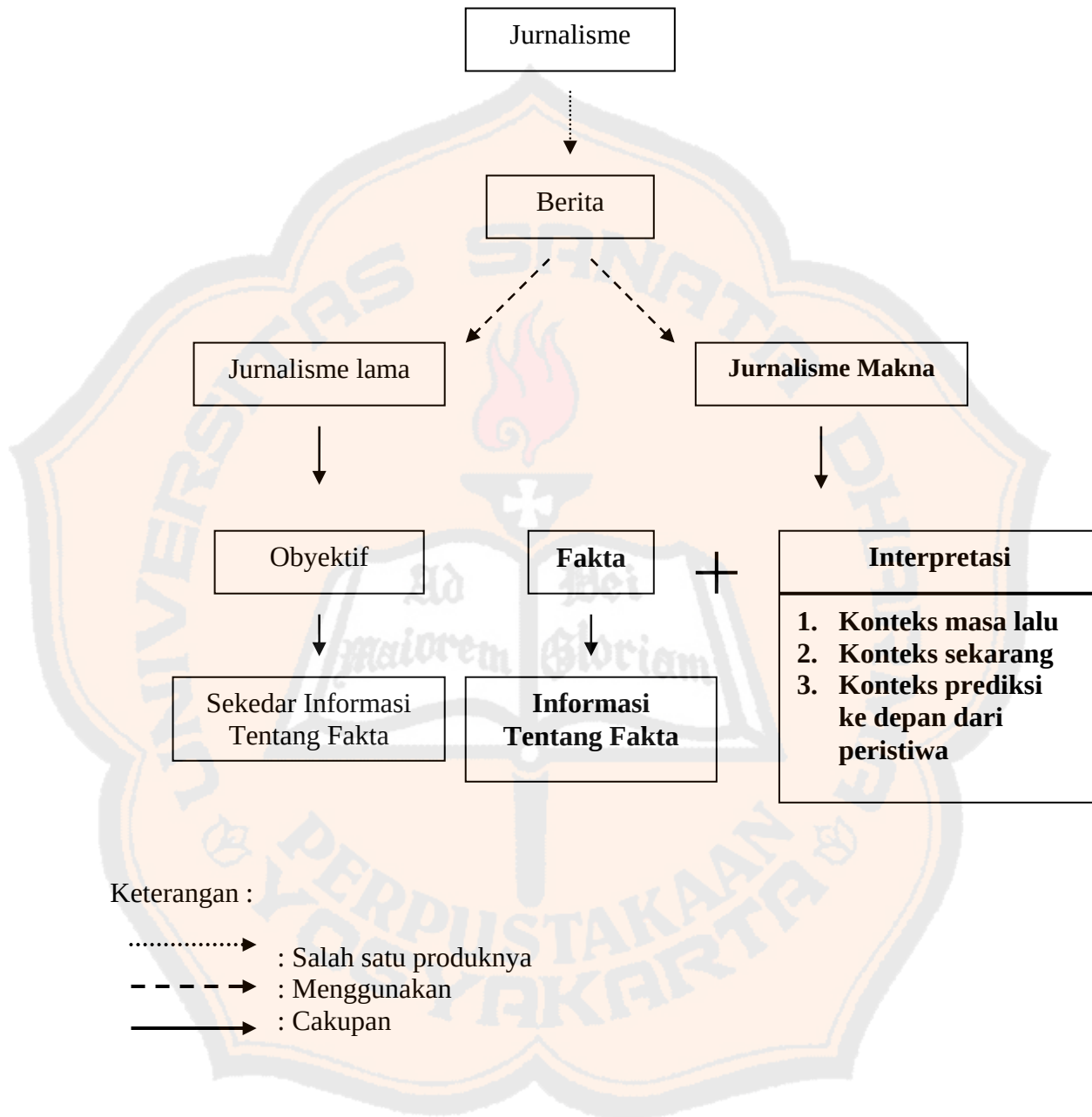
- a. Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas; Makin konkret kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut.
- b. Rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik.
- c. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
- d. RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.
- e. Harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim (*team teaching*) atau *moving class*.

2.2.6 Kerangka Berpikir

Bagan 1.1
Kerangka Berpikir



Bagan 1.2
Objek Kajian Jurnalisme



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 4), penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan dua metode untuk menjawab rumusan masalah. Kedua metode tersebut adalah metode analisis isi dan metode pengembangan. Menurut Budd (Burhan, 2001: 187), metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Sedangkan menurut Berelson (Moleong, 1989: 179), mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Metode analisis isi dimaksudkan untuk menemukan dan menganalisis jurnalisme makna atau interpretasi wartawan yang terdapat dalam berita utama.

Metode kedua yang digunakan adalah metode pengembangan. Menurut Elly (Gafur, 1982: 21), pengembangan adalah suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari masalah-masalah pengajaran agar dapat mendapatkan pemecahan yang teruji validitasnya dan praktis bisa dilakukan. Tujuan yang

hendak dicapai dengan metode pengembangan ini adalah tersusunnya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran membaca di SMA kelas XI semester II sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

3.2 Subjek Penelitian

Subjek adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian (Amirin, 1986: 92). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah berita utama *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* pada bulan Mei 2009. Alasan memilih harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* bulan Mei 2009, dikarenakan *Kompas* merupakan harian yang memiliki publisitas berskala nasional, sedangkan *Kedaulatan Rakyat* merupakan harian terbesar di Yogyakarta. Selain itu juga untuk memberi batasan jumlah berita yang digunakan untuk penelitian.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber tertulis. Sumber tertulis yang dimaksud adalah berita utama harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* bulan Mei 2009. Dari data tersebut yang menjadi objek kajian adalah ciri-ciri jurnalisme makna yang terdapat dalam berita utama harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* bulan Mei 2009.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih

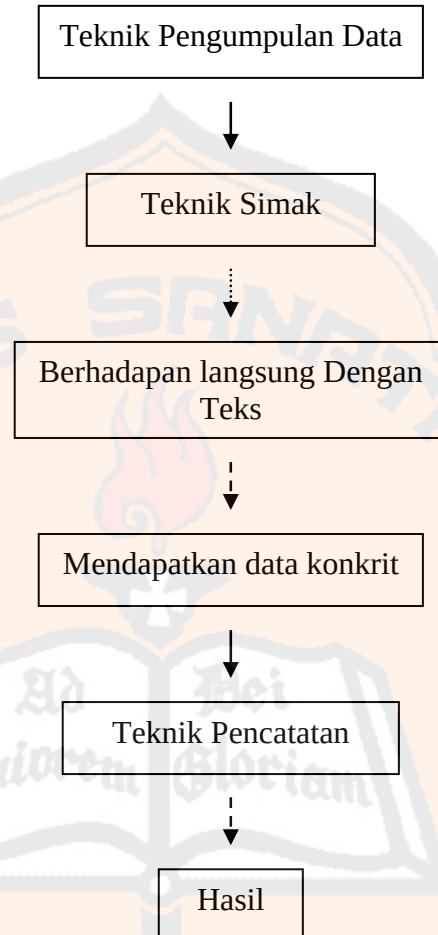
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006: 160). Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* pada bulan Mei 2009.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik adalah cara untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik simak dan teknik catat. Teknik simak adalah teknik yang digunakan peneliti dengan cara berhadapan langsung dengan teks yang menjadi objek penelitian, tujuannya untuk mendapatkan data secara konkret (Sudaryanto, 1993: 135). Teknik pencatatan adalah teknik yang dilakukan dengan cara meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dicari pemecahannya, kemudian hasil yang diperoleh dicatat.

Berdasarkan kedua teknik di atas, penelitian ini menggunakan sumber tertulis. Sumber tertulis adalah buku-buku yang memuat uraian pedoman tentang jurnalistik, pedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006), dan berita utama dalam harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* pada bulan Mei 2009. Data yang diambil dikumpulkan dan dicatat, yaitu data-data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah, dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki ciri-ciri jurnalisme makna dalam berita utama, seperti interpretasi wartawan dalam konteks masa lalu, saat ini, dan prediksi ke depan. Di bawah ini adalah bagan yang menjelaskan langkah-langkah teknik pengumpulan data.

Bagan 3.1
Teknik Pengumpulan Data



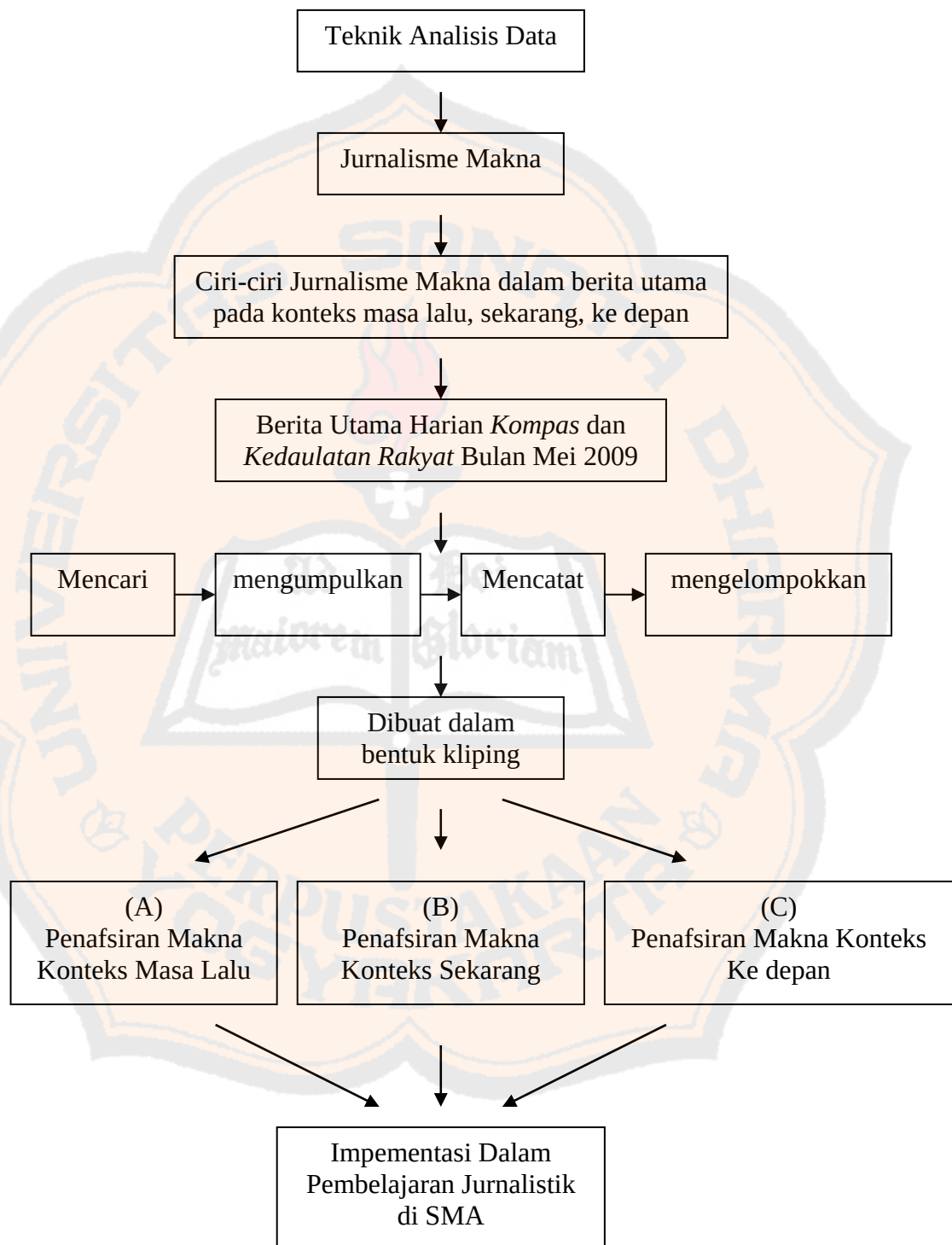
Keterangan :

- > : Menggunakan
-> : Dengan Cara
- - - - -> : Untuk

3.6 Teknik Analisis Data

Data merupakan hasil pencatatan penilaian tentang objek. Hasil pencatatan dapat berupa fakta maupun angka yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun informasi (Arikunto, 1991: 91). Analisis data dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan jurnalisme makna yang terdapat dalam berita utama surat kabar *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* Mei 2009 pada hari yang sama. Setelah dikumpulkan data digunting dan dibuat dalam bentuk kliping sesuai dengan nama surat kabar dan tanggal terbit pada bulan Mei 2009. Setelah itu diberikan kode untuk membedakan jenis-jenis interpretasi, kode (A) merupakan interpretasi pada konteks masa lalu terhadap fakta yang diberitakan, kode (B) merupakan interpretasi pada konteks sekarang atau saat ini terhadap fakta yang sedang diberitakan, dan kode (C) interpretasi pada konteks prediksi kedepan dari peristiwa yang terjadi. Setelah itu diimplementasikan dalam pembelajaran di SMA. Di bawah ini merupakan kerangka teknik analisi data.

Bagan 3.2
Teknik Analisis Data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai pada bulan Mei-Agustus 2009. Untuk memperoleh data, peneliti mengumpulkan surat kabar *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* yang dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2009, pengecualian pada tanggal 9 dan 21 Mei, surat kabar *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* tidak terbit dikarenakan hari libur nasional. Setelah data terkumpul, berita yang dapat diolah sebanyak 29 berita utama dari surat kabar *Kompas*, dan 29 berita utama dari surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, jadi total keseluruhan data yang dapat diolah adalah 58 berita utama.

Setelah melalui proses penelitian, ditemukan 24 berita utama yang mendapat interpretasi. Pada berita utama *Kompas* Mei 2009 ditemukan 17 (tujuh belas) interpretasi yang diberikan oleh wartawan yaitu, 6 (enam) interpretasi pada konteks masa lalu, 9 (sembilan) interpretasi pada konteks sekarang, dan 2 (dua) interpretasi pada konteks prediksi ke depan dari peristiwa yang sedang terjadi. Pada berita utama *Kedaulatan Rakyat* Mei 2009, ditemukan 10 (sepuluh) interpretasi yang diberikan oleh wartawan, 1 (satu) interpretasi pada konteks masa lalu, dan 9 (sembilan) interpretasi pada konteks sekarang sedangkan, interpretasi pada konteks prediksi ke depan dari peristiwa yang sedang terjadi tidak ditemukan. Jadi, keseluruhan

interpretasi yang terdapat dalam 24 berita utama ditemukan sebanyak 27 interpretasi karena, dalam satu berita utama bisa terdapat dua atau lebih interpretasi.

Tabel 4.1
Interpretasi Wartawan dalam Berita Utama

Nama media massa	Konteks masa lalu	Konteks sekarang	Konteks ke depan
<i>Kompas</i>	6	9	2
<i>Kedaulatan Rakyat</i>	1	9	-

Tabel 4.2
Hasil Temuan dalam Berita Utama *Kompas* Mei 2009

No	Tanggal Berita	Judul Berita Utama	Konteks Masa Lalu	Konteks Sekarang	Konteks Ke depan
1.	1-05-09	Antasari: Saya Tidak Terlibat (Tersangka kenal Antasari Azhar)	-	-	-
2.	2-05-09	Kewenangan Antazhari Dilepaskan (Posisinya Diganti Wakil Ketua KPK)	-	-	-
3.	3-05-09	Kalla: Golkar Jadi "Bumper" (Rakernas PAN Sepakat Ke Demokrat dan Ajukan Hatta Rajasa)	-	-	-
4.	4-05-09	Politisi Belum Jadi Negarawan (Politik Nasional Teredukasi Jadi Perebutan Kekuasaan Saja)	-	V	-
5.	5-05-09	KPK Tunggu Surat Polisi (Antasari dan Tersangka Lain Terancam Hukuman Mati)	-	-	-

6.	6-05-09	Polisi Sita Rekaman (Draf Pemberhentian Antasari Sudah Dibuat)	-	-	-
7.	7-05-09	Hatta Temui Megawati (Giliran PDI-P Diperhitungkan)	V	V	V
8.	8-05-09	Pemberantasan Korupsi Terancam (Anggota DPR Minta KPK Tak Lakukan Apa-apa)	-	V	-
9.	10-05-09	49,6 Juta Orang Tak Memilih (Sembilan Partai Politik Lolos ke DPR)	-	-	-
10.	11-05-09	Demokrat-PDIP Terbuka Lebar (Nasib Koalisi Besar Dipertanyakan)	-	V	-
11.	12-05-09	Posisi PDI-P Dilematis (Partai Keadilan Sejahtera Minta PDI-P "Kulonuwun")	-	V	-
12.	13-05-09	SBY Pilih Boediono (Dukungan Koalisi Belum Utuh)	-	-	-
13.	14-05-09	PKS-PAN Ancam Tak Dukung (Partai Demokrat: Boediono Sudah Final)	V	V	-
14.	15-05-09	PDIP-Gerindra Masih Alot (Demokrat dan PDI-P Terus Buka Komunikasi)	V	-	-
15.	16-05-09	Mega-Prabowo Siap Tarung (Kedua Partai Kedepankan Ekonomi Kerakyatan)	-	V	-
16.	17-05-09	Pertarungan Capres Dimulai (Hatta Rajasa Ketua Tim Pemenang SBY-Boediono)	-	-	-
17.	18-05-09	Kontrak Politik Baru	-	-	-

		Wacana (JK-Wiranto Belum Bagi Kekuasaan, Prabowo Akan Urusi Ekonomi)			
18.	19-05-09	Kontrak Politik Harus Transparan dan Detail (Kontrak Politik Capres Bisa Menangi Hati Rakyat)	-	-	-
19.	20-05-09	MK: KPU Tak Serius (Tak Hadiri Sidang, Kuasa Hukum KPU Tak Mampu)	-	-	-
20.	22-05-09	Penyebabnya Belum Terkuak (Warga Sipil Keluarga TNI Bisa Menumpang Angkutan Udara Militer)	-	-	-
21.	23-05-09	Kader di Daerah Beda Sikap (Tim Sukses Calon Presiden Mulai Dideklarasikan)	-	-	-
22.	24-05-09	Mantan Presiden Korsel Bunuh Diri (Kekaguman Rakyat Dikotori Tindakan Korupsi)	V	-	-
23.	25-05-09	2009, 76 Anggota TNI Tewas (Kecelakaan Kian Sering, Perlu Kebijakan Drastis)	-	-	V
24.	26-05-09	Rakyat Jangan Berharap Banyak (Hanya 8 dari 50 Anggota Komisi I DPR yang Terpilih)	-	-	-
25.	27-05-09	Koordinasi Pemerintah Semakin Lemah (Anggota Kabinet Mulai Terpolarisasi)	V	V	-
26.	28-05-09	Panitia Angket Didorong (Demokrat Nilai F-PAN, F-PPP,	V	-	-

		dan F-KB Tak Elok)			
27.	29-05-09	Persetujuan bagi Rakyat Hak Angket (Kursi Menteri Tidak Bisa Dibeli)	-	-	-
28.	30-05-09	Kampanye Dilarang Sampai 1 Juni (Aturan Dinilai Tidak Masuk Akal)	-	-	-
29.	31-05-09	Mega-SBY Jabat Tangan (Megawati Nomor 1, SBY Nomor 2, Kalla Nomor 3)	-	V	-

Tabel 4.3
Hasil Temuan dalam Berita Utama *Kedaulatan Rakyat* Mei 2009

No.	Tanggal berita	Judul Berita	Konteks Masa Lalu	Konteks Sekarang	Konteks Ke depan
1.	1-05-09	Panglima TNI Minta Maaf Kasus Tentara Mengamuk (Komandan Batalyon Dicotot)	-	-	-
2.	2-05-09	Presiden Segera Berhentikan Ketua KPK (Antasari Tersangka Pembunuhan)	-	-	-
3.	3-05-09	PAN Akhirnya Koalisi Dengan Demokrat (Usung Hatta Radjasa Jadi Cawapres)	-	-	-
4.	4-05-09	Lagi, Dibongkar Pabrik Sabu (30 Kg Senilai Rp 60 Miliar Siap Edar)	V	-	-
5.	5-05-09	Ditahan Terkait Dugaan Pembunuhan Nasrudin, Antasari Terancam Hukuman Mati	-	-	-
6.	6-05-09	Motif Pembunuhan Nasrudin Masih Misteri (Rani dan Sopir, Saksi	-	V	-

		Kunci)			
7.	7-05-09	Presiden Segera Tanda tangani Surat Pemberhentian Antasari (Kapolri Ragukan Motif Cinta)	-	-	-
8.	8-05-09	Deklarasi 'JK-WIR' Dilaksanakan di Yogya (Mega-Prabowo, Alot)	-	V	-
9.	10-05-09	MK Langsung Buka Pendaftaran Gugatan Pemilu (Partai Demokrat Jawa)	-	-	-
10.	11-05-09	Komunikasi Dengan PDI Perjuangan Intensif (Sultan Berpeluang Cawapres)	-	-	-
11.	12-05-09	Jalin Komunikasi, SBY dengan Mega Merapat (Kian Kuat, Boediono Cawapres)	-	V	-
12.	13-05-09	Sosialisasi Tanah Magersari PA Ground Kulonprogo, Buntu (Warga Ingin Sertifikasi)	-	-	-
13.	14-05-09	Gara-gara Pilpres, Taufik Kiemas Dirawat di RS (Duet SBY-Boediono, Sudah 99%)	-	-	-
14.	15-05-09	Tersendat, Duet Mega Prabowo (PKS Tetap Ancam Tarik dari Koalisi PD)	-	V	-
15.	16-05-09	Boediono Jawab Keraguan, olak Dagang Kekuasaan (PKS Akhirnya Tetap Bergabung)	-	-	-
16.	17-05-09	Pencapresan Selesai, akan Umumkan Terbuka (Sultan Minta Maaf)	-	-	-
17.	18-05-09	Keluarga Sambut Baik Permintaan Maaf	-	-	-

		Sultan Soal Capres (Kraton Minta Konsentrasi RUUK)			
18.	19-05-09	Sultan Tak Arahkan Pilih Capres Tertentu (Hari Ini, Deklarasi JK- Wiranto di Monjali)	-	-	-
19.	20-05-09	Penggembosan Bayangi Koalisi Parpol (Semua Pasangan Capres- Cawapres Lolos Tes Kesehatan)	-	V	-
20.	22-05-09	Sebagian Korban Hercules Belum Teridentifikasi (109 Tewas, 5 dari Yogya)	-	V	-
21.	23-05-09	Korban Tewas Bisa Bertambah (Proses Evakuasi Tragedi Hercules Masih Berlangsung)	-	-	-
22.	24-05-09	Evakuasi Korban Hercules Dihentikan (KASAU Harus Kesatria, Mundur!)	-	-	-
23.	25-05-09	Penetapan KPU Dibayangi Gugatan (Caleg Harus Siap Lengser)	-	-	-
24.	26-05-09	JK Dibayangi Munaslub ('Sindiran' Capres Memanas)	-	V	-
25.	27-05-09	Koalisi Partai Demokrat Digembosi (DPR Setuju Hak Angket DPT)	-	V	-
26.	28-05-09	Tiga Karyawan Minimarket Disekap (Spesialis Rampok ATM Beraksi)	-	-	-
27.	29-05-09	Ambalat Memanas, TNI Kirim Pesawat Intai (Kapal Perang	-	V	-

		Malaysia Diusir)			
28.	30-05-09	KPU Hentikan Kampanye Capres	-	-	-
29.	31-05-09	Nomor Urut Pilpres Diundi, Tak Pengaruhi Hasil (Setelah 5 Tahun, SBY-Mega Salaman)	-	-	-

4.2 Hasil Analisis Data

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam rangka menjawab permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah. Uraian berupa deskripsi interpretasi wartawan yang terdapat dalam berita utama surat kabar *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* pada bulan Mei 2009. Uraian ini sekaligus menjawab seberapa jauh kedua media massa ini telah menggunakan jurnalisme makna dalam penyampaian berita.

Dalam teori jurnalisme makna, terdapat tiga konteks yang digunakan dalam menginterpretasikan peristiwa-peristiwa yang diangkat dalam berita. *Pertama*, Konteks interpretasi masa lalu dari peristiwa yang sedang terjadi *kedua*, konteks interpretasi yang memberikan arti dan makna pada peristiwa yang sedang terjadi, *ketiga*, konteks interpretasi yang memuat prediksi ke depan dari suatu peristiwa.

Pertama, interpretasi konteks masa lalu secara umum adalah fakta-fakta dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi/sekarang, yang mana dalam penyampaian beritanya diberikan interpretasi berupa deskripsi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang memiliki keterkaitan untuk menjadi bahan pertimbangan atau penjelasan yang lebih konkrit dari peristiwa tersebut. *Kedua*, Interpretasi pada

konteks sekarang terhadap fakta yang diberitakan adalah fakta-fakta dari kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dan hangat dibicarakan, yang dalam penyampaian beritanya diberikan interpretasi singkat yang mengungkapkan makna dari peristiwa tersebut. *Ketiga*, interpretasi pada konteks prediksi ke depan dari peristiwa yang sedang terjadi adalah interpretasi yang memberikan keterangan prediksi ke depan atau menafsirkan kemungkinan-kemungkinan akibat atau efek jangka panjang dari peristiwa yang sedang terjadi.

4.2.1 Interpretasi Wartawan Yang Terdapat Dalam Berita Utama Surat Kabar Kompas Pada Bulan Mei 2009

Di bawah ini peneliti akan mendeskripsikan interpretasi wartawan terhadap fakta yang terdapat dalam berita utama harian *Kompas* bulan Mei 2009. Dari 29 berita utama yang dikumpulkan, ditemukan beberapa interpretasi wartawan terhadap fakta yang diberitakan. *Pertama*, interpretasi wartawan pada konteks masa lalu dari peristiwa yang sedang terjadi ditemukan sebanyak 6 (enam) interpretasi. *Kedua*, Interpretasi pada konteks saat ini/sekarang ditemukan sebanyak 9 (sembilan) interpretasi. *Ketiga*, interpretasi pada konteks prediksi ke depan atau bertali-tali, ditemukan sebanyak 2 (dua) interpretasi. Jadi, total interpretasi wartawan yang ditemukan pada berita utama harian *Kompas* adalah sebanyak 17 (tujuh belas) interpretasi. Di bawah merupakan uraian interpretasi wartawan terhadap fakta yang ditemukan dalam berita utama harian *Kompas* bulan Mei 2009.

A. Interpretasi Wartawan pada Konteks Masa Lalu*Kompas* Kamis, 7 Mei 2009

(Dalam berita utama *Kompas* 7 Mei 2009 terdapat interpretasi konteks masa lalu, konteks sekarang halaman 61, dan konteks prediksi ke depan halaman 66)

Judul: Hatta Temui Megawati, Giliran PDI-P Diperhitungkan

Info utama:

Peta koalisi partai politik kembali cair dengan adanya pendekatan antara kubu Yudhoyono dan kubu Megawati, tanda-tanda itu mulai terlihat dengan datangnya Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa ke kediaman Megawati Soekarnoputeri di Jalan Teuku Umar (6/5).

Konteks Masa Lalu
Tabel 4.4
Manuver PAN

Tanggal	Kegiatan
13 april 2009	Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Amien Rais di Wisma Negara. Amin Rais menyatakan dukungannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai capres.
15 April 2009	Soetrisno Bachir bertemu dengan Prabowo Subianto membicarakan kemungkinan koalisi.
19 April 2009	Dalam pertemuan dengan majelis penasihat partai dan 28 DPW PAN di kediamannya, Amien Rais mendorong PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat. Nama Hatta Rajasa mulai disebut sebagai cawapres dari PAN.
20 April 2009	Hatta Rajasa menyatakan, tidak terlintas di pikirannya soal dirinya diusulkan menjadi Cawapres.
21 April 2009	Soetrisno Bachir merasa, pertemuan di kediaman Amien Rais berada di luar mekanisme kepartaian.
22 April 2009	Rapat DPP PAN mempertegas mandat kepada Soetrisno Bachir untuk berkomunikasi politik dengan pihak mana pun.
1 Mei 2009	Amien Rais dan Soetrisno Bachir membuat lima kesepakatan. Salah satunya, rakernas dilakukan dua kali, yakni di Yogyakarta tanggal 2 Mei 2009 dan di Jakarta tanggal 9 Mei 2009, dihadiri oleh ketua umum dan ketua MPP.
2 Mei 2009	2 Mei 2009 Rakernas PAN di Yogyakarta menyepakati PAN

	akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusulkan Hatta Rajasa sebagai cawapres.
4 Mei 2009	Hatta Rajasa menyatakan ketidaksediaannya menjadi cawapres.

Makna yang terdapat dalam konteks masa lalu di atas adalah wartawan mencoba memberikan gambaran bahwa, peta koalisi antar partai politik masih memungkinkan untuk dilakukan. Kubu SBY berusaha mencairkan suasana yang selama ini kurang harmonis dengan mengirimkan Hatta Rajasa sebagai penghubung untuk mendekati kubu Megawati Soekarnoputri. Hal yang sama juga dilakukan Partai Amanat Nasional yang dengan giat mengadakan pertemuan kepartaian untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik lain untuk membicarakan kemungkinan berkoalisi dengan syarat cawapres berasal dari PAN.

***Kompas* Kamis, 14 Mei 2009**

(Dalam berita utama *Kompas* 14 Mei terdapat interpretasi konteks masa lalu dan konteks sekarang pada halaman 63)

Judul: PKS-PAN Ancam Tak Dukung, Partai Demokrat: Boediono Sudah Final

Info utama:

Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai calon wakil presiden menimbulkan resistensi keras dari sejumlah mitra koalisi Partai Demokrat yang juga "mengancam" akan menarik dukungan mereka.

Konteks Masa Lalu

Tabel 4.5

Manuver Parpol Jelang Pilpres

Tanggal	Manuver Parpol
23 April 2009	Jusuf Kalla ditetapkan Menjadi capres dari Partai Golkar dan diberi mandat untuk berkoalisi dengan parpol lain.

25 April 2009	Megawati Soekarnoputri, capres dari PDI-P, diberi mandat mencari cawapres.
26-27 April 2009	Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditetapkan menjadi capres dari Partai Demokrat dan diberi mandat memilih cawapres. PKS, PKB, PAN, dan PPP menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat.
1 Mei 2009	Jusuf Kalla-Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres dari Partai Golkar-Partai Hanura.
6-11 Mei 2009	Hatta Rajasa, Utusan SBY, mendatangi kediaman Megawati Soekarnoputri untuk menjalin komunikasi politik dengan PDI-P. Nama Boediono mulai disebut sebagai cawapres SBY.
12 Mei 2009	Hatta Rajasa memberikan penjelasan kepada PKB, PPP, dan PAN mengenai pemilihan Boediono sebagai cawapres di Wisma Negara, tetapi PKS tidak hadir. Jusuf Kalla-Wiranto menghadiri undangan PKS, PKB, PAN, dan PPP di sebuah hotel di Jakarta.
13 Mei 2009	Tim PDI-P dan Partai Gerindra mengadakan pertemuan di Hotel Mid Plaza Intercontinental Jakarta. Pertemuan belum menghasilkan Koalisi.

Makna yang terdapat dalam konteks masa lalu di atas menyatakan, bahwa sebelum pemilihan capres dan cawapres dimulai, partai-partai besar terus mengadakan pembicaraan-pembicaraan untuk berkoalisi dan menentukan siapa yang cocok untuk dicalonkan menjadi capres dan cawapres walaupun, kadang-kadang terjadi ketidakcocokan pandangan antara partai satu dengan partai lain. Seperti ketidaksepakatan mitra koalisi dengan keputusan sepihak yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memilih Boediono untuk mendampingi sebagai cawapres.

Kompas jumat, 15 Mei 2009

Judul: PDIP-Gerindra Masih Alot, Demokrat dan PDI-P Terus Buka Komunikasi

Info utama:

Sampai batas waktu yang dijanjikan, Kamis (14/5) pukul 24.00, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya belum mencapai kata sepakat untuk berkoalisi. PDI-P juga terus membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Suasana di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar hingga Kamis larut malam tetap dipenuhi wartawan yang menunggu "partai puncak", yaitu kepastian Koalisi PDI-P dengan Gerindra. Namun hal itu tak terjadi.

Konteks Masa Lalu

Tabel 4.6

Pertemuan PDI-P dengan Gerindra

Tanggal	Kegiatan
13 Januari	Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Prabowo Subianto.
18 Maret	Prabowo Subianto menemui Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, untuk bersilaturahmi politik.
11 April	Megawati bertemu dengan Prabowo untuk membicarakan persoalan pemilu legislatif.
14 April	Megawati-Prabowo bersama sejumlah tokoh politik menyatakan sikap, Pemilu Legislatif 2009 terburuk sepanjang sejarah.
21 April	Megawati dan Prabowo bertemu di Teuku Umar.
22 April	Megawati dan Prabowo bertemu dengan sejumlah purnawirawan TNI di Teuku Umar.
25 April	Prabowo dan Wiranto hadir dalam Rakernas V PDI-P di Lateng Agung.
26 April	Prabowo menemui Megawati di kediamannya.
13 Mei	Tim PDI-P dan Partai Gerindra Melanjutkan Pembahasan komunikasi politik.
14 Mei	Hingga pukul 24.00 WIB kesepakatan koalisi belum tercapai.

Makna yang terdapat dalam konteks masa lalu di atas menyatakan bahwa, setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, pihak PDI-P dan Partai Gerindra belum

menemukan kata sepakat untuk berkoalisi dikarenakan kedua tokoh masih berambisi untuk menjadi Presiden.

Kompas minggu, 24 Mei 2009

Judul: Mantan Presiden Korsel Bunuh Diri, Kekaguman Rakyat Dikotori Korupsi

Info utama:

Mantan Presiden Korea Selatan Roh Moon-hyun, yang tengah diperiksa atas dugaan skandal korupsi semasa berkuasa, diduga bunuh diri dengan meloncat dari ketinggian karang di pegunungan dekat desa tempat kediamannya.

Konteks Masa Lalu
Tabel 4.7
Perjalanan Hidup Roh Moo-hyun

Tanggal/Tahun	Peristiwa
6 Agustus 1946	Roh Moo-hyun lahir di Gimhae, Korea Selatan.
Maret 1975	Lulus ujian pengacara meski tak pernah mengikuti perguruan tinggi.
Mei 1978	Membuka praktik hukum, membela mahasiswa yang dituduh menghasut dibawah UU militer.
April 1988	Terpilih sebagai majelis nasional.
19 Desember 2002	Menang tipis pada pemilihan presiden Korea Selatan.
25 Februari 2003	Menjabat presiden untuk periode 5 tahun, menggantikan Kim Dae-Jung.
Oktober 2007	Roh menggelar KTT di Pyongyang dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong II, merupakan pertemuan kedua kali antar pemimpin Korea.
19 Desember 2007	Wali Kota Seoul Lee Myung-bak, CEO Hyundai yang menjadi politikus, menang dalam pemilihan presiden.
25 Februari 2008	Lee mengambil alih kantor kepresidenan menggantikan Roh. Roh kembali ke kota kelahirannya.
7 April 2009	Mantan ajudan Roh ditangkap atas dugaan menyerahkan pembayaran dari seorang pengusaha yang dituduh menyuap Roh dan anggota keluarganya. Istri Roh mengakui menerima dari pengusaha itu.
7 April 2009	Jaksa memeriksa Roh tentang dugaan menerima suap 6 juta dolar AS dari seorang pengusaha ketika masih menjabat presiden.

23 Mei 2009	Roh meninggal di Busan. Diduga bunuh diri dengan meloncat dari ketinggian karang.
-------------	---

Makna yang terdapat dalam konteks masa lalu di atas adalah sekilas kisah perjalanan hidup Roh Moo-Hyun dari awal karirnya sampai kematiannya yang diduga melakukan bunuh diri dengan meloncat dari ketinggian karang pegunungan di dekat kediamannya. Aksi ini dilakukan karena rasa bersalahnya kepada rakyat Korea Selatan akibat tindakan korupsi yang dilakukannya semasa menjabat presiden Korea Selatan.

***Kompas* rabu, 27 Mei 2009**

(Dalam berita utama *Kompas* 27 Mei 2009 terdapat interpretasi konteks masa lalu dan konteks sekarang pada halaman 64)

Judul: Koordinasi Pemerintah Semakin Lemah, Anggota Kabinet Mulai Terpolarisasi

Info utama:

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama berkompetisi untuk merebut kursi RI-1 pada Juli mendatang, koordinasi di antara keduanya semakin lemah. Hal itu juga tercermin dalam hubungan di antara anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sejak pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 Mei 2009, tidak ada lagi rapat bersama yang dipimpin Presiden dan Wapres di Kompleks Istana Kepresidenan. Pertemuan terakhir Presiden dan Wapres adalah saat rapat koordinasi kabinet dengan gubernur pada 1 Mei 2009. Yudhoyono yang telah menyatakan diri maju sebagai calon presiden bersama Boediono lebih kerap mengadakan rapat koordinasi dengan para pembantunya di kediamannya, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat. Sedang Kalla yang juga telah menyatakan diri maju sebagai capres bersama Wiranto memilih menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Istana Wapres.

Konteks Masa Lalu
Tabel 4.8
Sejumlah aktivitas Presiden dan Wakil Presiden

Presiden	tanggal	Wakil Presiden
Meresmikan gedung Grand Kawanua Convention Centre di Manado	13	Mengunjungi Pondok pesantren dan bersilaturahmi dengan ulama di Jawa Timur
Deklarasi sebagai capres di Bandung	15	Hari ulang tahun ke-67 dan mengunjungi Pasar Tanah Abang
Mendaftarkan diri sebagai capres ke KPU	16	Mendaftarkan diri sebagai capres ke KPU
Pemeriksaan kesehatan di RSP-AD, Jakarta	18	Dialog dengan Kadin
Menerima kunjungan kenegaraan amir negara Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifah al-Thani, di Istana Negara Medeka, Jakarta	19	Menemui Sultan HB X, deklarasi di Monumen Jogja Kembali, mengunjungi Pasar Bringharjo Yogyakarta, dan mengunjungi pondok pesantren di Krapyak, Bantul
Menyambut kedatangan 14 jenazah korban jatuhnya pesawat C-130 Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan kunjungan kerja ke Jawa Timur	21	Meninjau pasar Johar, Semarang
Meninjau Jembatan Suramadu, bertemu dengan sejumlah kiai dari Jatim di Surabaya, acara keluarga di Istana Tampaksiring	22	Mengunjungi PT. Pindad, Bandung
Mengunjungi Pasar Seni Tradisional Sukawati, Bali, dan menghadiri konferensi kelima perkumpulan Guang Dong sedunia di Kemayoran, Jakarta	24	Dialog Kebudayaan di Gedyng Kesenian Jakarta
Meninjau fasilitas perumahan dinas anggota Paspampres di Bogor dan menerima Jami'ah dan Ulama Persatuan Tabiyah Islamiyah di kediamannya	25	Menerima 10 mantan petinggi TNI di Jakarta
Menghadiri peringatan puncak Hari Pendidikan Nasional di	26	Melantik Tim Sukses Provinsi Sumatera Selatan

Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat		
---	--	--

Makna yang terdapat dalam konteks masa lalu di atas adalah sejak SBY dan Jusuf Kalla menyatakan bersaing dalam memperebutkan kursi Presiden dalam pemilu 2009, koordinasi keduanya dalam pemerintahan mulai berkurang dan cenderung bergerak sendiri-sendiri. Terlihat dari beberapa kegiatan dan kunjungan-kunjungan yang keduanya lakukan lebih bersifat mencari simpati. SBY juga lebih sering mengadakan rapat dengan pembantunya di kediamannya, sedangkan Jusuf Kalla memilih menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Istana.

Kompas Kamis, 28 Mei 2009

Judul: Panitia Angket Didorong, Demokrat Nilai F-PAN, F-PPP, F-PKB Tak elok

Info utama:

Selepas persetujuan DPR atas penggunaan hak angket mengenai pelanggaran hak konstitusional rakyat untuk memilih pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/5), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong agar panitia angket segera dibentuk.

Konteks Masa Lalu
Tabel 4.9
Hak Angket DPR 1999-2009

Tanggal	Kasus	Pengusul
25 Agustus 1999	Skandal Bank Bali	11 anggota DPR
21 Januari 2002	Dana nonbudgeter Bulog II	50 anggota DPR
3 Maret 2005	Kenaikan harga BBM	31 anggota, 6 fraksi menolak, 2 fraksi (F-PAN dan F-KB) tidak tegas
31 Mei 2005	Lelang gula impor ilegal	16 anggota, 6 fraksi menolak, 3 fraksi menerima, dan 1 fraksi tidak tegas menyatakan

		menerima/menolak
3 Juni 2005	Kredit macet Bank Mandiri	50 anggota
7 Juni 2005	Pejualan tanker milik Pertamina	Rapat Paripurna DPR secara aklamasi menerima usulan penggunaan hak angket
24 Januari 2006	Impor beras	108 anggota, dalam rapat paripurna 184 anggota menolak, 151 mendukung hak angket, 107 mendukung hak interpelasi
24 Juni 2008	Kebijakan pemerintah menaikkan BBM	117 anggota, Rapat paripurna DPR dihadiri 360 anggota DPR, sebanyak 233 anggota mendukung hak angket dan 127 menolak
17 Februari 2009	Penyelenggaraan ibadah haji	122 anggota, rapat paripurna DPR diusulkan 122 anggota DPR dan 8 fraksi
27 April 2009	Pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif	22 anggota, diusulkan 22 anggota 6 fraksi.

KETERANGAN:

Masa Pemerintahan: ■ BJ Habibie ■ Megawati Soekarnoputri ■ Susilo Bambang Yudhoyono

Makna yang terdapat dalam konteks masa lalu di atas adalah menerangkan bahwa anggota DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan diadakannya pengadaan hak angket jika, terjadi hal-hal yang menyimpang yang bersifat konstitusional dan merugikan rakyat.

B. Interpretasi Wartawan Pada Konteks Sekarang

***Kompas* senin, 4 mei 2009**

Judul: Politisi Belum Jadi Negarawan, Politik Nasional Teredukasi Jadi Perebutan Kekuasaan Saja

Info utama:

”Sekarang ini elit politik menunjukkan kepentingan tertinggi adalah pemilu dan pilpres. Seharunya politisi belajar menjadi negarawan”, ujar syafii. Politik yang bermartabat dan bermoral, papar syafii, bukanlah ajang rebutan dan permainan kekuasaan, tetapi selalu mengarah pada kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan golongan, yakni kepentingan bangsa.

Konteks sekarang:

Perpolitikan nasional yang dipertontonkan petinggi partai politik saat ini kian teredukasi menjadi sekedar perebutan kekuasaan. Perolehan suara dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden jadi kepentingan tertinggi. Visi dan kepentingan jangka pendek, serta sikap pragmatis untuk meraih kekuasaan, itu menandai politisi kita belum berjiwa negarawan. Sebaliknya, negarawan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Moralitas tinggi yang dipunyai politisi berjiwa negarawan akan membuat dirinya tetap terhormat, baik saat menang maupun kalah dalam pemilu legislatif atau pemilu presiden.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah memaparkan bahwa perpolitikan nasional saat ini hanya sekedar perebutan kekuasaan saja. Ini terlihat dari sikap yang dimunculkan dalam pemilu legislatif dan pilpres lebih sekedar untuk kepentingan pribadi dan golongannya dari pada kepentingan bangsa. Ini menunjukkan bahwa politisi-politisi Indonesia belum menjadi politisi yang berjiwa kenegarawan.

Kompas Kamis, 7 Mei 2009

Judul: Hatta Temui Megawati, Giliran PDI-P Yang Diperhitungkan

Info utama:

Peta koalisi partai politik kembali cair dengan adanya pendekatan antara kubu Yudhoyono dan kubu Megawati, tanda-tanda itu mulai terlihat dengan datangnya Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa ke kediaman Megawati Soekarnoputeri di Jalan Teuku Umar (6/5).

Konteks sekarang: (terdapat pada paragraf ke-11)

Versi lain dari informasi yang beredar adalah Hatta datang untuk menyampaikan salam dari SBY sekaligus *kulonuwun* seandainya Gubernur Bank Indonesia Boediono jadi ditetapkan sebagai calon wapres. Bagaimana pun Boediono adalah menteri yang "ditemukan" oleh Megawati.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah mengungkapkan bahwa Boediono adalah menteri yang "ditemukan" dalam arti diangkat menjadi menteri pada saat Megawati menjabat sebagai presiden pada tahun 2003. Beredar kabar bahwa SBY mengutus Hatta untuk *Kulonuwun* (permisi) jika Boediono jadi dicalonkan menjadi pendamping SBY.

Kompas Jumat, 8 Mei 2009

Judul: Pemberantasan Korupsi Terancam, Anggota DPR Minta KPK Tak Lakukan

Apa-apa

Info utama:

Antasari adalah ketua KPK. Ia diberhentikan sementara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (7/5), karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Tangerang, Banten, 14 Maret.

Konteks sekarang:

Pemberantasan korupsi menghadapi ancaman. Ini terlihat setelah sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keabsahan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Anthari Azhar diberhentikan sementara oleh Polisi.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah setelah ketua KPK ditangkap menyangkut keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, anggota Komisi III DPR mulai mempertanyakan keabsahan keputusan KPK. KPK mulai terancam oleh DPR, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak anggota DPR yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Bisa saja ini merupakan kesempatan anggota DPR untuk menyerang balik KPK.

Kompas senin, 11 Mei 2009

Judul: Demokrat-PDIP Terbuka Lebar, Nasib Koalisi Besar Dipertanyakan

Info utama:

“Pembicaraan terus dilakukan. Kami saling menghormati. Saya menghormati ibu Megawati Soekarnoputri dan teman-teman di PDI-P juga menghormati langkah kami. Saya merasakan komunikasi berjalan dan ada jalan yang menurut saya cukup terbuka untuk kemungkinan bisa bersama-sama dalam upaya melanjutkan pembangunan bangsa,” ujar Yudhoyono dalam sambutan di pedapa Puri Cikeas Indah, Gunung Puri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/5).

Konteks sekarang:

Koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin terbuka lebar, menyusul pernyataan Susilo Bambang Yudoyono bahwa ada kehendak kedua partai untuk melakukan rekonsiliasi melalui komunikasi politik.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah menerangkan bahwa setelah adanya pernyataan SBY bahwa kedua partai mempunyai kehendak untuk melakukan komunikasi politik, ada kemungkinan Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan koalisi.

Kompas Selasa, 12 Mei 2009

Judul: Posisi PDI-P Dilematis, Partai Keadilan Sejahtera minta PDI-P "Kulonuwun"

Info utama:

Koalisi dengan Partai Demokrat akan menyentuh persoalan krusial di tubuh PDI-P, yaitu mandat partai kepada Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden. Reaksi ke arah penolakan, misalnya, mulai muncul dari wilayah Bali yang merupakan basis PDI-P.

Konteks sekarang:

Meski telah "dilamar" Partai Demokrat dan komunikasi keduanya semakin baik, posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap dilematis. PDI-P harus mengklarifikasi sejumlah isu yang selama ini melekat dengan citranya sebagai partai yang konsisten.

Makna yang ingin diungkapkan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah mengungkapkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam posisi dilematis, akan menerima pinangan Partai Demokrat atau tetap menjadi partai yang konsisten (oposisi). Di sisi lain banyak reaksi dari simpatisan PDI-P yang menolak untuk berkoalisi karena mandat partai kepada Megawati Soekarnoputri tetap untuk menjadi Presiden.

Kompas Kamis, 14 Mei 2009

Judul: PKS-PAN Ancam Tak Dukung, Partai Demokrat : Boediono Sudah Final

Info utama:

Wakil Sekertaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (13/5), mengatakan, Putusan Yudhoyono memilih Boediono merupakan langkah yang keliru. Bukan hanya itu, Yudhoyono juga dinilai telah mengabaikan janji untuk memperbaiki komunikasi politik dengan mitra koalisinya, sebagaimana pernah disampaikan dalam pertemuan menjelang pemilu legislatif, 9 April Lalu.

Konteks sekarang:

Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai calon menimbulkan resistensi keras dari sejumlah mitra koalisi Partai Demokrat yang 'mengancam' akan menarik dukungan mereka.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah keputusan sepihak yang diambil SBY dengan menunjuk Boediono sebagai calon pendamping dalam pilpres, membuat mitra koalisi Partai Demokrat mengancam akan menarik dukungannya.

Kompas sabtu, 16 Mei 2009

Judul: Mega-Prabowa Siap Tarung, Kedua Partai Kedepankan Ekonomi Kerakyatan

Info utama:

Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto siap bertarung dalam Pemilu Presiden 2009 menghadapi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Konteks sekarang:

Setelah melewati tarik ulur yang diwarnai dengan perdebatan alot, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra sepakat untuk berkoalisi.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah mengungkapkan bahwa, setelah melalui proses koalisi yang berjalan dengan alot dan salah satu dari kedua belah pihak mengalah akhirnya Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto dipastikan siap bertarung dalam pemilu 2009.

Kompas rabu, 27 Mei 2009

Judul: Koordinasi Pemerintah Semakin Lemah, Anggota Kabinet Mulai Terpolarisas

Info utama:

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama berkompetisi untuk merebut kursi RI-1 pada Juli mendatang,

koordinasi keduanya semakin lemah. Hal itu juga tercermin dalam hubungan di antara anggota kabinet.

Konteks sekarang:

Selain soal rapat dan kerja mengelola negara yang terkesan tanpa koordinasi, Yudhoyono dan Kalla juga seperti berlomba membuat aksi untuk kepentingan pemilu Presiden 2009. Saling menyindir terjadi sejak komitmen untuk berkompetisi dinyatakan. Tagline Kalla, “lebih cepat lebih baik”, dibalas Yudhoyono dengan “jangan takabur”.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah akibat keduanya berkompetisi untuk memperebutkan RI-1 membuat hubungan SBY dan JK menjadi kurang harmonis. Sebagai pemimpin negara, keduanya terkesan tanpa berkoordinasi dalam mengelola negara. Kedua capres saling berlomba-lomba membuat aksi-aksi untuk mempengaruhi rakyat untuk kepentingan pemilu dengan cara saling menyindir.

Kompas minggu, 31 Mei 2009

Judul: Mega-SBY Jabat tangan, Megawati Nomor 1, SBY Nomor 2, Kalla Nomor 3

Info utama:

Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mendapat nomor urut 1, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono nomor urut 2, dan Jusuf Kalla-Wiranto nomor urut 3.

Konteks sekarang:

Acara pengundian nomor urut capres berlangsung meriah. Apalagi dengan diwarnai pertemuan Yudhoyono dan Megawati yang selalu ditunggu banyak orang. Bagi keduanya, pertemuan di muka umum di KPU ini pertama kalinya sejak pemilu 2004. Yudhoyono dan Megawati sempat bersalaman dua kali, yakni sebelum dan sesudah pengundian. Terlihat suasana berbeda saat Megawati bertemu Yudhoyono dan saat Megawati Bertemu Kalla. Saat Megawati dan Yudhoyono berjumpa, mereka hanya bersalaman dan tidak saling bertegur sapa. Sebaliknya, pertemuan Megawati dengan pasangan capres-cawapres Kalla dan Wiranto serta Boediono terlihat hangat. Megawati dan Kalla malah saling cium pipi kiri dan kanan, selain berjabat tangan bertegur sapa. Begitu juga Megawati dan Wiranto. Sedangkan dengan

Boediono, Mega hanya bersalaman dan sempat berbincang sejenak. Adapun Prabowo Subianto sebelum bersalaman dan berpelukan dengan Wiranto dan Yudhoyono menyempatkan memberikan sikap hormat militer kepada keduanya.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah sangat jelas terlihat bahwa, ketidak harmonisan hubungan antara SBY dan Megawati Soekarnoputri sejak pemilu 2004 masih terlihat. Terbukti keduanya masih canggung saat bertemu dalam pengundian nomor urut Capres 2009, bertolak belakang dengan sikap yang dimunculkan keduanya saat bertemu dengan pasangan capres dan cawapres lain.

C. Interpretasi Wartawan Pada Konteks Prediksi Kedepan Suatu Peristiwa

***Kompas* Kamis, 7 Mei 2009**

Judul: Hatta Temui Megawati, Giliran PDI-P Yang Diperhitungkan

Info utama:

Peta koalisi partai politik kembali cair dengan adanya pendekatan antara kubu Yudhoyono dan kubu Megawati, tanda-tanda itu mulai terlihat dengan datangnya Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar (6/5).

Konteks prediksi ke depan:

Dari informasi yang dihimpun *Kompas*, sejumlah pihak di Partai Amanat Nasional saat ini sedang mempersiapkan "jalan keluar" seandainya Hatta Rajasa yang diputuskan dalam Rakernas PAN di Yogyakarta sebagai calon wapres ditolak Yudhoyono.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks prediksi ke depan atas adalah keharmonisan kubu Yudhoyono dengan kubu Megawati tak diikuti oleh Partai Amanat Nasional yang sedang mempersiapkan opsi lain (keluar dari koalisi

atau mencari tokoh lain) bila Hatta Rajasa yang diusulkan PAN sebagai Wapres ditolak Yudhoyono.

Kompas *senin, 25 Mei 2009*

Judul: 2009, 76 Anggota TNI Tewas, Kecelakaan Kian Sering, Perlu Kebijakan Drastis

Info utama:

Kecelakaan yang terjadi dan menimpa berbagai jenis peralatan utama sistem persenjataan milik Tentara Nasional Indonesia kian sering terjadi. Bahkan, sepanjang tahun 2009 saja, data dari *Kompas*, tercatat sudah 76 anggota TNI tewas dalam kecelakaan terkait persenjataan TNI. Tak hanya dari awak peralatan utama sistem persenjataan (alutista) dan prajurit TNI, korban jiwa juga berjatuh dari kalangan sipil, baik penumpang maupun warga yang ikut terkena dampak kecelakaan, seperti terjadi saat pesawat TNI AU jenis Hercules C-130/A-1325 jatuh di Magetan, Jawa Timur, pekan lalu.

Konteks prediksi ke depan:

Kondisi semacam ini dikhawatirkan bukan tidak mungkin semakin menjatuhkan moral prajurit TNI, dan ditakutkan makin mengikis kebanggaan prajurit sebagai TNI, termasuk keinginan generasi muda berkarier di bidang kemiliteran. Belum lagi kerugian akibat hilangnya alutista dan sejumlah prajurit yang cacat.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks prediksi ke depan di atas adalah seringnya kecelakaan pesawat militer yang menewaskan prajurit Indonesia terutama angkatan udara, dikhawatirkan akan menjatuhkan moral prajurit dan mengikis kebanggaan sebagai prajurit TNI termasuk yang ingin berkarir sebagai prajurit TNI.

4.2.2 Interpretasi Wartawan Yang Terdapat Dalam Berita Utama Harian *Kedaulatan Rakyat* Bulan Mei 2009.

Di bawah ini peneliti akan mendeskripsikan interpretasi wartawan terhadap fakta yang terdapat dalam berita utama harian pagi *Kedaulatan Rakyat* pada bulan Mei 2009. Dari 29 berita utama harian *Kedaulatan Rakyat* bulan Mei 2009, ditemukan interpretasi wartawan dalam konteks masa lalu dan konteks peristiwa yang sedang terjadi, sedangkan interpretasi wartawan dalam konteks prediksi ke depan dari peristiwa yang sedang terjadi tidak ditemukan. Jumlah interpretasi wartawan yang ditemukan dalam berita utama sebanyak 10 (sepuluh) buah. Konteks masa lalu ditemukan 1 (satu) intepretasi dan konteks sekarang ditemukan 9 (sembilan). Di bawah ini akan diuraikan interpretasi wartawan yang terdapat dalam berita utama harian *Kedaulatan Rakyat* pada bulan Mei 2009.

A. Interpretasi Wartawan Pada Konteks Masa Lalu

***Kedaulatan Rakyat* senin, 4 Mei 2009**

Judul: Lagi, Dibongkar Pabrik Sabu, 30 Kg Senilai Rp 60 Miliar Siap Edar

Info utama:

Jepara (KR) - Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polda Metro Jaya, Minggu (3/5) menggerebek sebuah rumah mewah di Jepara yang digunakan sebagai pabrik tempat memproduksi sabu-sabu. Dari TKP di Jalan Cik Lanang RT 04/RW 05 Kelurahan Kauman Kecamatan Kota, polisi berhasil mengamankan 30 kilogaram sabu siap edar senilai 60 miliar. Barang bukti lain yang disita yaitu selang, tabung bejana dan bahan pembuat sabu.

Konteks Masa Lalu
4.10
Sejumlah Kasus Narkoba yang Terbongkar

Tanggal	Barang Bukti
Mei 2009	- 30 Kg sabu-sabu, pabrik di Kauman, Jepara, Jateng. - 22.601 butir ekstasi Rp 3 M, di Bandara SUTA Jakarta.
April 2009	425 butir ekstasi, di Kalimantan Barat.
Maret 2009	15.760 butir ekstasi, 1.250 butir pil happy five Rp 2 M di Jalan Daan Mogot Jakarta.
Februari 2009	- 250 butir pil ekstasi, cairan bahan ekstasi, di Desa Karya Mekar Bogor. - 1.500 dan 13.000 butir ekstasi, 12 ribu gram bubuk di Denpasar Bali. - Pabrik ekstasi dan peralatannya di Medan.
Januari 2009	17 Kg sabu Rp 17 M, 31.000 ekstasi Rp 5,7 M, dan 3 Kg ketamine di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Makna yang ingin disampaikan dalam konteks masa lalu di atas adalah terungkapnya sebuah rumah mewah yang dijadikan pabrik sabu-sabu di Jepara, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu lahan empuk bagi peredaran narkoba termasuk jaringan Internasional. Ini terbukti dengan dibongkarnya pabrik-pabrik narkoba yang beromset miliaran rupiah yang didalangi warga negara asing.

B. Interpretasi Wartawan pada konteks sekarang

***Kedaulatan Rakyat* rabu, 6 Mei 2009**

Judul: Motif Pembunuhan Nasrudin Masih Misteri, Rani dan Sopir, Saksi Kunci

Info utama:

Banyak pihak yang meragukan peristiwa pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen hanya dilatarbelakangi soal cinta segitiga. Pihak polisi pun kini terus mengorek keterangan para tersangka dan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk mengungkap motif sebenarnya kasus tersebut.

Konteks sekarang:

Rani selama ini disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya penembakan Nasrudin. Persoalan asmara segitiga, sementara ini dianggap sebagai pangkal peristiwa. Penyidik pada awal kasus penembakan Nasrudin, sempat memeriksa Rani dan memperoleh keterangan yang mengarah pada keterlibatan Antasari. Karena tidak ada bukti langsung, penyelidikan dilakukan dengan mengejar para pelaku di lapangan. Tapi keberadaan Rani masih misterius. Berbagai kabar menyebutkan Rani berada di Serang, di rumah orangtuanya. Sedang yang lainnya menyebutkan dia berada di apartemen di Jakarta, di tempat persembunyian Polisi.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah Polisi dan publik belum yakin bila peristiwa penembakan yang melibatkan ketua KPK hanya sebatas persoalan cinta segitiga. Keberadaan Rani yang merupakan saksi kunci kasus penembakan tersebut yang melibatkan ketua KPK Antashari Azhar masih dirahasiakan sehingga, publik belum mengetahui di mana saat ini Rani berada.

Kedaulatan Rakyat jumat, 8 Mei 2009

Judul: Deklarasi 'JK-WIR' Dilaksanakan di Yogya, Mega-Prabowo, Alot

Info utama:

Komunikasi politik yang dilakukan antara Puan Maharani-Prabowo Subianto, Rabu (6/5) berakhir *deadlock*. "ya gimana? Semuanya mau jadi capres", kata anggota dewan pembina DPP PDI-P, Sabam Sirait kepada wartawan yang mencegatnya di kediaman Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (7/5).

Konteks sekarang:

Koalisi bersama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra, terancam batal. Meski sepakat berkoalisi, namun keduanya belum juga menemukan kata sepakat siapa yang menjadi presiden

dan calon wakil presiden. PDIP tetap mengajukan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden (capres) sementara Gerindra menolak jika Prabowo Subianto dijadikan calon wakil presiden (cawapres).

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah masih berambisinya Megawati Soekarnoputri (PDI-P) dan Prabowo Subianto (Gerindra) untuk mencalonkan diri sebagai capres mengakibatkan, belum adanya kesepakatan keduanya untuk berkoalisi.

***Kedaulatan Rakyat* selasa, 12 Mei 2009**

Judul: Jalin Komunikasi, SBY dengan Mega Merapat, Kian Kuat, Boediono Cawapres

Info utama:

Sementara guna memperkuat basis dukungan koalisi, kubu Partai Demokrat dengan PDI-P melakukan komunikasi yang lebih intensif, meski dilakukan melalui utusan. Untuk memuluskan langkah ini Susilo Bambang Yudhoyono sengaja mengutus Mensesneg Hatta Radjasa ke kubu Megawati. Bahkan pertemuan terakhir, Senin (11/5) untuk kedua kalinya mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan komunikasi seperti yang selama ini telah terjalin.

Konteks sekarang:

Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi figur kuat untuk menduduki posisi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mantan Menko Perekonomian yang dekat dengan Megawati Soekarnoputri menjadi faktor penengah bahkan di tengah kesulitan memiliki Cawapres dari partai koalisi. Menurut Informasi yang beredar kuat saat ini, keberadaan Boediono selain dibutuhkan kemampuannya untuk mendampingi SBY, juga mampu menjadi penengah dari kekuatan politik besar yang ada.

Makna yang ingin disampaikan dalam konteks sekarang di atas adalah pendekatan-pendekatan telah dilakukan Partai Demokrat untuk menjalin koalisi dengan PDIP. Salah satu cara yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono adalah dengan menjadikan Boediono sebagai pendampingnya yang diharapkan dapat

menjadi penengah dari kekuatan politik besar, karena mantan Menko Perekonomian dikenal dekat dengan Megawati Soekarnoputri.

Kedaulatan Rakyat jumat, 15 Mei 2009

Judul: Tersendat, Duet Mega-Prabowo, PKS Tetep Ancam Tarik dari Koalisi PD

Info utama:

Seperti diketahui hingga saat ini, Megawati dan Prabowo masih tarik ulur dalam memastikan maju bersama atau tidak di Pemilu Presiden 2009. baik Megawati maupun Prabowo masih bersikeras ingin menjadi presiden. Semetara batas waktu pengajuan capres/cawapres pada sabtu (16/5) besok.

Konteks sekarang:

Rencana deklarasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto kembali tersendat. Negoisasi kedua kubu, antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra masih alot. Peluncuran Duet Mega-Bowo yang sedianya digelar Kamis (14/5) sore kemarin terus mengalami penundaan. Sampai berita ini diturunkan, peluncuran duet tersebut belum bisa dilaksanakan. Seharusnya peluncuran ditunda hingga pergantian malam, ternyata juga kembali mundur.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah akibat belum ada yang mau mengalah dan bersedia untuk menjadi cawapres, membuat negosiasi antara PDIP dan Partai Gerindra masih alot sehingga, peluncuran duet tersebut kembali tertunda pada hal, batas waktu pengajuan capres/cawapres sudah hampir habis.

Kedaulatan Rakyat rabu, 20 Mei 2009

Judul: Penggembosan Bayangi Koalisi Parpol, Semua Pasangan Capres-Cawapres

Lolos Tes Kesehatan

Info utama:

Dalam koalisi di Partai Demokrat (PD) muncul isu adanya pengurus parpol peserta yang pindah dukungan. Sedang di lingkungan Partai Golkar merebak

adanya manuver untuk melengserkan Jusuf Kalla dari jabatan ketua umum partai bergambar pohon beringin.

Konteks sekarang:

Aksi penggemboan yang dilakukan beberapa orang kader membayangi koalisi parpol dalam pemilihan presiden (pilpres).

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah terdapat isu terjadinya perpecahan dalam tubuh pengurus parpol dalam koalisi Partai Demokrat (PD). Isu-isu yang muncul tersebut menerangkan bahwa ada beberapa pengurus parpol peserta yang ingin pindah dukungan, Sedangkan di lingkungan Partai Golkar adanya kabar 'orang dalam' ingin melengserkan Jusuf Kalla sebagai ketua umum.

Kedaulatan Rakyat jumat, 22 Mei 2009

Judul: Sebagian Korban Hercules Belum Teridentifikasi, 109 Tewas, 5 Dari Yogya

Info utama:

Sedikitnya 109 orang tewas dalam musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Desa Geplak Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Rabu (20/5). Sementara 15 korban lainnya berhasil selamat meski dalam kondisi dan luka-luka”.

Konteks sekarang: Bangsa Indonesia kembali berduka.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah menerangkan bahwa, untuk kesekian kalinya bangsa Indonesia berduka atas wafatnya para prajurit TNI akibat kecelakaan pesawat terbang militer. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi disebabkan usia pesawat yang sudah tua dan dinilai tidak layak terbang.

Kedaulatan Rakyat selasa, 26 Mei 2009

Judul: JK Dibayangi Munaslub, 'Sindiran' Capres Mulai Memanas

Info utama:

Rizal Malarangeng jubir tim sukses SBY-Boediono senin (25/5) siang membalas tudingan mantan menko perekonomian kwik Kian Gie yang menuduh Boediono neoliberal. Kwik dianggap tidak jujur kepada dirinya sendiri.

Konteks sekarang:

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), namun aroma persaingan tiga pasangan calon sudah kian tinggi. Saling serang hampir setiap hari terjadi. Topik serang yang mengemuka selain mengangkat soal kontroversional neoliberal, juga soal pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Tidak hanya itu, saling klaim sebagai pihak paling dekat dengan rakyat kecil seolah jadi isu wajib tiap kontestan pilpres. Tapi tidak semua telah terbukti benar-benar dekat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah persaingan antara capres dan cawapres semakin sering terjadi. Saling sindir, saling menjatuhkan, dan saling klaim sebagai pihak paling dekat dengan rakyat menjadi isu wajib, tetapi tidak semua yang benar-benar dekat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedaulatan Rakyat rabu, 27 Mei 2009

Judul: Koalisi Partai Demokrat Digembosi, DPR Setuju Hak Angket DPT

Info utama:

Setelah melalui perundingan yang alot, DPR RI akhirnya menyetujui hak angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009 melalui voting dalam Rapat Paripurna, selasa (26/5). Pendukung hak angket memenangi proses ini dengan 129 suara dari total jumlah anggota DPR yang hadir sebanyak 203 orang. Sedangkan, pihak yang menolak berjumlah 73 suara dan abstain 1 orang. Partai yang setuju hak angket terdiri dari Partai Golkar, PDIP, PPP, dan PAN. Sedangkan yang menolak adalah Partai Demokrat, PKS, dan

PDS. Sedangkan PKB terbelah menjadi 3 kelompok, 16 orang setuju, satu menolak dan satu abstain.

Konteks sekarang:

Hasil ini seakan menggambarkan belum kuatnya koalisi yang dibangun Partai Demokrat menjelang Pilpres. Bahkan kesepakatan dengan Partai Golkar untuk tetap menjaga koalisi hingga akhir pemerintahan, mulai dipertanyakan.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah voting yang dilakukan DPR RI menunjukkan belum kuatnya koalisi yang dibangun Partai Demokrat. Bahkan kesepakatan dengan Partai Golkar terancam berakhir.

Kedaulatan Rakyat jumat, 29 Mei 2009

Judul: Ambalat Memanas, TNI Kirim Pesawat Intai, Kapal Perang Malaysia Diusir

Info utama:

Kapal-kapal perang TNI AL terpaksa mengusir kapal perang Malaysia yang mendekati Ambalat. TNI AU juga mengirim satu pesawat intai maritim Boeing 737 untuk mendeteksi helikopter dan pesawat Malaysia yang masuk wilayah NKRI hingga sejauh 40 mil laut”.

Konteks sekarang:

Kawasan perairan Ambalat di perbatasan RI-Malaysia kembali memanas.

Makna yang ingin disampaikan dalam interpretasi konteks sekarang di atas adalah ketegangan antara RI-Malaysia semakin memanas dikarenakan kapal perang Malaysia memasuki perairan Ambalat yang merupakan wilayah teritorial Indonesia sehingga TNI AU mengirim pesawat intai untuk mendeteksi setiap pelanggaran dari pihak Malaysia.

4.2.3 Implementasi Jurnalisme Makna Sebagai Pembelajaran di SMA

Menurut Mulyasa (2008: 2) Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah. Dengan demikian implementasi KTSP di setiap sekolah dan satuan pendidikan akan memiliki warna yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan kebutuhan wilayah dan daerah masing-masing, sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah dan satuan pendidikan; serta sesuai pula dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan peserta didik. Berikut ini adalah implementasi jurnalisme makna dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di SMA kelas XI semester II.

Tabel 4.11

SILABUS

Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : XI / 2
Standar Kompetensi : Memahami ragam wacana tulis dengan membaca cepat dan membaca intensif
Alokasi waktu : 2 x 40 menit

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi waktu	Penilaian			Sumber Belajar
					jenis	bentuk	contoh	
11.2 Menemukan ciri-ciri jurnalisme makna atau interpretasi wartawan pada konteks masa lalu, sekarang, dan prediksi ke depan dalam berita utama pada surat kabar.	- Menemukan interpretasi wartawan dalam berita utama - Membedakan interpretasi pada konteks masa lalu, sekarang, dan prediksi ke-depan - Mengungkap-kan makna yang terkandung dalam interpretasi tersebut	Menemukan ciri-ciri jurnalisme makna dalam berita utama pada surat kabar yaitu - Interpretasi konteks masa lalu - Interpretasi konteks sekarang - Interpretasi konteks prediksi kedepan dari peristiwa yang sedang terjadi	- Membaca berita utama dari surat kabar - Mediskusi-kan temuan iterpretasi wartawan dalam berita utama	2 x 40'	Tugas kelompok Tugas individu	Uraian bebas	- Apakah yang dimaksud jurnalisme makna? - Cari dan tuliskan interpretasi pada konteks masa lalu, sekarang, dan prediksi ke-depan yang terdapat dalam berita utama! - Ungkapkan makna dari interpretasi tersebut.	Media cetak / elektronik

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas / Semester : XI / 2

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

A. Standar Kompetensi

- Memahami ragam wacana tulis dengan membaca cepat dan membaca intensif.

B. Kompetensi Dasar

- Menemukan ciri-ciri jurnanisme makna atau interpretasi wartawan pada konteks masa lalu, sekarang, dan prediksi ke depan dalam berita utama pada surat kabar.

C. Indikator

- a. Siswa dapat menemukan ciri-ciri jurnanisme makna atau interpretasi wartawan terhadap fakta yang diberitakan dalam berita utama.
- b. Siswa dapat membedakan interpretasi pada konteks masa lalu, konteks sekarang, dan konteks prediksi ke depan dari peristiwa yang sedang terjadi.
- c. Siswa dapat mengungkapkan makna yang terkandung dalam interpretasi tersebut.

I. Materi Pembelajaran

- Membaca berita utama dari surat kabar yang telah ditentukan oleh guru
- Ciri-ciri jurnanisme makna

1. Jurnalisme makna adalah jurnalisme yang bukan sekedar menyajikan fakta menurut kejadiannya, bukan fakta secara linear, melainkan fakta yang mencakup, dan dalam penyajiannya berita bukan sekedar informasi tentang fakta, melainkan berita yang sekaligus menyajikan interpretasi akan arti dan makna dari peristiwa (Jacob Oetomo, 2003).
2. Interpretasi pada konteks masa lalu secara umum adalah fakta-fakta dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan hangat, yang mana dalam penyampaian beritanya, diberikan interpretasi berupa deskripsi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang memiliki keterkaitan untuk dijadikan bahan pertimbangan atau penjelasan yang lebih konkrit dari peristiwa tersebut.
3. Interpretasi pada konteks sekarang terhadap fakta yang diberitakan adalah fakta-fakta dari kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dan hangat dibicarakan, yang dalam penyampaian beritanya diberikan interpretasi singkat yang mengungkapkan makna dari peristiwa tersebut.
4. Interpretasi pada konteks prediksi ke depan dari peristiwa yang sedang terjadi adalah interpretasi yang memberikan keterangan prediksi ke depan atau menafsirkan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi akibat atau efek jangka panjang dari peristiwa yang sedang terjadi.

Contoh interpretasi wartawan yang terdapat dalam berita utama sebagai berikut:

Contoh konteks masa lalu yang terdapat dalam berita utama harian *Kompas* jumat, 15 Mei 2009 yang berjudul "PDIP-Gerindra Masih Alot, Demokrat dan PDI-P Terus Buka Komunikasi"

Info utama :

Sampai batas waktu yang dijanjikan, Kamis (14/5) pukul 24.00, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya belum mencapai kata sepakat untuk berkoalisi. PDI-P juga terus membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Suasana di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar hingga Kamis larut malam tetap dipenuhi wartawan yang menunggu "partai puncak", yaitu kepastian Koalisi PDI-P dengan Gerindra. Namun hal itu tak terjadi.

Tabel 1
Pertemuan PDI-P dengan Gerindra

Tanggal	Kegiatan
13 Januari	Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Prabowo Subianto.
18 Maret	Prabowo Subianto menemui Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, untuk bersilaturahmi politik.
11 April	Megawati bertemu dengan Prabowo untuk membicarakan persoalan pemilu legislatif.
14 April	Megawati-Prabowo bersama sejumlah tokoh politik menyatakan sikap, Pemilu Legislatif 2009 terburuk sepanjang sejarah.
21 April	Megawati dan Prabowo bertemu di Teuku Umar.
22 April	Megawati dan Prabowo bertemu dengan sejumlah purnawiaawan TNI di Teuku Umar.
25 April	Prabowo dan Wiranto hadir dalam Rakernas V PDI-P di Lateng Agung.
26 April	Prabowo menemui Megawati di kediamannya.
13 Mei	Tim PDI-P dan Partai Gerindra Melanjutkan Pembahasan komunikasi politik.
14 Mei	Hingga pukul 24.00 WIB kesepakatan koalisi belum tercapai.

Makna yang terdapat dalam konteks masa lalu di atas adalah belum adanya kesepakatan antara PDI-P dan Partai Gerindra untuk berkoalisi dikarenakan kedua tokoh masih berambisi untuk menjadi Presiden.

Contoh interpretasi wartawan yang memberikan arti dan makna pada konteks sekarang dari peristiwa yang sedang terjadi. Dalam *Kompas* Rabu, 20 Januari 2009 yang berjudul “Sejarah Baru Amerika”:

“Amerika menapaki sejarah baru setelah Barak Obama diambil sumpahnya sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat, Selasa (20/1) pukul 12.00 waktu setempat atau Rabu tengah malam WIB. Pelantikan ini merupakan lompatan besar bagi AS karena untuk pertama kalinya seorang keturunan kulit hitam menjadi presiden”.

Makna yang terdapat dari interpretasi konteks sekarang di atas adalah sejarah baru terjadi di Amerika Serikat karena untuk pertama kalinya seorang keturunan kulit hitam berhasil menjadi presiden di negaran adikuasa tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dahulu warga keturunan kulit hitam di Amerika dianggap masyarakat kelas dua setelah warga keturunan kulit putih.

Contoh interpretasi wartawan pada konteks bertali-tali atau yang disebut memuat makna prediksi kedepan suatu peristiwa. dalam *Kompas* senin, 19 Januari 2009 yang berjudul “Tangki Pertamina Terbakar Masyarakat Diminta Tidak Panik, BBM Dipasok dari Depot Terbakar”:

“Kebakaran yang diawali dengan tiga kali ledakan keras menimbulkan getaran kuat ini dikhawatirkan menghambat distribusi bahan bakar, mengingat depot plumpang memasok 40 persen kebutuhan bahan bakar di Jabodetabek dan 20 persen bahan bakar di Jawa”.

Makna yang terdapat dalam interpretasi konteks prediksi ke depan di atas adalah depot plumpang merupakan depot yang memasok 40 persen kebutuhan BBM di

Jabodetabek. Akibat dari kebakaran itu di khawatirkan akan berdampak pada pendistribusian pasokan BBM akan terhambat.

II. Metode Pembelajaran

- Tanya jawab
- Diskusi
- Penugasan
- Pelatihan
- Penjelasan

III. Langkah-langkah pembelajaran

1. Kegiatan awal

Kegiatan pendahuluan diawali dengan:

- a. Guru memberikan salam dan mengabsensi siswa.
- b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan yang akan dicapai dalam pelajaran memahami ragam bahasa tulis.
- c. Guru memberikan penjelasan apa itu jurnalisme makna beserta ciri-cirinya.
- d. Guru memberikan penjelasan tentang interpretasi wartawan pada konteks masa lalu, sekarang, dan prediksi ke depan dari peristiwa yang sedang terjadi dalam berita utama pada surat kabar beserta contoh-contohnya.

2. Kegiatan inti

- a. Siswa mampu membaca dan memahami isi berita utama dari surat kabar yang ditentukan guru dengan baik.
- b. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diberi tugas untuk mencari dan menemukan interpretasi wartawan dalam berita utama.

- c. Dari hasil temuan mereka, siswa mampu membedakan interpretasi pada konteks masa lalu, sekarang, dan prediksi ke depan.
- d. Dari hasil temuan itu, siswa mampu mengungkapkan makna yang terkandung dalam interpretasi wartawan pada berita utama.
- e. Setelah waktu yang ditentukan habis, setiap kelompok bertanggung jawabkan hasil temuannya kedepan kelas agar siswa yang lain dapat mengetahui dan menanggapi hasil temuan temannya.

3. Kegiatan akhir

- a. Guru memberikan kesimpulan dari materi dan penugasan yang diberikan.
- b. Guru memberikan tanggapan dan penilaian terhadap kemampuan membaca intensif siswa dan sejauh mana keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran ini.

IV. Alat / sumber Bahan

1. Beberapa buah berita utama dari surat kabar yang sudah dikumpulkan dalam bentuk kliping.
2. Oetomo, Jacob. 2003. *Antara Jurnalisme Makna Dan Jurnalisme Makna*: Yogyakarta.
3. Oetomo, Jacob. 2001. *Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
4. Sumardiria, Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature (Panduan Praktis Jurnalistik)*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
5. Edisantoso. *Jurnalisme Objektif Vs Subjektif*. [Http://edisantoso.com/?p=36](http://edisantoso.com/?p=36) diakses 27 Agustus 2009 jam 17.40 WIB.

V. Penilaian

Ada beberapa aspek yang menjadi fokus penilaian, yaitu penilaian menganalisis jurnanisme makna atau interpretasi wartawan terhadap fakta yang diberitakan dalam berita utama pada surat kabar.

1. Jenis tagihan: Tugas individu

Bentuk: Pertanyaan tertulis

Instrumen:

- a. Apakah yang dimaksud dengan jurnanisme makna?
- b. Apa pengertian secara umum dari berita utama?
- c. sebutkan dan jelaskan ciri-ciri jurnanisme makna?

2. Jenis Tagihan: Tugas Kelompok

Bentuk: Pertanyaan tertulis dan lisan

Instrumen:

- a. Carilah dalam berita utama yang telah diberikan Ciri-ciri Jurnanisme Makna yaitu interpretasi pada konteks masa lalu, sekarang, dan prediksi ke depan. Diskusikan dalam kelompok yang telah ditentukan, setelah selesai presentasikan hasil analisis di depan kelas.
- b. Berikan tanggapan dari hasil analisis kelompok lain.

Tabel. 2
Penilaian membaca dan menganalisis berita utama

No	Aspek yang dinilai	Rentang nilai	Nilai
1	Ketajaman dan kesesuaian analisis yang dilakukan siswa dalam menemukan ciri-ciri jurnanisme makna	0 - 40	40
2	Keaktifan siswa dikelas	0 - 20	20
3	Memperhatikan lafal, intonasi, nada/tekanan pada persentasi hasil analisis	0 - 40	40
4	Jumlah		100

Keterangan:

Nilai setiap aspek diberikan nilai tertinggi 40 dan terendah 0

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian. Disamping itu, peneliti memberikan implikasi dan saran terhadap penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab IV, dapat disimpulkan bahwa perkembangan jurnalisme di dunia yang dimulai pada abad ke-19 muncul dikarenakan ketidakpuasan wartawan dan media yang pada saat itu hanya menjadi sebuah alat yang bersifat objektif dan netral tanpa arah penyelesaiannya. Perkembangan jurnalisme ini juga menjalar ke Indonesia yang pada masa itu, masih dalam masa penjajahan. Perkembangan jurnalisme ini jugalah yang mendorong terciptanya jurnalisme-jurnalisme modern di Indonesia yang salah satunya adalah jurnalisme makna yang dikenalkan oleh Jacob Oetomo.

Jacob Oetomo memperkenalkan jurnalisme makna yang memiliki ciri-ciri adanya interpretasi pada konteks masa lalu, konteks sekarang, dan konteks prediksi ke depan atau bertali-talian pada sebuah berita. Media Indonesia seperti *Kompas* yang merupakan surat kabar bersekala nasional dan *Kedaulatan Rakyat* yang berskala daerah, merupakan salah satu dari beberapa media massa Indonesia yang sudah memanfaatkan jurnalisme makna, di mana wartawan dapat memberikan interpretasinya dalam berita sesuai dengan kaidah-kaidah kewartawanan. Ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam berita utama *Kompas* bulan Mei 2009, sudah terdapat interpretasi pada konteks masa lalu,

konteks sekarang, dan konteks prediksi ke depan. Dalam berita utama *Kedaulatan Rakyat* bulan Mei 2009, sudah terdapat interpretasi pada konteks masa lalu dan konteks sekarang. Ini membuktikan bahwa jurnalisme makna bukan hanya sekedar pengenalan teori tanpa terapan tetapi, mulai dimanfaatkan oleh media-media Indonesia.

5.2 Implikasi

Pembelajaran bahasa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi untuk mendorong kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran jurnalistik dengan baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan membuka jendela pengetahuan siswa agar dapat mengetahui perkembangan-perkembangan jurnalisme di dunia maupun di Indonesia yakni, pengetahuan tentang jurnalisme makna dalam berita. Ciri-ciri jurnalisme makna adalah adanya interpretasi wartawan pada konteks masa lalu, konteks sekarang, dan konteks prediksi ke depan terhadap fakta yang diberitakan. Pengetahuan ini mungkin kelak di kemudian hari dapat bermanfaat bagi siswa yang berminat bekerja dibidang jurnalistik.

Penelitian tentang jurnalisme makna dalam berita yang diambil dari surat kabar *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* ini, dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran jurnalistik di SMA kelas XI semester 2 sebagai materi pembelajaran keterampilan membaca.

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, siswa tidak hanya terpaku dengan pengetahuan-pengetahuan umum tentang jurnalistik, tanpa melihat adanya perkembangan-perkembangan yang signifikan dalam tubuh jurnalisme.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dalam bagian ini akan dikemukakan saran-saran:

1. Media massa Indonesia sudah selayaknya memanfaatkan jurnalisme makna dalam penyampaian beritanya, agar berita yang disampaikan lebih memiliki arti dan makna menuju ke arah semangat penyelesaian.
2. Guru bidang studi bahasa Indonesia dalam memberikan pembelajaran pada materi yang berkaitan dengan jurnalistik, seharusnya lebih membuka diri terhadap perkembangan-perkembangan jurnalisme di dunia maupun di Indonesia sehingga, penyampaian proses pembelajaran semakin beragam dan berkembang.
3. Siswa hendaknya tidak hanya terpaku pada pembelajaran jurnalistik secara umum, tetapi lebih aktif dalam mengikuti, memperhatikan dan mempelajari jurnalisme yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang. M.1986. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi,1990. *Organisasi Dan Administrasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Arikunto, Suharsimi.1991. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur penelitian: Suatu peendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BSNP.2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005.
- Bungin, Burhan.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagafindo Persada.
- Chaer, Abdul.1990. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edisantoso. *Jurnalisme Objektif Vs Subjektif*. [Http://edisantoso.com.?p=36](http://edisantoso.com.?p=36) diakses 27 Agustus 2009 jam 17.40 WIB.
- Fahrimal."Kebebasan Pers". [Http://fahrimal.blogspot.com/2010/01/kebebasan-pers.html](http://fahrimal.blogspot.com/2010/01/kebebasan-pers.html) diakses 13 maret 2010 Jam 13.30 WIB.
- Gafur, Abd.1982. *Desain Instruksional*. Solo: Tiga Serangkai.
- [Http://chemistry-education-net.blogspot.com/2008/11/pengertian-pembelajaran.html](http://chemistry-education-net.blogspot.com/2008/11/pengertian-pembelajaran.html) diakses 27 Februari 2009 jam 17.30 WIB.
- Husban.2006. *Definisi dan Sejarah Jurnalisme*. [Http://husban.blogdrive.com/archive/54.html](http://husban.blogdrive.com/archive/54.html) diakses 11 Agustus 2009 jam 11.25 WIB.
- Ishwara, luwi. 2007. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moleong, Lexy. J.2007. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Edisi Ketiga). Bandung: Penerbit Remadja Karya.
- _____. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya CV.

- Mulyasa. H. E.2008. *Implementasi Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Nurudin.2009. *Jurnalime Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oetomo, Jacob. 2003. *Antara Jurnalisme Makna Dan Jurnalisme Makna*: Yogyakarta.
- Oetomo, Jacob. 2001. *Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakosa, Adi. "Teori Normatif Komunikasi Massa". [Http://adiprakosa.blogspot.com/2009/teori normatif komunikasi massa.html](http://adiprakosa.blogspot.com/2009/teori-normatif-komunikasi-massa.html) diakses 13 maret 2010 jam 12.44 WIB.
- Romli, ASM.2007. *Pengetian Jurnalistik*. [Http://samirkhan.wordpress.com/2007/11/15/pengertian jurnalistik](http://samirkhan.wordpress.com/2007/11/15/pengertian-jurnalistik) diakses 22 Februari 2009 jam 13.05 WIB.
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan (Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sisil."Hubungan Antara Sistem Komunikasi Indonesia Terhadap Sistem Pers Yang Berlandaskan Pada Sistem Pemeritahan". [Http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2008.05/sistem-komunikasi-indonesia.html](http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2008.05/sistem-komunikasi-indonesia.html) diakses 13 maret 2010 jam 12.49 WIB.
- Sudaryanto.1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis: Pengantar Peneliti Wahana Kebahasaan Secara Linguis*. Yogyakarta: Duta wacana University Press.
- Sumardiria, Haris.2005. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature (Panduan Praktis Jurnalistik)*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Wahyuni, Maria Rini.2000. *Penyimpangan Pengembangan Paragraf Dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas Tahun 1997*. Yogyakarta: PBSID USD
- Wiharyanto, Kardyat.2005. *Teknik Penulisan Berita*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Politisi Belum Jadi Negarawan

Politik Nasional Tereduksi Jadi Perebutan Kekuasaan Saja

JAKARTA, KOMPAS — Perpolitikan nasional yang dipertontonkan petinggi partai politik saat ini kian tereduksi menjadi sekadar perebutan kekuasaan. Perolehan suara dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden jadi kepentingan tertinggi.

Visi dan kepentingan jangka pendek, serta sikap pragmatis untuk meraih kekuasaan, itu menandai politisi kita masih belum berjiwa negarawan.

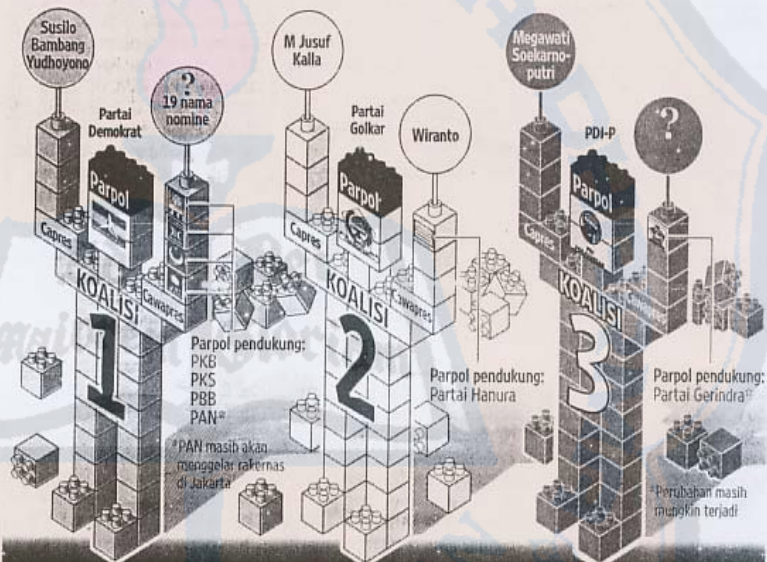
Sebaliknya, negarawan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Moralitas tinggi yang dipunyai politisi berjiwa negarawan akan membuat dirinya tetap terhormat, baik saat menang maupun kalah dalam pemilu legislatif atau pemilu presiden (pilpres).

Demikian benang merah dari percakapan *Kompas*, secara terpisah, dengan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif, budayawan Franz Magnis-Suseno, dan sosiolog hukum Satjipto Rahardjo, Sabtu (2/5). Ketiganya masih berharap munculnya politisi berjiwa negarawan di negeri ini.

"Sekarang ini elite politik menunjukkan kepentingan tertinggi adalah pemilu dan pilpres. Seharusnya politisi belajar menjadi negarawan," ujar Svafii.

Politik yang bermartabat dan bermoral, papar Syaifi, bukanlah ajang rebutan dan permainan kekuasaan, tetapi selalu mengarah pada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan golongan.

Kemungkinan Koalisi Partai Politik Menuju Pemilu Presiden 2009



Komentar terhadap Kondisi Politik Indonesia

"Saat ini, kepentingan tertinggi elite politik adalah pemilu dan pilpres. Seharusnya belajar menjadi negarawan. Politik yang bermartabat dan bermoral bukanlah ajang rebutan dan permainan kekuasaan, tetapi selalu mengarah pada kepentingan bangsa."

"Negarawan dengan sendirinya akan menunjukkan wawasan, integritas, kapasitas intelektual, dan emosional di atas rata-rata. Moralitas tinggi mutlak bagi siapa pun yang terjun ke kancah politik, apalagi pemimpin politik."

"Kritik yang jujur, rasional, tanpa sentimen dan sikap emosional pada lawan politik, dipandang sebagai salah satu ciri politisi yang bermoral tinggi."

Ahmad Syafii Ma'arif
Guru besar bidang filsafat dan
ilmu sejarah Universitas Negeri
Yogyakarta dan mantan Ketua
Muhammadiyah

Franz Magnis-Suseno
Guru Besar Filsafat
Sekolah Tinggi Filsafat
Driyarkara

Satjipto Rahardjo
Guru Besar Emeritus
Universitas Diponegoro

Sumber: Litbang Kompas

FOTO: MVL - D. M. BIANCHI / G. PASTORI

an, yakni kepentingan bangsa.

Ia mengingatkan, negeri ini bukan sedang dalam kondisi serba baik. Korupsi, krisis ekonomi global, bahkan ancaman disintegrasi masih menjadi tantangan serius.

Franz mengatakan, politisi yang mengungkapkan kenegawanannya tak hanya berkehadapan dengan kekuasaan, tetapi juga menegaskan dan membuktikan apa yang mau diperbuat untuk bangsa dan negara dengan

visi yang benar, penting, dan mendalam.

Negarawan akan dengan sendirinya menunjukkan wawasan, integritas, serta kapasitas intelektual dan emosional di atas rata-rata. Selalu ada tarik-me-

KOMPAS, SENIN, 4 MEI 2009

Politisi Belum Jadi Negarawan

narik amat ketat antara kepentingan bangsa dengan kepentingan pribadi dan golongan. Untuk itu, moralitas tinggi mutlak bagi siapa pun yang terjun ke kancah politik, apalagi menjadi pemimpin politik.

Politik pada hakikatnya adalah demi kepentingan umum. Akan tetapi, gambaran jamak menunjukkan banyak orang yang menekuni politik untuk kepentingan sendiri, bahkan demi prospek bisnis. "Orang berbondong-bondong mencari kekuasaan seperti mencari pekerjaan," ujar Satjipto Rahardjo.

Baca Juga
soal Pemilu
Presiden

Menebak
Pengembangan
Arah Koalisi
Antarpol
MAL 5

"Penyusu"

Bagi Syafii, peradaban politik bangsa ini masih berada pada tingkat rendah. Hal itu antara lain terlihat dari ting-

kah pemimpin politik yang mempertahankan sikap feodal dan larut dalam pragmatisme. Mereka tak sungkan mendorong lahirnya generasi politisi "penyusu".

Generasi penyusu ini menumpang popularitas orangtua atau keluarga dekat untuk mendapat posisi politik meskipun mereka belum memiliki apa pun untuk ditawarkan kepada bangsa dan negara. Jadilah anak pejabat negara dan petinggi parpol terpilih meski pernyataan politik sekalipun belum ia sampaikan, bahkan di atas panggung kampanye.

Dukungan suara yang didapat juga membuktikan masih banyak warga terpicak popularitas tokoh yang membayangi, bukan kinerja dan kapasitas calon pemegang mandat rakyat itu. Melihat realitas politik pascapemilu legislatif

dan menjelang pilpres, Syafii berpendapat, rakyat harus kembali bersabar hingga lima tahun mendatang untuk menyaksikan perbaikan yang lebih signifikan.

Meski demikian, tak putus harapan pada politisi senior yang saat ini sudah menguasai panggung politik agar mereka bisa menunjukkan sikap kenegaraan. "Kekanak-kanakan kalau berpikir hanya bisa berperan ketika mewakili parpol yang duduk di pemerintahan. Kalau takut jadi oposisi, jangan jadi kader partai," ujar Syafii.

Moral yang tinggi seharusnya membuat petinggi parpol mampu memperlihatkan bahwa kekalahan adalah sesuatu yang biasa. Tidak perlu ada kekecewaan karena merasa dilawan dan dikalahkan yang menghalangi kelompok politik bekerja sama untuk kepentingan bangsa. Franz menyebutkan, kerja sama Barack Obama, Hillary Clinton, dan

John McCain pada pemilu di Amerika Serikat lalu sebagai contoh yang bagus.

Sebuah jargon politik disebutkan Satjipto: kesetiaan kepada partai selalu diakhiri setiap kali datang panggilan untuk setia kepada bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai. Pernyataan itu dijanjikan sebagai platform idealisme oleh semua pemimpin parpol. Namun, katanya kata dan perbuatan elite politik ini yang dinantikan.

"Selalu ada tarik-menarik antara platform idealisme dan watak politik yang mengarah pada upaya mendapat kekuasaan," ujar Satjipto.

Kemampuan elite politik untuk mengemban dan mengatasi persoalan teknis pemilu agar tak mengganggu kepentingan bangsa dan negara menjadi salah satu ujian penerapan platform itu. Satjipto berharap tidak ada elite politik yang memperalat kekuasaan pemilu untuk menyerang

pihak lain. Semua petinggi partai politik justru perlu bekerja sama untuk memperbaiki dan membantu penyelenggaraan yang lebih baik.

Pendapat senada disampaikan Franz. Pengusutan atas dugaan kecurangan pemilu tentu mesti dilakukan. Namun, harus direlakan pula jika kekisruhan itu tidak terbukti sebagai upaya sistematis.

Kritik

Platform idealisme dapat diperankan dalam posisi sebagai pemegang kekuasaan atau oposisi. Tetapi, Satjipto mengingatkan, realitas empiris mempunyai logikanya sendiri. Selalu ada kemungkinan penjabaran ideologi yang tidak memberikan hasil seperti dijanjikan ketika berhadapan dengan realitas.

"Mencari kekuasaan itu sah saja, tetapi cobalah mawas diri. Andalkan kekuatan politik di luar arus besar itu memegang kekuasaan, mereka juga akan ber-

hadapan dengan realitas empiris yang sama," ujar Satjipto.

Kritik yang jujur, rasional, tanpa sentimen dan sikap emosional kepada lawan politik, dipandang sebagai salah satu ciri politisi yang bermoral tinggi. Kritik tidak seharusnya menjadi upaya untuk menjelekkan, menyerang, apalagi menjatuhkan lawan politik.

"Jangan mengkritik, tetapi apa yang mereka kritik menjadi hal yang akan mereka ulangi ketika memegang kekuasaan pemerintahan," ungkap Satjipto.

Ironisnya, menjelang pilpres saat ini, yang tampak justru tanda "permusuhan" lewat penggalangan koalisi.

"Koalisi hanya punya arti jika mereka menunggang capres dan cawapres. Sekarang justru itu yang dihindari. Kalau koalisi untuk oposisi itu salah kaprah besar, tidak masuk akal, karena yang dibutuhkan justru koalisi untuk mendukung pemerintahan agar efektif. Oposisi tak perlu koalisi," kata Franz. (DAY)

KOMPAS KAMIS, 7 MEI 2009

Hatta Temui Megawati

Giliran PDI-P Diperhitungkan

JAKARTA, KOMPAS — Peta koalisi partai politik kembali cair dengan adanya pendekatan antara kubu Yudhoyono dan kubu Megawati. Tanda-tanda itu mulai terlihat dengan datangnya Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Rabu (6/5).

Hatta datang seorang diri dan diterima Megawati, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas, dan Sekjen PDI-P Pramono Anung. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

Seusai pertemuan, Hatta tidak mau memberikan banyak keterangan. Menurut dia, pertemuan itu hanya membicarakan soal rumah. "Saya sampaikan bahwa status rumah sudah menjadi milik Ibu sebagai mantan presiden," ucapnya dan ia langsung masuk ke mobil.

Namun, dari informasi yang beredar, PDI-P dalam beberapa hari ini memang mendapat "tawaran" untuk posisi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Tokoh PDI-P yang disebut-sebut adalah Taufik Kiemas atau Pramono Anung. Apabila Taufik tidak bersedia, ia mendapat tawaran posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan Megawati menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. PDI-P juga konon ditawarkan lima sampai tujuh posisi menteri.

(Bersambung ke
hal 15 kol 1-3)

Manuver PAN

- 13 April 2009 Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Amien Rais di Wisma Negara. Amien Rais menyatakan dukungannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai capres.
- 15 April 2009 Soetrisno Bachir bertemu dengan Prabowo Subianto membicarakan kemungkinan koalisi.
- 19 April 2009 Dalam pertemuan dengan Majelis Penasihat Partai dan 28 DPW PAN di kediamannya, Amien Rais mendorong PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat. Nama Hatta Rajasa mulai disebut sebagai cawapres dari PAN.
- 20 April 2009 Hatta Rajasa menyatakan, tidak terlintas di pikirannya soal dirinya diusulkan menjadi cawapres.
- 21 April 2009 Soetrisno Bachir merasa, pertemuan di kediaman Amien Rais berada di luar mekanisme kepartaian.
- 22 April 2009 Rapat DPP PAN mempertegas mandat kepada Soetrisno Bachir untuk berkomunikasi politik dengan pihak mana pun.
- 1 Mei 2009 Amien Rais dan Soetrisno Bachir membuat lima kesepakatan. Salah satunya, rakernas dilaksanakan dua kali, yakni di Yogyakarta tanggal 2 Mei 2009 dan di Jakarta tanggal 9 Mei 2009, dihadiri oleh Ketua Umum dan Ketua MPP.

● 2 Mei 2009 Rakernas PAN di Yogyakarta menepakati PAN akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusulkan Hatta Rajasa sebagai cawapres.

● 4 Mei 2009 Hatta Rajasa menyatakan ketidaksediaannya menjadi cawapres.

Sumber: Litbang Kompas

GUNAWAN

KOMPAS, KAMIS, 7 MEI 2009

Hatta Temui Megawati

(Sambungan dari halaman 1)

Mengenai informasi yang beredar itu, sejumlah petinggi PDI-P masih meraba-raba apakah tawaran itu benar-benar ajakan atau justru akan memecah belah partai, seperti halnya sejumlah partai lain. "Kami masih belum tahu apakah ini benar-benar ajakan atau bukan," ucap seorang tokoh PDI-P yang menduga-duga tentang kemungkinan langkah itu sebagai upaya memecah aliansi Mega-Prabowo.

Pramono Anung ketika dikonfirmasi soal pertemuan itu memberikan keterangan yang hampir sama dengan Hatta. Namun, dia juga memberikan isyarat perlu dibangunnya komunikasi politik.

"Kehadiran Pak Hatta bagaimanapun dia adalah Menteri Sekretaris Negara dan dia juga secara langsung... ininya Pak SBY. Pembicaraannya soal rumah dan yang lain-lain. Yang lain-lain ini kami sedang komunikasikan lebih lanjut," paparnya.

Ketika ditanya pers apakah Partai Demokrat mengajak koalisi PDI-P, Pramono mengatakan, "Tidak bicara koalisi. Ini bicara untuk tataran yang lebih besar bagi bangsa. Ya, komunikasi politik tadi."

Mengenai apakah Megawati akan bertemu Yudhoyono, Pramono juga mengatakan, "Ya, nanti kita lihat ya."

Versi lain dari informasi yang beredar adalah Hatta datang untuk menyampaikan salam dari SBY sekaligus *kulonuwun* seandainya Gubernur Bank Indonesia Boediono jadi ditetapkan sebagai calon wapres. Bagaimanapun, Boediono adalah menteri yang "ditemukan" oleh Megawati.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengatakan, Gerindra akan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

Jika Partai Gerindra tetap

akan mengusung dan mengajukan capres sendiri, ia yakin Gerindra mampu memenuhi persyaratan pencalonan dengan dukungan sejumlah parpol kecil.

Terkait koalisi Megawati-Prabowo, Suhardi menyatakan, Gerindra merasa terhormat. Akan tetapi, semua keputusan sepenuhnya bergantung pada Prabowo.

Peluang Hatta "tipis"

Dari informasi yang dihimpun *Kompas*, sejumlah pihak di Partai Amanat Nasional saat ini sedang mempersiapkan "jalan keluar" seandainya Hatta Rajasa yang diputuskan dalam Rakernas PAN di Yogyakarta sebagai calon wapres ditolak Yudhoyono.

Anggota Fraksi PAN, Patrialis Akbar, mengakui, PAN memang tidak bisa memaksakan. "Itu memang menjadi kompetensinya SBY untuk menerima atau menolak calon wapres. Bagi kami tidak apa-apa," ujarnya, Rabu.

Patrialis menambahkan, seandainya Hatta ditolak, keputusan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat tidak akan berubah. "Saya juga memperkirakan, PAN tidak akan lagi melaksanakan rakernas di Jakarta. Saya pikir teman-teman di daerah juga menyadari ini. Jadi, kami tetap akan berkoalisi dengan PD," katanya.

Ditanya tentang maksud kunjungan Hatta Rajasa ke rumah Megawati, Patrialis mengaku tidak tahu. "Saya belum tahu, bahkan saya tidak tahu kalau beliau ke sana. Yang jelas keputusan Rakernas PAN di Yogyakarta belum dicabut," ujar Patrialis.

Dukungan NU untuk Kalla

Calon presiden dari Partai Gerakan Karya, Jusuf Kalla, mengaku mendapatkan dukungan berupa doa dari Nahdlatul Ulama untuk pencalonannya dalam Pemilu Presiden 2009. Dukungan doa itu didapat saat Kalla berte-

mu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu.

"Alhamdulillah salah satu warga NU saat ini maju sebagai calon presiden. Dahulu hanya maju sebagai wapres. Semoga dilindungi Allah," ujar Hasyim didampingi Kalla saat jumpa pers se usai pertemuan.

Tentang rencana ke depan yang dibicarakan dengan Hasyim, Kalla mengemukakan pentingnya pembinaan kebersamaan antara dirinya dan NU.

Sebelum menerima Kalla, PBNU juga menerima Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

Kepada PBNU, Suryadharma juga bersilaturahmi dan menjelaskan perkembangan politik terakhir. Untuk koalisi, Suryadharma mengemukakan, akan diputuskan sebelum 12 Mei apakah PPP akan bersama Prabowo atau Yudhoyono.

Aburizal gembira

Setelah keputusan Rapat Pleno Golkar mengizinkan kadernya menjadi capres atau cawapres, anggota Dewan Penasihat Golkar, Aburizal Bakrie, yang berada di urutan pertama dari enam cawapres Golkar, tampak riang. Selain Aburizal, cawapres lain adalah Agung Laksono, Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, Sultan HB X, dan Surya Paloh.

"Nama saya ada di situ. Kalau yang 19, saya tidak lihat karena ada di kantong Presiden," ujar Aburizal yang mengaku siap jadi cawapres SBY jika dipilih.

Mengenai kapan Yudhoyono mengumumkan cawapresnya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan akan menunggu penghitungan suara KPU untuk menghitung perolehan kursi di DPR sebagai syarat pencalonan. "Tanggal 11 Mei kami deklarasi," katanya.

(SUT/INU/HAR/DWA/MAM)

KOMPAS JUMAT, 8 MEI 2009

Pemberantasan Korupsi Terancam

Anggota DPR Minta KPK Tak Lakukan Apa-apa

JAKARTA, KOMPAS — Pemberantasan korupsi menghadapi ancaman. Ini terlihat setelah sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keabsahan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Antasari Azhar diberhentikan sementara oleh Presiden.

Antasari adalah Ketua KPK. Ia diberhentikan sementara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (7/5), karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Tangerang, Banten, 14 Maret.

Tak lakukan penyidikan

Bahkan, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, sejumlah anggota Komisi III DPR meminta KPK tidak melakukan penyidikan dan penuntutan selama anggota komisi itu belum kembali berjumlah lima orang. Rapat Komisi III DPR dengan KPK itu digelar untuk menyikapi status tersangka dan penahanan Antasari.

Sejak rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan itu dibuka sekitar pu-

kul 10.00, empat unsur pimpinan KPK yang hadir, Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono Umar, dan M Jasin langsung ditanya kondisi KPK setelah kasus yang dihadapi Antasari.

Chandra menjelaskan, masalah itu tidak mengganggu kinerja KPK karena kepemimpinan komisi itu bersifat kolektif. Wakil ketua KPK secara bergilir juga akan menjadi Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPK. "Untuk minggu ini, saya yang menjabat. Minggu depan, giliran M Jasin," kata Chandra.

Bibit menambahkan, keputusan pembuatan Plh Ketua KPK diambil dalam rapat pimpinan KPK yang dihadiri lima unsur pimpinan KPK, termasuk Antasari Azhar, di rumah Antasari di Bumi Serpong Damai, Tangerang

(Bersambung ke hal 15 kol 3-5)

Aturan Pemberhentian Pimpinan KPK

(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

Pasal 26

- (1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua KPK dan 4 (empat) orang Wakil Ketua KPK.
- (2) KPK membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penindakan;
 - c. Bidang Informasi dan Data; dan
 - d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 33

Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR.

Sumber: Litbang Kompas diolah dari Laporan Tahunan KPK

GUNAWAN

KOMPAS, JUMAT, 8 MEI 2009

Pemberantasan Korupsi Terancam

(Sambungan dari halaman 1)

Selatan, 1 Mei 2009. "Saat itu beliau (Antasari) menyerahkan kewenangan yang dimilikinya kepada empat wakil pimpinan karena ingin berkonsentrasi dengan kasusnya," papar Bibit.

Keputusan itu diambil, lanjut Bibit, karena KPK tetap harus berjalan meski satu unsur pimpinannya tidak ada. Sebelumnya, saat Antasari tidak ada di kantor, KPK juga tetap bekerja dan mengambil keputusan. Misalnya, ketika Antasari ke luar negeri pada 22-26 Juli 2008, 2-8 Desember 2008, dan 17-21 Desember 2008.

Namun, Lukman Hakim Saifuddin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan keabsahan pimpinan KPK yang berjumlah empat orang. Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, pimpinan komisi itu lima orang. "Kami ingin persepsi ini disamakan dahulu. Untuk itu, apa pimpinan KPK tidak mengambil keputusan dahulu yang prinsipil untuk mencegah munculnya masalah hukum?" tanyanya.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Azlaini Agus, menambahkan, putusan yang diambil keempat unsur pimpinan KPK dapat dipertanyakan keabsahannya karena tidak diambil secara kolektif. Pasal 21 Ayat 2 UU KPK menyatakan, pimpinan KPK bekerja secara kolektif. "Jika empat orang yang mengambil putusan, apakah bisa disebut tak kolektif," katanya.

Azlaini juga meminta pimpinan

menertibkan pengunjung rapat yang duduk di balkon, antara lain wartawan dan pegawai KPK, sebab mereka beberapa kali meneriakkan "hu...". Mereka menilai usul anggota DPR itu mendiskreditkan dan mengecilkan KPK.

Meski muncul sejumlah cemooh, Nursyahbani Katjasungkana dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyarankan, selama pimpinan KPK belum genap lima orang, tak perlu diambil putusan strategis, seperti melakukan penuntutan dan penyidikan. Untuk kegiatan lain, seperti sosialisasi dan urusan internal, tetap berjalan.

Kosong delapan bulan

Menanggapi usulan itu, Jasin menyatakan, jika KPK baru dapat bekerja setelah pimpinannya lengkap, komisi itu dapat kosong dari upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi selama delapan bulan. Pimpinan KPK baru akan diberhentikan tetap jika tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut atau menjadi terdakwa. Proses pemilihan pengganti pimpinan KPK butuh waktu sekitar lima bulan.

Secara terpisah, mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menilai, usulan anggota Komisi III DPR itu berlebihan. "Kewenangan penyidikan dan penuntutan itu ada di tangan penyidik dan penuntut umum di KPK. Pimpinan KPK, sesuai dengan UU, memang memiliki kewenangan itu. Bukan bergantung pada Ketua KPK," katanya.

Ruki, yang juga penyusun Rancangan Undang-Undang KPK, menambahkan, kepemimpinan

KPK bersifat kolegial. Jika berhalangan tetap, seorang komisioner dapat diganti tanpa harus menghentikan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

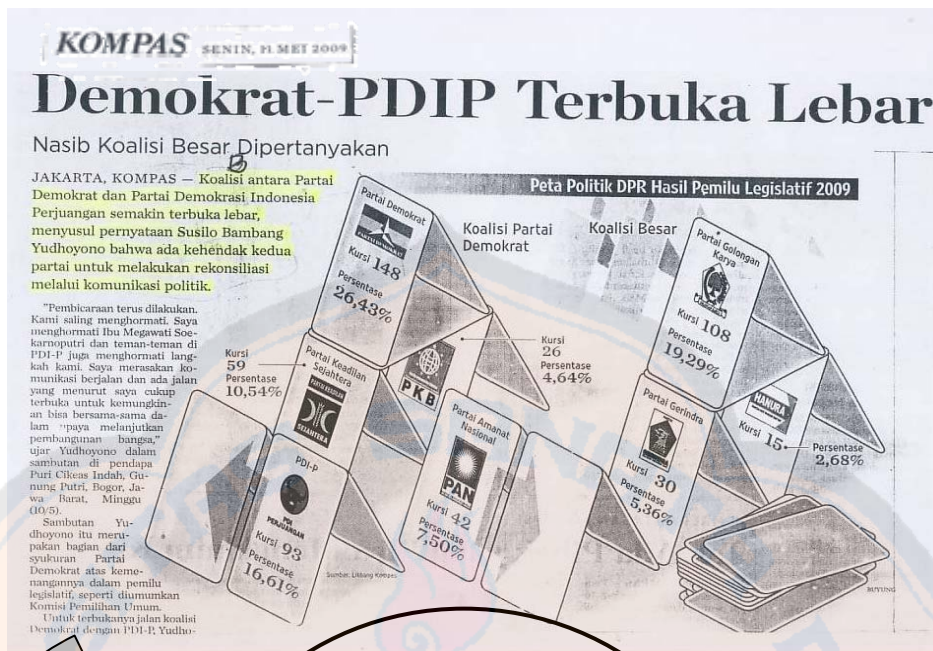
Sekitar pukul 16.00, rapat dis Kors. Saat dibuka kembali pukul 19.30, langsung disusun kesimpulan sementara yang isinya Komisi III DPR meminta pimpinan KPK melaksanakan tugas dan fungsinya seperti biasa. Namun, KPK diminta memerhatikan UU No 30/2002, khususnya Pasal 21 Ayat 1 dan 2.

Melihat kesimpulan itu, Bibit mengatakan, KPK tetap akan bekerja seperti biasa, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. "Keputusan yang diambil pimpinan KPK tetap mempunyai legitimasi. Jika ada yang mengajukan praperadilan, akan kami hadapi," paparnya.

Zainal Arifin Mochtar, pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, menilai, logika berpikir sejumlah anggota Komisi III DPR bahwa bekerja kolektif di KPK harus dimaknai hadirnya lima unsur pimpinan adalah tidak berdasar. Sebab, ada Pasal 32 UU No 30/2002 yang mengatur pemberhentian sementara.

"Kolektif tak berarti keputusan di KPK harus selalu diambil lima pimpinan bersama-sama. Apalagi kebijakan putusan itu diambil empat orang adalah kesepakatan lima pimpinan," papar Zainal.

Jika Dewan ngotot pada pendiriannya, ujar Zainal, berarti mereka membuat kesalahan karena tidak mengantisipasi keadaan seperti sekarang. DPR yang membuat UU KPK. (NWO/TRA)



KOMPAS, SENIN, 11 MEI 2009

Demokrat-PDIP Terbuka Lebar

yono menekankan landasan kerja sama, yaitu platform berupa pembangunan demokrasi dan keadilan. "Kalau itu sepakat, kami bisa bersama-sama dalam bentuk koalisi di pemerintahan dan di parlemen," ujarnya.

Terkait dengan terbukanya jalan koalisi Demokrat dan PDI-P, Yudhoyono mengutip pernyataannya saat menyebut lima kriteria calon wapres. "Saya katakan waktu itu, dalam politik itu, *anything can happen*. Bisa saja terjadi kalau itu menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.

Soal pernyataan hampir pastinya dirinya akan bersaing dengan Megawati di pendapa Cikeas sesuai pemilu legislatif, menurut Yudhoyono, itu adalah posisi waktu itu. Saat ini dan saat-saat ke depan posisinya bisa berubah.

"Kalau Tuhan menakdirkan rekonsiliasi dan bersama-sama membangun negeri, tentu itu jalan yang baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya selalu memohon petunjuk dari Tuhan agar apa pun yang dilakukan bersama, termasuk koalisi, baik untuk bangsa, untuk negeri, untuk sejarah, dan untuk masa depan kita," ujarnya sambil menyebutkan rencana deklarasi di Bandung, 15 Mei.

Untuk pemilu presiden, Yudhoyono mengemukakan, masa kampanye bisa menjadi lebih keras meskipun sudah ada kesepakatan dirinya dengan calon presiden lain, yaitu Jusuf Kalla dari Partai Golongan Karya. Kepada kader dan simpatisan Demokrat, Yudhoyono minta agar

rendah hati dan bersabar.

"Jangan mudah dan suka menantang. Jangan mudah dan suka sesumbar. Jangan mudah dan suka mengejek. Mari kita jaga perasaan kompetitor kita karena banyak jalan untuk mencapai tujuan yang baik. Tidak perlu kita tunjukkan kita lebih hebat, lebih cepat, dan lebih baik," ujarnya.

PDIP beri sinyal

Menanggapi pidato Yudhoyono, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung mengatakan, komunikasi politik memang perlu dilakukan. "Komunikasi politik yang dilakukan Pak SBY, terutama melalui Pak Hatta Rajasa, untuk kepentingan yang lebih besar. Tidak bicara jabatan,"

paparnya.

Kepentingan yang lebih besar itu adalah bagaimana agar energi partai dan pemerintah tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif, tetapi tercurah untuk memajukan bangsa.

Isyarat menerima ajakan Partai Demokrat juga telah diberikan Megawati pada Jumat siang setelah menerima Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto.

Ketika ditanya pers soal hubungan PDI-P dengan Demokrat, Megawati mulai membuka pintu adanya komunikasi.

"PDI-P tidak mendekat ke mana-mana. Tapi kalau partai lain mendekat ke PDI-P, itu masalah lain," ucapnya.

Ditinggalkan

Informasi yang diperoleh *Kompas*, sejumlah elite PDI-P memang merasa kecewa dengan sejumlah partai yang bergabung dalam Koalisi Besar. Partai Per-

satuan Pembangunan yang sebelumnya bergabung justru menyebarkan.

Partai Golkar dan Partai Hanura juga secara tiba-tiba meninggalkan PDI-P dengan mendeklarasikan pasangan capres-cawapres hanya beberapa jam setelah mendeklarasikan Koalisi Besar bersama PDI-P dan Partai Gerindra.

Terkait kerja sama dengan Partai Gerindra, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas, Jumat malam, juga menyiratkan kekecewaan. Ketika ditanya pers apakah Prabowo terlalu ngotot ingin menjadi calon presiden, Taufik mengatakan, "Aku *gak* berani *ngomong*, sudah berlalu *gitu* ya. Masak kita *ngomong* yang masa lalu yang sudah berlalu. Kita *ngomong* yang ke depan *aja*."

Pada Jumat malam itu, Sekjen PDI-P Pramono Anung, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Tjahjo Kumolo, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ketika di-

tanya pers di Jalan Teuku Umar, ketiganya hanya tersenyum dan mengatakan, "Dari kawinan."

Sedangkan Taufik Kiemas menegaskan, tujuan diadakannya komunikasi politik dengan Partai Demokrat bukan didasarkan pada kepentingan untuk mencari kedudukan, tetapi lebih pada hal-hal yang bersifat ideologis karena PDI-P dan Demokrat memiliki kemiripan ideologi.

"Masak kita bicara kedudukan. Belumlah. Baru bicara negara kesatuan dululah kita," ujarnya.

PAN kecewa Demokrat

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Abdillah Toha menilai, mundurnya pendeklarasian Yudhoyono sebagai calon presiden sampai menjelang hari terakhir 16 Mei membuktikan bahwa Yudhoyono benar-benar menganggap Prabowo sebagai lawan yang ditakuti dan harus digagalkan maju sebagai calon presiden.

Dimundurkannya waktu pendeklarasian disinyalir juga untuk membuat PAN dan PPP tidak

punya waktu lagi untuk bung dengan Prabowo. Ia nyata cawapres SBY tidak dengan keputusan Rapat Nasional Yogyakarta.

Menurut Abdillah, p Prabowo dan Soetrisno adalah pasangan yang b latif muda, dan member lihan yang jelas dalam p

"Saya kira SBY sadar ini dan berupaya dengan cara untuk menggagalkan nya pasangan Prabowo no," katanya.

Di tempat terpisah Umum DPP Partai Golkar Kalla, Sabtu malam, si kin dengan keteguhan si dimiliki Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno bersama jajaran fun PDI-P lainnya.

Ia yakin PDI-P akan keutuhan dan soliditas k sar yang telah terbang lumnya. "Kami percaya, bawah Ibu Megawati S putri sangat teguh peno untuk menjaga keutuli," kata Kalla. (INU/HA

KOMPAS SELASA, 12 MEI 2009

Posisi PDI-P Dilematis

Partai Keadilan Sejahtera Minta PDI-P "Kulonuwun"

JAKARTA, KOMPAS — Meski telah "dilamar" Partai Demokrat dan komunikasi keduanya semakin baik, posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap dilematis. PDI-P harus mengklarifikasi sejumlah isu yang selama ini melekat dengan citranya sebagai partai yang konsisten.

Koalisi dengan Partai Demokrat akan menyentuh persoalan krusial di tubuh PDI-P, yaitu mandat partai kepada Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden.

Reaksi ke arah penolakan, misalnya, mulai muncul dari wilayah Bali yang merupakan basis PDI-P. Dalam pemilu legislatif lalu, PDI-P meraih suara terbanyak di Bali. Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Bali, Senin (11/5), menyatakan kecewa atas niat pimpinan pusat untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Meski tidak dijelaskan secara gamblang alasan penolakan itu, Ketua DPD PDI-P Bali AA Ngurah Oka Ratmadi mengaku kecewa.

"Meski berat, kami akan tetap tunduk kepada keputusan pusat. Kami percaya apa pun keputusan pusat demi bangsa dan negara," kata Oka Ratmadi di Denpasar.

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Lili Romli, juga menilai rencana koalisi Demokrat dan

PDI-P hanya akan menguntungkan Demokrat yang memiliki legitimasi yang kuat di DPR.

Menurut dia, sikap PDI-P sangat janggal karena sebelumnya PDI-P selalu menyerang kebijakan politik Demokrat sebagai partai berkuasa. Hubungan keduanya pun sering kali digambarkan bagai air dan minyak yang sulit bersatu.

Jika saat ini kedua partai itu akan berkoalisi, kata Lili, argumentasi rasionalitasnya dipertanyakan masyarakat. "Menjadi oposisi tetap mulia asal konsisten dalam melakukannya," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, koalisi Demokrat dan PDI-P akan membuat kekuatan pemerintah di DPR sangat kuat sehingga upaya mengontrol dan menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif tak mungkin dilakukan.

Komunikasi makin baik

Namun, di sisi lain, komunikasi politik antara kubu Yudho-

yono dan Megawati semakin membaik. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, kemarin, kembali diutus Yudhoyono untuk menemui Megawati di kediamannya.

Hatta datang seorang diri. Megawati didampingi Taufik Kiemas, Pramono Anung, anggota Dewan Pertimbangan Pusat Theo Syafel, dan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang.

"Saya berkunjung ke Teuku Umar melakukan suatu komunikasi, melanjutkan apa yang selama ini sudah terjalin. Suatu

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

KOMPAS, SELASA, 12 MEI 2009

Posisi PDI-P Dilematis

(Sambungan dari halaman 1)

komunikasi yang sangat baik antara saya yang dituntut oleh Pak SBY untuk melakukan komunikasi politik dan Pak Taufik, Iba, dan Mas Prom demi sesuatu yang besar buat bangsa," papar Hatta kepada pers.

Pramono Anung menambahkan, pertemuan dengan Hatta merupakan bagian dari komunikasi politik. "Thu Mega menyampaikan bahwa PDI-P terbuka berkomunikasi dengan siapa saja, partai mana pun," katanya.

Pramono juga menegaskan, komunikasi PDI-P dengan Partai Gerindra masih berjalan. "Namanya politik itu, masa lalu bisa jadi masa sekarang kalau di-up date. Dengan demikian, sangat fleksibel, masih sangat terbuka," ujar Pramono yang menegaskan, hingga saat ini keputusan PDI-P mencalonkan Megawati tidak berubah. PDI-P juga tak pecah.

SBY-Hatta-Boediono

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono bertemu dengan Hatta Rajasa dan Gubernur Bank Indonesia Boediono di Puri Cikeas Indah, Bogor. Sesuai pertemuan selama sekitar satu jam itu, Hatta dituntut Yudhoyono secara khusus ke Jalan Teuku

Umar, Jakarta.

"Pak Hatta memang utusan khusus SBY untuk berkomunikasi dengan PDI-P," ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng yang dihubungi di Jakarta. Alasannya, SBY memercayai Hatta yang telah dituntut berkomunikasi dengan Megawati sejak 2005. "Hubungan Pak Hatta dengan Megawati selama ini juga baik," ujar Andi.

Selain Hatta, komunikasi politik Demokrat dengan PDI-P juga dilakukan oleh Tim Sembilan dan seluruh bar.

Anggota Tim Sembilan, Rusut Sitompul, kepada *Kompas* mengatakan, hubungan PDI-P dan Demokrat sudah jauh lebih baik.

JK-Win bisa mengerti

Pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla-Wiranto menyatakan akan menghormati apa pun keputusan yang diambil PDI-P terkait opsi koalisi dengan Partai Demokrat. Hal tersebut diutarakan Kalla sesuai menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Kantor Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Senin siang.

"Sebenarnya itu masalah internal PDI-P. Namun, saya menghormati apa pun keputusannya. Mudah-mudahan, tentu, kepu-

tusannya tetap dalam kerangka seperti apa yang telah disepakati beberapa minggu lalu dengan membuat koalisi besar," ujar Kalla.

Namun, sesuai bertemu dengan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, semalam di Posko Slipi II Partai Golkar, Kalla mengatakan, jika koalisi Demokrat dan PDI-P betul terjadi, hal itu akan berpengaruh pada proses demokrasi di Indonesia.

Menjawab pertanyaan soal pernyataan SBY yang meminta jangan mudah sesumbar serta tidak perlu menunjukkan diri lebih hebat, lebih cepat, dan lebih baik, Kalla menjawab, "Saya hanya mengikuti ajaran Muhammadiyah (Islam), yakni *fatahul khalaf* atau berlomba-lomba berbuat kebajikan."

Adapun Wiranto mengatakan, slogan yang selama ini dilontarkan, yaitu ingin "lebih cepat dan lebih baik lagi dengan mengutamakan hati nurani", sebenarnya merupakan karakter dan tekad pasangan JK-Win. Wiranto meminta maaf jika slogan duetnya itu menyebabkan ada pihak-pihak yang tersinggung.

Harus "kulonuwon"

Secara terpisah, Presiden Par-

tai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menilai, rencana bergabungnya PDI-P dalam barisan koalisi yang akan mendukung Yudhoyono sebagai kandidat presiden disambut baik.

Namun, lanjutnya, PDI-P perlu *kulonuwon* dan saling menyamakan pandangan demi kemajuan bangsa ini.

"PKS siap bekerja sama dengan partai mana pun asal memang untuk kemajuan bangsa ini. Soal PDI-P mau merapat kepada koalisi pendukung SBY, bagus-bagus saja, tinggal melewati tahapan yang menuju kebaikan bersama. Munggal *kulonuwon* dulu, silaturahmi, ya minum-minum teh dulu antara SBY dan Megawati sambil saling memaafkan atas lontaran-lontaran yang kurang baik pada masa lalu, menyamakan pandangan, mengurangi gengsi demi kemajuan bangsa ke depan," ujarnya.

Soal cawapres, Tifatul kembali menegaskan, PKS tetap menginginkan adanya keterwakilan umat Islam dalam pemerintahan SBY. Ia menyebutkan, kombinasi pemerintahan nasionalis-Islamis seperti pada masa lalu akan mewujudkan pemerintahan yang relatif stabil.

(SUT/INU/MZW/
AYS/MAM/HAR)

KOMPAS KAMIS, 14 MEI 2009

PKS-PAN Ancam Tak Dukung

Partai Demokrat: Boediono Sudah Final

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai calon wakil presiden menimbulkan resistensi keras dari sejumlah mitra koalisi Partai Demokrat yang juga "mengancam" akan menarik dukungan mereka.

Namun, diyakini reaksi itu hanya bersifat sementara dan semata-mata untuk menaikkan posisi tawar.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (13/5), mengatakan, putusan Yudhoyono memilih Boediono merupakan langkah yang keliru. Bukan hanya itu, Yudhoyono juga dinilai telah mengabaikan janji untuk memperbaiki komunikasi politik dengan mitra koalisinya, sebagaimana pernah disampaikan dalam pertemuan menjelang pemilu legislatif, 9 April lalu.

"Kalau tidak mengambil keputusan bersama-sama, masa kita disuruh ikut bertanggung jawab akibatnya?" kata Fahri.

Fahri menyebutkan, jika kemudian PKS merasa ada kebuntuan komunikasi politik, bisa saja PKS mengambil langkah lain. Keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS memungkinkan dewan pimpinan tinggi mengambil langkah lain, termasuk kemungkinan menarik diri dari koalisi dengan Partai Demokrat dan Yudhoyono. Menurut Fahri, respons internal PKS secara umum sulit menerima figur Boediono.

(Bersambung ke hal 15 kol 3-7)

Manuver Parpol Jelang Pilpres

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditetapkan menjadi capres dari Partai Demokrat dan diberi mandat memilih cawapres. PKS, PKB, PAN, dan PPP menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Jusuf Kalla ditetapkan menjadi capres dari Partai Golkar dan diberi mandat untuk berkoalisi dengan parpol lain.

23 April: Megawati Soekarnoputri, capres dari PDI-P, diberi mandat mencari cawapres.

25 April: Megawati Soekarnoputri, capres dari PDI-P, diberi mandat mencari cawapres.

26-27 April: Jusuf Kalla-Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres dari Partai Golkar-Partai Hanura.

1 Mei: Hatta Rajasa, utusan SBY, mendatangi kediaman Megawati Soekarnoputri untuk menjalin komunikasi politik dengan PDI-P. Nama Boediono mulai disebut sebagai cawapres SBY.

6-11 Mei: Tim PDI-P dan Partai Gerindra mengadakan pertemuan di Hotel Mid Plaza Intercontinental Jakarta. Pertemuan belum menghasilkan koalisi.

12 Mei: Hatta Rajasa memberikan penjelasan kepada PKB, PPP, dan PAN mengenai pemilihan Boediono sebagai cawapres di Wisma Negara, tetapi PKS tidak hadir.

13 Mei: Jusuf Kalla-Wiranto menghadiri undangan PKS, PKB, PAN, dan PPP di sebuah hotel di Jakarta.

KOMPAS KAMIS, 14 MEI 2009

PKS-PAN Ancam Tak Dukung

Partai Demokrat: Boediono Sudah Final

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai calon wakil presiden menimbulkan resistensi keras dari sejumlah mitra koalisi Partai Demokrat yang juga "mengancam" akan menarik dukungan mereka.

Namun, diyakini reaksi itu hanya bersifat sementara dan semata-mata untuk menaikkan posisi tawar.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (13/5), mengatakan, putusan Yudhoyono memilih Boediono merupakan langkah yang keliru. Bukan hanya itu, Yudhoyono juga dinilai telah mengabaikan janji untuk memperbaiki komunikasi politik dengan mitra koalisinya, sebagaimana pernah disampaikan dalam pertemuan menjelang pemilu legislatif, 9 April lalu.

"Kalau tidak mengambil keputusan bersama-sama, masa kita disuruh ikut bertanggung jawab akibatnya?" kata Fahri.

Fahri menyebutkan, jika kemudian PKS merasa ada kebuntuan komunikasi politik, bisa saja PKS mengambil langkah lain. Keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS memungkinkan dewan pimpinan tinggi mengambil langkah lain, termasuk kemungkinan menarik diri dari koalisi dengan Partai Demokrat dan Yudhoyono. Menurut Fahri, respons internal PKS secara umum sulit menerima figur Boediono.

(Bersambung ke hal 15 kol 3-7)

Manuver Parpol Jelang Pilpres

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditetapkan menjadi capres dari Partai Demokrat dan diberi mandat memilih cawapres. PKS, PKB, PAN, dan PPP menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Jusuf Kalla ditetapkan menjadi capres dari Partai Golkar dan diberi mandat untuk berkoalisi dengan parpol lain.

23 April: Megawati Soekarnoputri, capres dari PDI-P, diberi mandat mencari cawapres.

25 April: Megawati Soekarnoputri, capres dari PDI-P, diberi mandat mencari cawapres.

26-27 April: Jusuf Kalla-Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres dari Partai Golkar-Partai Hanura.

1 Mei: Hatta Rajasa, utusan SBY, mendatangi kediaman Megawati Soekarnoputri untuk menjalin komunikasi politik dengan PDI-P. Nama Boediono mulai disebut sebagai cawapres SBY.

6-11 Mei: Tim PDI-P dan Partai Gerindra mengadakan pertemuan di Hotel Mid Plaza Intercontinental Jakarta. Pertemuan belum menghasilkan koalisi.

12 Mei: Hatta Rajasa memberikan penjelasan kepada PKB, PPP, dan PAN mengenai pemilihan Boediono sebagai cawapres di Wisma Negara, tetapi PKS tidak hadir.

13 Mei: Jusuf Kalla-Wiranto menghadiri undangan PKS, PKB, PAN, dan PPP di sebuah hotel di Jakarta.

(Sambutan dari halaman 1)

Secara terpisah, Ketua Partai Amanat Nasional Dendaul H Wibisono mengungkapkan, pilihan dari SUP-Bodiond diukur menurut pas. Mestinya faktor seperti Jawa-luar Jawa dan nasionalisme-religius diperhitungkan. Jika wakil kelompok Islam tidak diakomodasi, lanjutnya, dilontar nasionalisme versus Islam akan meningkat kembali. "Itu bukan politik praktis untuk menarik kemenangan pada masa mendatang," ujar Dendaul.

Terkait dengan itu, PAN masih mendua diri untuk berkolaborasi dengan partai mana pun, termasuk alternatif untuk tidak melakukan koalisi sama sekali.

Artinya, kata Wakil Sekjen PAN Rudi Sadig, tidak betul kalau ada yang mengatakan bahwa PAN sudah pasti berkoalisi dengan Partai Demokrat.

"Kalau merujuk apa yang disampaikan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, PAN masih membuka peluang untuk berkolaborasi dengan partai mana pun," ujar anggota Majelis Pertimbangan Partai PAN, Abdillah Toha.

Kelompokan menurut tingkat partai (PAN, PKS, PKB, dan PPP).

Selam malam, mengundang pasangan Jufei Kella dan Winanto untuk bertamu. Pertemuan yang dilakukan di sebuah hotel di Jakarta ini digunakan oleh keempat pargol untuk membahasakan puisi masing-masing.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menteri KUKM) akan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas tentang pengembangan koperasi di berbagai daerah.

Syamsul mengatakan, pertemuan itu tidak mengikat siapa-siapa dan masih ada peluang kemungkinan kolaborasi masih dalam proses dan terbuka lebar.

Sekara terpilih, Jusuf Kalla di Jawa Timur menetapkan bahwa pertemuan ini tidak diorganisasikan. Tidak akan ada, kami tidak merelayannya atau lain-lainnya. Kami terbiasa. Karena negara ini negara demokrasi, perkembangan adalah kemajuan dan berubah-ubah" katanya.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menambahkan, jumlah PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syura Hilmy Anshadhin dan sejumlah figur-kierwas DPP PKS lain, seperti Anis Matta, Abubakar, dan Fabel Hanna, kembali memukul Kalla di salah satu rumah di kawasan Menteng.

*Pertemuan dengan PKS semalam agak mendalam dan intensif" katanya.

Sebelum PKS, Ketua DPP PAN AM Fatwa dan Djoko Susilo juga menemani Kalla.

Naikkan posisi tawar

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Acheud Mubandri mendis, menentunya pemberian dan suara besar dari dila partai anggota khalid merupakan bagian dari dimatila yang wajar. Demokrat yakin, khalid tetap akan wala sangat erat, deklarat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/5).

Tidak ada masalah serius dengan peserta kualifikasi untuk menajukakan Pak SBY. Semua akan memberikan dukungan pada saat deklarasi nanti. Semua dalam posisi *point of no return*," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum,

Pertama peserta koalisi dengan Demokrat yang tetap akan solid memberikan dukungan adalah PKR, PPP, PAN, dan PKS. Sementara yang cenderung berkecenderungan peserta koalisi dilihat sebagai bagian dari cara untuk menaikkan posisi lawan.

Kepulauan Dempo kini diawasi
juga oleh hasil kerjasama ini

Yudhoyono dengan partai-partai peserta koalisi di Istana Negara. Pilihan SBY pada Boediono sebagai calon wakil presiden merupakan final Persiapan Pemilihan SBY-Boediono di Gedung Serbaguna Sasana Budaya Garansi, Bandung, tengah dilakukan.

PDI-P dan Gerindra

Kepastian koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya akan dibentuk pada Kamis ini. Kedua partai direncanakan akan menandatangani koalisi.

Kemarin malam, kedua partai mengadakan pertemuan tertutup di Hotel Mid Plaza International, Jakarta. PDI-P diwakili Pramono Anung, Theo Syarif, Tjajjo Kurnoko, Puan Maharani, dan Salwan Sima. Gerindra diwakili antara lain Haidhir Soejono Djogjosekharsono, Fadli Zon, Haidi Haidi, dan Muchdi PU.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas, yang biasanya aktif melakukan lobi politik tidak kelihatan karena keabsahan dan diawasi di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan.

Pranono Amara katika diti-

mulai persaudaan pertemuan itu menegaskan bahwa pertemuan kemarin memang belum mencapai kesepakatan akhir. "Kalau pertemuannya apakah sudah terjadi kerja sama atau koalisi, saya harus mengatakan, ini belum menjadi sebuah koalisi, tapi masih menjadi embrio," ungkap Pramono.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat PDI-P Saibani Samit, pembahasan lanjutan akan dilakukan tim kecil yang masing-masing terdiri dari dua orang. Setelah itu, hasilnya ditindaklanjuti tim 6 masing-masing partai. Apabila dicapai titik temu, akan ditindaklanjuti juga dengan pertemuan Megawati dan Prabowo.

Pibik Gerindra mencapai lima milia kesatuan visi dan misi dengan FDI-P. Hal ini ditegaskan Muchdi PR ketika ditanyapakah Gerindra akan bergabung ke FDI-P. Ketika ditanya bagaimana pelanggannya, Muchdi menjawab, "Lihat hasil pilkalah."

Menurut Djago Kumala, ter-
kait dengan tangai pendaftaran
citra-cawagra, keputusan apa
pun akan diambil oleh partai pe-
lind lambat Kamis malam.

(INFORMATIONAL/INFLUENTIAL)

KOMPAS JUMAT, 15 MEI 2009

PDIP-Gerindra Masih Alot

Demokrat dan PDI-P Terus Buka Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS — Sampai batas waktu yang dijanjikan, Kamis (14/5) pukul 24.00, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya belum juga mencapai kata sepakat untuk berkoalisi. PDIP juga terus membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat.

Suasana di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar hingga Kamis larut malam tetap dipenuhi wartawan yang men-

unggu "partai puncak", yaitu kepastian koalisi PDIP dan Gerindra. Namun, hal itu tak terjadi.

Menurut Ketua DPP PDIP-Puan Maharani, hal-hal dalam

wacana koalisi Megawati-Prabowo Subianto sebagai capres-cawapres masih terus dimatangkan. "Matang pohon lebih enak daripada matang karbit, kan?" ujar Puan sambil mengatakan, batas waktu bagi PDIP-P untuk memutuskan pasangan cawapres bagi Megawati adalah 16 Mei.

Sumber-sumber di Gerindra menyebutkan, Jumat ini akan diupayakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang diyakini merupakan pertemuan terakhir.

Pertemuan intens PDIP-P dan Gerindra terus berlangsung sampai tengah malam di Istana Batutulis, Bogor. Sejumlah mobil para petinggi PDIP-P berriringan masuk ke lokasi sekitar pukul 22.30. Tak berapa lama kemudian masuk rombongan lain.

Berdasarkan pantauan Kompas, hadir di situ Fadli Zon, Muchdi PR dari Gerindra, dan Sabam Sirait. Di teras terlihat Hashim Djojohadikusumo dan Theo Syafei. Kendaraan yang biasa digunakan Megawati juga ada

di situ. Fadli Zon dan Muchdi meninggalkan lokasi sekitar pukul 24.00. "Besok, besok saja," katanya ketika dimintai keterangan.

Pada waktu bersamaan, PDIP-P juga melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Sejumlah elite PDIP-P semalam bertemu dengan Hatta Rajasa di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Hatta selama ini menjembatani komunikasi antara PDIP-P dan Demokrat.

(Bersambung ke hal 15 kol 1-2)



Tanggal	Kejadian
13 Januari	Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Prabowo Subianto.
16 Maret	Prabowo Subianto menemui Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, untuk silaturahmi politik.
11 April	Megawati bertemu dengan Prabowo untuk membicarakan persoalan pemilu legislatif.
14 April	Megawati-Prabowo bersama sejumlah tokoh politik menyatakan sikap. Pemilu Legislatif 2009 terburuk sepanjang sejarah.
21 April	Megawati dan Prabowo bertemu di Teuku Umar.
22 April	Megawati dan Prabowo bertemu dengan sejumlah purnawirawan TNI di Teuku Umar.
25 April	Prabowo dan Wiyanto hadir dalam Rakernas V PDIP-P di Lenteng Agung.
26 April	Prabowo menemui Megawati di kediamannya.
13 Mei	Tim PDIP-P dan Partai Gerindra melanjutkan pembahasan komunikasi politik.
14 Mei	Hingga pukul 24.00 WIB, kesepakatan koalisi belum tercapai.

aman Ketua wati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar malam tetap i yang me-

unggu "partai puncak", yaitu kepastian koalisi PDIP-P dan Gerindra. Namun, hal itu tak terjadi.

Menurut Ketua DPP PDIP-Puan Maharani, hal-hal dalam

menyebutkan, Jumat ini akan diupayakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang diyakini merupakan pertemuan terakhir.

Muchdi PR dari Gerindra, dan Sabam Sirait. Di teras terlihat Hashim Djojohadikusumo dan Theo Syafei. Kendaraan yang biasa digunakan Megawati juga ada

Grand Hyatt, ma ini menjersi antara PDIP-

(Bersambung k

PERTEMUAN PDIP-P DAN GERINDRA

Tanggal	Kejadian
13 Januari	Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Prabowo Subianto.
16 Maret	Prabowo Subianto menemui Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, untuk silaturahmi politik.
11 April	Megawati bertemu dengan Prabowo untuk membicarakan persoalan pemilu legislatif.
14 April	Megawati-Prabowo bersama sejumlah tokoh politik menyatakan sikap. Pemilu Legislatif 2009 terburuk sepanjang sejarah.
21 April	Megawati dan Prabowo bertemu di Teuku Umar.
22 April	Megawati dan Prabowo bertemu dengan sejumlah purnawirawan TNI di Teuku Umar.
25 April	Prabowo dan Wiyanto hadir dalam Rakernas V PDIP-P di Lenteng Agung.
26 April	Prabowo menemui Megawati di kediamannya.
13 Mei	Tim PDIP-P dan Partai Gerindra melanjutkan pembahasan komunikasi politik.
14 Mei	Hingga pukul 24.00 WIB, kesepakatan koalisi belum tercapai.

KOMPAS, JUMAT, 15 MEI-2009

PDIP-Gerindra Masih Alot

(Sambungan dari halaman 1)

Ditemui di lobi hotel, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung mengatakan, dirinya telah bertemu dengan sejumlah tokoh untuk "mengonkretkan hal yang harus dikonkretkan". "Agar semua hal besok lancar," kata Pramono yang bersikeras tak mau menyebutkan nama tokoh yang ditemuinya. "Dari partai yang perkasa," imbuhnya.

Pramono juga menyebutkan, Megawati sedang bertemu dengan tokoh lain di suatu tempat. "Segera setelah itu kita akan mengambil keputusan," ujarnya.

Sumber-sumber *Kompas* di PDI-P menyebutkan, pertemuan dengan Partai Demokrat itu tidak membuahkan kesepakatan baru.

PKS tidak tolak Boediono

Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie yakin, deklarasi Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Demokrat Jumat ini di Bandung tetap didukung empat partai peserta koalisi. Partai Keadilan Sejahtera, menurut dia, tidak menolak Boediono. Penolakan PKS terutamanya karena tidak adanya komunikasi.

Klarifikasi posisi PKS itu didapat dari komunikasi politik yang secara maraton dilakukan lewat berbagai saluran. Marzuki sendiri ikut dalam pembicaraan dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Menurut dia, tiga utusan khusus Yudhoyono yang memberikan penjelasan kepada PKS soal Boediono adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, Hatta Rajasa, dan Sudi Silalahi. Pertemuan dilakukan di Gedung Bank Mega di Jakarta.

Mengenai tidak diajak bicaranya mitra koalisi saat menetapkan Boediono, Marzuki mengemukakan, hal itu adalah pilihan yang logis dan rasional.

"Tidak mungkin komunikasi dilakukan karena semua partai mengajukan calon. Akan ada konflik dan tidak akan pernah bulat keputusannya. Kami berpikir logis saja," ujar Marzuki.

Partai Demokrat memahami emosi yang muncul dari sejumlah petinggi PKS yang rata-rata masih muda usia. "Penolakan mereka bukan penolakan institusi. Mereka berbicara atas nama individu. Maklumlah, anak-anak muda," ujarnya.

Soal terpilihnya Boediono, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengirim pesan, "Memang kadang-kadang harus memilih 'calon istri' yang tidak terlalu cantik dan

bersama mengurus rumah tangga dengan baik dan berfaedah bagi keluarga besar dan masyarakat."

Tidak gertak

Secara terpisah, Sekjen PKS Anis Matta juga mengatakan hal senada. PKS, menurut dia, tidak menggertak soal koalisi, tetapi hanya menginginkan adanya komunikasi dalam kebersamaan yang indah, seperti yang pernah diungkapkan Yudhoyono.

"Berdasarkan keputusan Majelis Syura sebelumnya, kontrak politik dengan SBY memang harus ditandatangani dulu sebelum koalisi dijalankan," ujarnya.

PKS, menurut Anis, masih mempunyai alternatif lain selain bergabung dalam koalisi dengan Partai Demokrat, yaitu bergabung dengan Jusuf Kalla-Wiranto yang sudah mendeklarasikan diri ataupun membangun blok koalisi baru.

"Memang semuanya masih akan menunggu perkembangan dan hasil pertemuan antara Ustaz Hilmi (Ketua Majelis Syura) dan SBY. Kalau *deadlock*, Ustaz Hilmi diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, PKS sudah melakukan komunikasi politik yang intensif dengan kandidat presiden lain, seperti Megawati atau pasangan JK-Win.

Undangan

Pihak Partai Persatuan Pembangunan sudah menerima undangan deklarasi pencalonan Yudhoyono. Para petinggi PPP, seperti Ketua Umum Suryadharma Ali, Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz berencana hadir dalam deklarasi pencalonan di Bandung, Jumat petang.

Menurut Wakil Sekjen PPP M Romahurmuziy, PPP memastikan akan bergabung dengan Partai Demokrat dengan permintaan agar pola komunikasi dalam koalisi diperbaiki. Sebelum memastikan penandatanganan perjanjian koalisi, perbaikan atas draf perjanjian dituntaskan dulu.

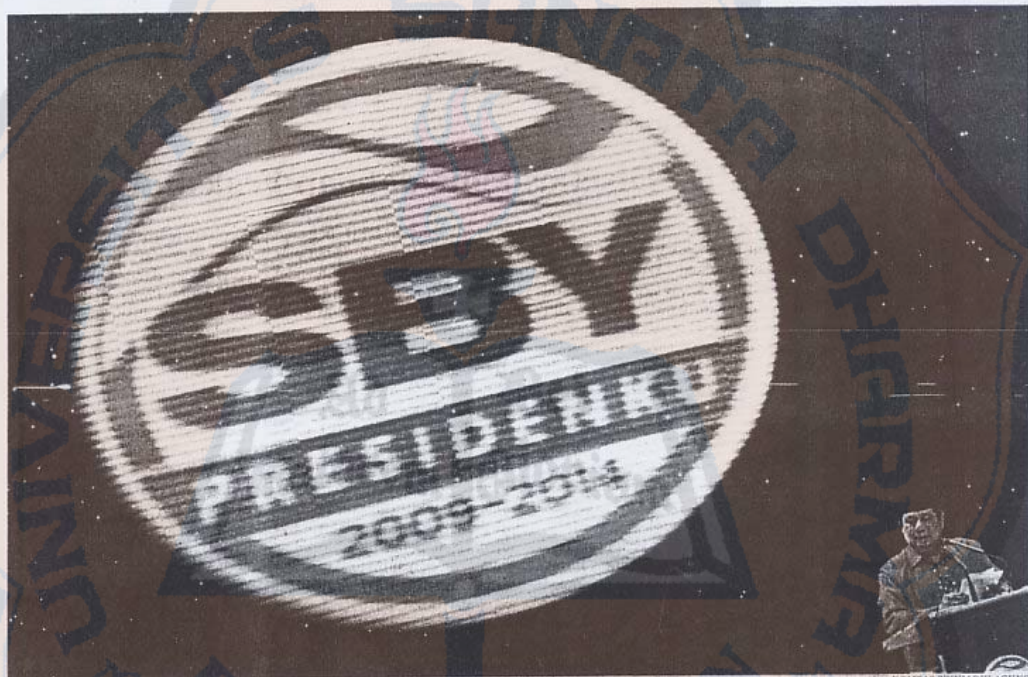
Draf perjanjian yang juga bakal ditandatangani semua parpol mitra koalisi antara lain memuat soal hak dan kewajiban mitra, ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kode etik mitra koalisi, serta komite koalisi.

Atas draf tersebut, PPP masih meminta konfirmasi soal bentuk koalisi, yaitu koalisi parlemen di tingkat pusat saja. Keinginan Demokrat agar koalisi juga mengikat sampai ke level provinsi dan kabupaten/kota sulit direalisasikan karena dinamika politik lokal

KOMPAS SABTU, 16 MEI 2009

Mega-Bowo Siap Tarung

Kedua Partai Kedepankan Ekonomi Kerakyatan



Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan pada acara deklarasi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Jumat (15/5).

JAKARTA, KOMPAS — Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto menyatakan siap bertarung dalam Pemilu Presiden 2009 menghadapi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Setelah melewati tarik ulur yang diwarnai dengan perdebatan alot, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra sepakat untuk berkoalisi.

Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers di Jalan Teuku Umar, Jumat (15/5) menjelang tengah malam. Dalam kesempatan itu, Megawati-Prabowo didampingi Puan Maharani, Theo

Syafei, Pramono Anung, Hashim Djojohadikusumo, Suhardi, dan Fadli Zon.

PDI-P dan Gerindra antara lain bersepakat untuk membangun ekonomi kerakyatan Indonesia serta berkomitmen terhadap NKRI, Pancasila, dan keutuhan bangsa.

"Saya telah mendapat kehormatan yang besar diajak Ibu Megawati untuk mendampingi be-

liau dalam rangka meraih mandat dari rakyat Indonesia sebagai wakil presiden beliau untuk memimpin perubahan, memimpin perbaikan kehidupan bangsa, dan perbaikan ekonomi bangsa," kata Prabowo.

Ia menyebutkan bahwa kedua partai memiliki kesamaan dalam misi dan visi, di antaranya keberpihakan terhadap wong cilik, seperti petani, nelayan, buruh, guru, dan pedagang kecil.

"Karena itulah saya menerima kehormatan besar ini, dan saya bertekad untuk berjuang bersama bangsa Indonesia untuk mengembalikan harkat bangsa ini

Baca Juga
soal Koalisi
Partai

Massa
Mega-Bowo
Loyal

HAL 5

menjadi bangsa mandiri," ujarnya.

Sedangkan Megawati mengakui bahwa kesepakatan tersebut telah melewati perjalanan panjang untuk menyamakan persepsi. "Kami ingin berjuang bersama untuk menjalankan apa yang diinginkan proklamator Bung Karno, yaitu untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Negara kita ini seharusnya dapat kita bangun bersama untuk tujuan mulia," ujarnya.

"Kalau sekiranya saya dapat terpilih menjadi presiden RI

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

KOMPAS, SABTU, 16 MEI 2009

Mega-Bowo Siap Tarung

(Sambungan dari halaman 1)

kembali, dan Bapak Prabowo Subianto sebagai wakil presiden saya, maka dalam penugasan yang akan saya berikan kepada beliau, beliau akan melaksanakan hal-hal yang terkait ekonomi kerakyatan Indonesia," papar Mega.

Megawati juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. "Mulai malam ini kita bekerja sekeras-kerasnya karena hanya dengan bekerja sekerasnya kita dapat menimba kemenangan tersebut," kata Mega.

Baik Megawati maupun Prabowo mengingatkan pemerintah agar pemilu presiden bisa berlangsung jujur dan adil serta semua hal buruk yang terjadi di dalam pemilu legislatif tidak sampai terulang.

Kesepakatan Batutulis

Sepanjang Jumat siang sampai larut malam, PDI-P dan Gerindra melakukan pembicaraan intens di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan *Kompas*, pertemuan kedua partai ini dimulai sejak pukul 15.00.

Megawati didampingi petinggi

PDI-P di antaranya Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani, sedangkan dari pihak Gerindra, selain Prabowo, juga hadir Fadli Zon dan Muchdi PR.

Sebetulnya pada pukul 17.00 kesepakatan sudah tercapai. "Pengumuman akan segera dilakukan di Teuku Umar. Yang didiskusikan tinggal hari dan jam yang baik untuk deklarasi," ujar sumber *Kompas* di PDI-P.

Sempat beredar kabar bahwa konferensi pers akan berlangsung pukul 18.00. Jajaran fungsionaris PDI-P pun mulai berdatangan ke Teuku Umar.

Namun, rupanya perundingan Prabowo-Megawati belum tuntas. Menurut sumber-sumber di PDIP, hal yang paling mengganjal adalah masalah kewenangan Prabowo. Meskipun sudah "menurunkan" tawarannya dari capres menjadi cawapres, Prabowo disebut-sebut ingin posisinya sebagai "wakil presiden plus".

Pukul 21.30 rombongan Prabowo dan Megawati meninggalkan Istana Batutulis menuju Teuku Umar. "Ya, ya, nanti, nanti ke Teuku Umar," kata Prabowo kepada puluhan wartawan yang menunggu di luar pagar istana

sejak sore hari.

PKS ke Demokrat

Setelah secara maraton mengkritik dan keberatan dengan cara-cara Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Boediono sebagai calon wakil presidennya, tiga petinggi Partai Keadilan Sejahtera menemui Yudhoyono di Hotel Sheraton, Bandung, Jawa Barat, Jumat. Mereka adalah Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Tifatul Sembiring, dan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

Mereka bertiga datang sendiri-sendiri sepuluh menit setelah Yudhoyono dan Boediono selesai meninjau Gedung Sasana Budaya Ganesha untuk deklarasi. Pertemuan berlangsung tertutup sekitar satu jam.

Tidak ada keterangan yang muncul dari mereka semua sebelum pertemuan. Mereka semua tergesa-gesa berjalan menuju ruang pertemuan yang ketat dijaga. Mereka semua keluar bersama Yudhoyono dan Boediono dengan iring-iringan kendaraan dengan pengawalan menuju Gedung Sabuga.

Saat tampil ke panggung mewakili PKS untuk pembacaan

deklarasi dukungan partai mitra koalisi untuk pasangan Yudhoyono-Boediono, Anis terlihat mengerutkan dahi.

Amien dan JK

Calon presiden dari Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, Jumat tengah malam, menemui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Kalla datang sendiri. Adapun Amien didampingi antara lain oleh Dradjad Wibowo. Dari informasi yang diterima *Kompas*, pertemuan tersebut menggalang koalisi kedua partai untuk mengusung pasangan capres dan cawapres JK-Wiranto.

Namun, kepada pers Kalla mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak membicarakan koalisi, tetapi membicarakan bagaimana kemandirian ekonomi bisa dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Kalla menerima Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi di Posko Golkar di Jalan Mangunsarkoro.

(EDN/NWO/MAM/
INU/HAR/AIK/ONG)

KOMPAS, MINGGU, 24 MEI 2010

Mantan Presiden Korsel Bunuh Diri

Kekaguman Rakyat Dikotori Tindakan Korupsi

A

SEOUL, SABTU — Mantan Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun, yang tengah diperiksa atas dugaan skandal korupsi semasa berkuasa, diduga bunuh diri dengan meloncat dari ketinggian karang di pegunungan di dekat desa tempat kediamannya. Demikian diungkapkan pembantu dekatnya, Sabtu (23/5).

Media setempat mengutip sebuah catatan yang ditinggalkan Roh, yang memperkuat dugaan bahwa ia memang berniat bunuh diri dengan meminta agar jenazahnya nanti dikremasi dan juga

mengatakan bahwa apabila ia hidup hanya akan menjadi beban banyak orang.

Tindakan bunuh diri ini kemungkinan malah bisa memenangkan simpati terhadap dirinya,

yang saat ini menjadi lawan presiden berkuasa Korsel, penggantinya yang konservatif, Lee Myung-bak. Kebijakan garis keras Lee membongkar hampir semua kebijakan Roh sebelumnya, yang lebih bersikap lunak dan mau berunding dengan Korea Utara serta bisa negosiasi dengan persatuan buruh Korsel yang sering mogok.

"Mantan Presiden Roh meninggalkan rumahnya pukul 05.45 dan ketika tengah melakukan hiking di Pegunungan Ponghwa, tampaknya dia meloncat da-

ri karang sekitar pukul 06.40," kata Moon Jae-in, yang dahulu pernah menjadi tenaga staf kepresidenan Roh, dalam sebuah pernyataan di televisi yang

(Bersambung ke hal 15 kol 1-5)



Roh Moo-hyun

6 Agustus 1946
Roh Moo-hyun lahir di Gimhae, Korea Selatan

Mei 1978 Membuka praktik hukum, membela mahasiswa yang dituduh menghasut di bawah UU militer

25 Februari 2003
Menjabat presiden untuk periode 5 tahun, menggantikan Kim Dae-jung

19 Desember 2007 Mantan Wali Kota Seoul Lee Myung-bak, CEO Hyundai yang menjadi politikus, menang dalam pemilihan presiden

7 April 2009 Mantan ajudan Roh ditangkap atas dugaan menyerahkan pembayaran dari seorang pengusaha yang dituduh menyuap Roh dan anggota keluarganya. Istri Roh mengakui menerima uang dari pengusaha itu

Mei 1975 Lulus ujian pengacara meski tidak pernah mengikuti perguruan tinggi
Sumber: AP

April 1988
Terpilih sebagai anggota Majelis Nasional

19 Desember 2002
Menang tipis pada pemilihan presiden Korea Selatan

Oktober 2007 Roh menggelar KTT di Pyongyang dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il, merupakan pertemuan kedua kali antarpemimpin Korea

25 Februari 2008 Lee mengambil alih kantor kepresidenan menggantikan Roh. Roh kembali ke kota kelahirannya

7 April 2009 Jaksa memeriksa Roh tentang dugaan menerima suap 6 juta dolar AS dari seorang pengusaha ketika masih menjabat presiden

23 Mei 2009 Roh meninggal di Busan. Diduga bunuh diri dengan meloncat dari ketinggian karang

FOTO: AP, PHOTIA, YONHAP GRAFIK: PANDU

KOMPAS, MINGGU, 24 MEI 2009

Mantan Presiden Korsel Bunuh Diri

(Sambungan dari halaman 1)

dipancarkan secara nasional.

Mantan pengacara hak asasi manusia berusia 62 tahun, yang masa lima tahun kekuasaannya berakhir pada Februari 2008, itu dalam beberapa pekan terakhir disulut serentetan pemeriksaan berkaitan dengan dugaan tindak korupsi. Itu buntut dari pengakuan seorang pengusaha sepatu Korsel terkemuka yang mengatakan bahwa ia telah menyuap lusinan pejabat dan politisi, termasuk istri Roh Moo-hyun ketika masih menjadi ibu negara.

Parah di bagian kepala

"Ini sungguh sebuah peristiwa yang sulit dipercaya, sangat disesalkan, dan menyedihkan," kata Lee Myung-bak dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Blue House (Istana Kepresidenan Korsel).

Menurut seorang petugas Rumah Sakit Universitas Busan di kota pelabuhan selatan Korsel di dekat desa kediaman Roh Moo-hyun, tempat ia terakhir dirawat setelah kejadian Sabtu pagi itu, mantan pemimpin Korsel tersebut meninggal akibat cedera parah di bagian kepala.

Selain dikenal sebagai pengacara hak asasi manusia yang otodidak, Roh Moo-hyun juga dikenal sebagai penerus perdamaian mantan Presiden Kim Dae-jung dan merupakan pemimpin Korsel kedua yang pernah melakukan pertemuan tingkat tinggi (KTT) dengan pihak Korut.

Menurut petugas rumah sakit, Roh semula dilarikan ke rumah sakit terdekat di desa kediaman

mantan presiden ini, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Universitas Busan. Ketika tiba di Busan, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari diri Roh. Ia dinyatakan meninggal pada pukul 08.30 waktu setempat. Polisi masih menyelidiki kasus kematian ini.

Roh, yang di luar dugaan bisa memenangi Pemilu Presiden Korsel 2002, meneruskan kebijakan besar kebijakan pendahulu yang digantikannya, peraih Nobel Perdamaian, Kim Dae-jung—termasuk di antaranya upaya memenangkan pertikaian dengan Korut melalui bantuan tanpa syarat.

Akan tetapi, ketika sudah tak berkuasa lagi, Roh dan banyak kebijakannya menjadi tidak populer. Lee Myung-bak memenangkan perebutan kursi kepresidenan dengan kemenangan telak dengan berjanji akan membongkar semua program pemerintahan sebelumnya yang cenderung ke kiri. Termasuk di antaranya bersikap baik hati terhadap negeri tetangga sesaudara yang kian miskin, Korut.

Seoul-Pyongyang

Selain dikenal sebagai pengacara hak asasi manusia yang otodidak, Roh Moo-hyun juga dikenal sebagai penerus perdamaian mantan Presiden Kim Dae-jung dan merupakan pemimpin Korsel kedua yang pernah melakukan pertemuan tingkat tinggi (KTT) dengan pihak Korut.

Sebaliknya, setelah Lee

Myung-bak berkuasa selama 15 bulan terakhir, hubungan antara Seoul dan Pyongyang seperti menjadi beku. Apalagi belakangan ini Pyongyang (Korut) tegas menyatakan rencana mereka akan melakukan uji coba nuklir yang kedua setelah mereka meluncurkan roket bulan lalu.

Lee, yang mantan pengusaha itu, juga berjanji akan bersikap lebih keras lagi terhadap persatuan buruh Korsel yang militan, juga terhadap pihak oposisi di parlemen, dengan apa yang Lee namakan sebagai sebuah reformasi ketenagakerjaan melalui parlemen, bulan ini.

Menurut pemerintah, reformasi ketenagakerjaan ini akan lebih membawa fleksibilitas yang dibutuhkan guna mengatasi kemerosotan ekonomi akhir-akhir ini. Namun, persatuan buruh Korsel menanggapi gelagat bahwa tindakan pemerintah ini hanya akan mengembosi kekuasaan persatuan buruh.

Kematian (Roh) ini diharapkan akan memancing simpati pada partai-partai liberal, yang tentu mengurangi dukungan terhadap pemerintahan konservatif yang berkuasa," ungkap Choi Jin, Ketua Institut untuk Kepemimpinan Presiden.

Menurut Choi, hal ini bisa memicu serikat buruh, meningkatkan aksi protes mereka terhadap pemerintah konservatif yang sekarang berkuasa.

Dinodai tindak korupsi

Meski Roh Moo-hyun dalam beberapa hal dikagumi lantaran

setidaknya membawa pemerintahan yang dahulu relatif bersih, belakangan ini kegagungan itu mulai dilunturkan dengan serangkaian tindak penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan Korsel, menyangkut dugaan tindak korupsi yang dilakukan Roh semasa berkuasa.

Bulan lalu, pihak kejaksaan Korsel telah menginterogasi mantan Presiden Korsel ini selama 13 jam tentang dugaan ia menerima suap senilai 6 juta dollar AS dari seorang pengusaha sepatu. Sebuah dakwaan yang sangat membuatnya terpukul.

"Saya tak punya muka lagi terhadap rakyat. Saya minta maaf telah mengecewakan Anda semua," demikian Roh pada 30 April 2009 sebelum diperiksa jaksa penuntut umum. Meski demikian, Roh membantah tuduhan yang dia lakukan.

Roh hanya mengaku bahwa memang pengusaha sepatu lokal, Park Yeon-cha, memberi istrinya uang senilai 1 juta dollar AS, tetapi itu bukan uang suap. Roh juga mengaku tahu Park memberi 5 juta dollar AS lagi untuk kerabatnya, tetapi ia pikir itu untuk investasi. Sementara menurut tuduhan para jaksa, uang 6 juta dollar AS itu mengalir ke Roh.

Sejumlah orang terdekat Roh pun kini tengah menjalani pemeriksaan. Diduga, mereka juga kecipratan uang yang diduga diterima Roh. Roh sendiri, Desember tahun lalu, dinyatakan terbukti menerima suap—terpisah dari kasus pengusaha

sepatu ini—serta menghindari pajak.

Belum lagi abang kandung Roh yang sudah dijatuhi hukuman penjara empat tahun oleh pengadilan Korsel dalam sebuah kasus skandal suap lain lagi.

"Saya tidak bisa membayangkan betapa banyak penderitaan di sana. Sepanjang sisa hidup saya hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lantaran saya sekarang tidak sehat. Membaca pun tak bisa, apalagi menulis," kata Roh dalam catatan terakhirnya yang ditemukan di komputer.

"Jangan bersedih. Bukankah hidup dan mati itu bagian dari alam? Jangan menyesali atau menuduh siapa pun. Ini memang nasib. Tolong kremasikan saya. Dan taruh di batu nisan kecil di dekat rumah saya. Saya sudah lama memikirkan itu," ungkap Roh.

Menurut media setempat, meski kasus dugaan suap yang dilakukan Roh Moo-hyun itu mengguncang perasaan rakyat Korsel, sepertinya mereka menyalakan tempat bagi Roh di hati mereka.

Chun Soon-im (63), warga Seoul, ketika ditanya komentarnya soal Roh yang diduga bunuh diri karena penyesalannya ini mengatakan, "Penyelidikan memang harus terus dijalankan dan kita harus mendapatkan kebenaran. Akan tetapi, saya memang merasa iba terhadap mereka yang ditinggalkannya."

(AP/REUTERS/SHA)

KOMPAS SENIN, 25 MEI 2009

2009, 76 Anggota TNI Tewas

Kecelakaan Kian Sering, Perlu Kebijakan Drastis

JAKARTA, KOMPAS — Kecelakaan yang terjadi dan menimpa berbagai jenis peralatan utama sistem persenjataan milik Tentara Nasional Indonesia kian sering terjadi. Bahkan, sepanjang tahun 2009 saja, dari data *Kompas*, tercatat sudah 76 anggota TNI tewas dalam kecelakaan terkait persenjataan TNI.

Tak hanya dari awak peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) dan prajurit TNI, korban jiwa juga berjatuh dari kalangan sipil, baik penumpang maupun warga yang ikut terkena dampak kecelakaan, seperti terjadi saat pesawat TNI AU jenis Hercules C-130/A-1325 jatuh di Magetan, Jawa Timur, pekan lalu.

Kondisi semacam itu dikhawatirkan bukan tidak mungkin semakin menjatuhkan moral prajurit TNI, dan ditakutkan makin mengikis kebanggaan prajurit sebagai TNI, termasuk keinginan generasi muda berkarier di bidang kemiliteran. Belum lagi kerugian akibat hilangnya alutsista dan sejumlah prajurit yang cacat.

Kekhawatiran itu terungkap dalam perbincangan *Kompas* dengan pemerhati militer Andi Widjojanto dan Direktur Eksekutif Propatria Institute Hari T Prihartono secara terpisah, Sabtu (23/5) di Jakarta. "Jika pemerintah berani mengambil langkah drastis mereduksi senjata tua TNI, tahun 2009-2014 saya berani pastikan uang yang justru bisa dihemat setidaknya Rp 15 triliun-Rp 20 triliun. Ini dapat dialihkan untuk membeli senjata

baru atau meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI," papar Andi.

Hitung-hitungan itu dibuat dengan asumsi kondisi perekonomian Indonesia dalam lima tahun mendatang kian membaik sehingga alokasi anggaran pertahanan 2009-2011 juga dinaikkan 10 persen per tahun. Pada periode 2012-2014 kenaikannya mencapai 15 persen.

Dengan asumsi itu, diperkirakan pula alokasi anggaran untuk pengadaan alutsista baru mencapai Rp 83 triliun ditambah sekitar 4 miliar dollar Amerika Serikat, yang dapat diperoleh dari fasilitas kredit negara, pinjaman luar negeri, atau *foreign military sales*.

"Jadi, total anggaran pengadaan yang bisa diperoleh setelah reduksi senjata tua berusia di atas 30 tahun dalam 2009-2014 mencapai Rp 100 triliun-Rp 120 triliun. Memang masih harus dikurangi Rp 3 triliun-Rp 4 triliun untuk biaya membuang senjata tua untuk dua tahun pertama," papar Andi.

Andi menambahkan, langkah reduksi persenjataan tua adalah kebijakan biasa, yang dilakukan negara lain. Indonesia sudah tiga kali melakukan kebijakan itu pa-

da masa Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia TB Simatupang era 1950-an.

Presiden Soeharto melakukan hal serupa tahun 1971-1976 saat membuang persenjataan tua buatan eks Uni Soviet. Panglima ABRI Jenderal (Purn) LB Moerdani pun melakukan kebijakan serupa dalam tiga tahun di era 1980-an.

Mau pakai yang mana?

Ditemui terpisah, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan, tak mudah menerapkan kebijakan drastis mereduksi persenjataan berusia tua milik TNI. Semua pihak pun diminta tidak dengan gampang berspekulasi dan mengaitkan penyebab kecelakaan alutsista, apalagi menghubungkannya dengan usia alutsista.

Menurut Juwono, dalam kondisi apa pun dan berapa pun alokasi anggaran pertahanan yang mampu diberikan pemerintah, baik Departemen Pertahanan maupun TNI harus mempertahankan lima prinsip dasar, terutama terkait jaminan

(Bersambung ke hal 15 kol 1-3)

KOMPAS, SENIN, 25 MEI 2009

2009, 76 Anggota TNI Tewas

(Sambungan dari halaman 1)

kecukupan dan kemampuan kesiapan operasional, penanganan masalah aktual seperti dalam menghadapi daerah konflik, dan kesiapsiagaan operasional.

"Selain itu, berapa pun besarnya anggaran yang diberikan, jaminan pemeliharaan profesionalitas prajurit TNI, pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan prajurit harus bisa dipenuhi. Jika dengan alasan senjata tua mau direduksi, nanti TNI dalam menjalankan kewajibannya mau memaknai yang mana?" ujarnya.

Namun, pemerintah tetap memastikan alokasi anggaran yang minim tidak akan berpengaruh terhadap kelaikan alutsista yang digunakan. Caranya dengan memprioritaskan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada dengan jumlah persenjataan yang akan digunakan.

Juwono memisalkan, jika alokasi anggaran hanya cukup untuk menyiapsiagakan 5 dari 10 pesawat angkut yang ada, TNI hanya akan menggunakan dan memaksimalkan pengaktifan 4 pesawat angkut dengan tetap menerapkan standar keselamatan tinggi. "Untuk sementara kita mengorbankan jumlah (kuantitas)-nya, tetapi secara kualitas alutsista yang digelar untuk operasional tetap tingkat keselamat-

annya tinggi," katanya lagi.

Langkah reduksi alutsista TNI berusia tua juga tak mudah dilakukan lantaran, kata Juwono, tidak semudah meminta negara lain atau pihak produsen membeli kembali (*buy back*) produk tertentu, apalagi jika suku cadang tersedia di pasar dunia.

Juwono juga meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan penyebab tiga kecelakaan, yang terjadi dalam waktu hampir berdekatan, seperti kecelakaan pesawat Fokker 27 seri A-2703 di Bandung, Jawa Barat, kecelakaan Hercules C-130 di Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dan terakhir di Magetan.

Penurunan moral

Hari meyakini, pascabeberapa kali kecelakaan pesawat TNI tahun ini, kondisi prajurit TNI mengalami penurunan psikologis (*psychological down*) akibat kegerian mereka dapat menjadi korban. "Kebijakan radikal dan solusi konkret harus segera diambil, yang semuanya harus didasari realitas obyektif dari akar persoalan yang dihadapi. Boleh dibilang 10 tahun reformasi sektor keamanan sekarang gagal menuntaskan persoalan mendasar," ujar Hari.

Mantan Panglima Komando Udara Pertahanan Nasional Marsekal Madya (Purn) Djoko Poer-

woko menambahkan, salah satu unsur utama untuk menjaga kualitas dan usia operasi pesawat terbang adalah perawatan. Selain itu, mutu dan kualitas suku cadang yang digunakan juga tidak boleh berbeda dengan spesifikasi yang diharuskan. Langkah itu tidak hanya sangat penting, tetapi juga vital karena terkait dengan persoalan keamanan personel dan penumpang.

Pengamat penerbangan Dudy Sudibyo menambahkan, Garuda Indonesia menyisihkan 30 persen dari anggaran yang dimiliki untuk biaya merawat pesawatnya. Jumlah itu masih didukung dengan ketersediaan suku cadang pesawat senilai lebih dari 21 juta dollar AS.

Djoko menambahkan, TNI AU sebaiknya berani berhemat dan menyisihkannya untuk perawatan. Ada biaya yang dapat dihemat melalui proses penghitungan jam terbang.

"Saat ini di Indonesia masih digunakan sistem penghitungan *block on-block off*, yaitu jam terbang dihitung mulai dari saat mesin pesawat dihidupkan hingga mesin pesawat dimatikan," kata Djoko. Padahal, saat ini dunia mengenal sistem lain, yaitu jam terbang dihitung mulai dari saat pesawat lepas landas hingga mendarat. Ini memengaruhi usia pesawat. (DWA/JOS)

KOMPAS RABU, 27 MEI 2009

Koordinasi Pemerintah Semakin Lemah

Anggota Kabinet Mulai Terpolarisasi

JAKARTA, KOMPAS — Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama berkompetisi untuk merebut kursi RI-1 pada Juli mendatang, koordinasi di antara keduanya semakin lemah. Hal itu juga tercermin dalam hubungan di antara anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

Sejak pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 Mei 2009, tidak ada lagi rapat bersama yang dipimpin Presiden bersama Wapres di Kompleks Istana Kepresidenan. Pertemuan terakhir Presiden dan Wapres adalah saat rapat koordinasi kabinet dengan gubernur pada 1 Mei 2009.

Yudhoyono yang telah menyatakan diri maju sebagai calon presiden bersama Boediono lebih kerap menggelar rapat koordinasi dengan para pembantunya di kediamannya, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.

Sedangkan Kalla yang juga telah menyatakan diri maju sebagai capres bersama Wiranto memilih menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Istana Wapres.

Di Cikeas, Yudhoyono kerap menggelar rapat koordinasi tentang perkembangan ekonomi. Terakhir, Senin (25/5), Yudhoyono

no mengundang Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perencanaan/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk memberikan laporan. Hatta merupakan Ketua Tim Sukses SBY-Boediono. Sri Mulyani juga hadir dalam deklarasi SBY-Boediono di Gedung Sabuga, Bandung.

Pada hari yang sama, Kalla menggelar rapat di Istana Wapres. Hadir antara lain Menteri Perhubungan Jusman Safie'i Djamil, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

Kalla sibuk

Saat ditanya tidak adanya lagi rapat-rapat koordinasi di Istana Kepresidenan yang dipimpin Yudhoyono dan melibatkan Kalla, Juru Bicara Kepresidenan

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

Sejumlah Aktivitas Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berkompetisi dalam pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Pertemuan terakhir kedua pemimpin ini pada 12 Mei 2009 saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2009 di Jakarta.

Presiden	Tanggal	Wakil Presiden
Meresmikan gedung Grand Kawanua Convention Centre di Manado	13	Mengunjungi pondok pesantren dan bersilaturahmi dengan ulama di Jawa Timur
Deklarasikan sebagai capres di Bandung	15	Hari ulang tahun ke-67 dan mengunjungi Pasar Tanah Abang
Mendaftarkan diri sebagai capres ke KPU	16	Mendaftarkan diri sebagai capres ke KPU
Pemeriksaan kesehatan di RSPAD, Jakarta	18	Dialog dengan Kadin
Menerima kunjungan kenegaraan amir negara Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, di Istana Merdeka, Jakarta	19	Menerima Sultan HB X, deklarasi di Monumen Josia Kembali, mengunjungi Pasar Beringharjo Yogyakarta, dan mengunjungi pondok pesantren di Kraoyak, Bantul
Menyambut kedatangan 14 jenazah korban jatuhnya pesawat C-130 Hercules di Lahad Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan kunjungan kerja ke Jawa Timur	21	Meninjau Pasar Johar, Semarang
Meninjau Jembatan Suramadu, bertemu dengan sejumlah kiai dari Jatim di Surabaya, acara keluarga di Istana Tempeksiring	22	Mengunjungi PT Pindad, Bandung
Mengunjungi Pasar Seni Tradisional Sukawati, Bali, dan menghadiri Konferensi Kelima Perkumpulan Guang Dong Sedunia di Kemayoran, Jakarta	24	Dialog Kebudayaan di Gedung Kesenian Jakarta
Meninjau fasilitas perumahan dinas anggota Paspampres di Bogor dan menerima Jam'ah dan Ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah di kediamannya	25	Menerima 10 mantan petinggi TNI di Jakarta
Menghadiri peringatan puncak Hari Pendidikan Nasional di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat	26	Melantik Tim Sukses Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Sumber: Utang Kamas

FOTO: KOMPAS WISNU SUKURHO, GRAFIR, HESTADI

KOMPAS, Rabu, 27 Mei 2009

Koordinasi Pemerintah Semakin Lemah

(Sambungan dari halaman 1)

Andi Mallarangeng mengatakan, "Belum saja waktunya. Itu di Musrenbang sama-sama (SBY-Kalla). Mungkin lagi sibuk masing-masing. Pak JK lagi sibuk ke luar kota."

Andi membantah tuduhan tidak dilibatkannya Kalla dalam mengelola tugas-tugas kenegaraan bersama Yudhoyono. Menurut dia, tugas-tugas Kalla sebagai wapres tetap diberikan.

"Ada rapat-rapat kabinet di mana Pak JK hadir. Rapat paripurna pastilah. Rapat-rapat terbatas dari dulu juga begitu. Kalau ada kebutuhan beliau hadir, ya hadir. Kalau tidak, ya hanya Presiden. Tetapi yang jelas mari kita pegang teguh Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 4 Ayat 2 UUD 1945," ujarnya.

Selain soal rapat dan kerja mengelola negara yang terkesan tanpa koordinasi, Yudhoyono dan Kalla juga seperti berlomba-lomba membuat aksi untuk kepentingan Pemilu Presiden 2009.

Saling menyindir terjadi sejak komitmen untuk berkompetisi dinyatakan. *Tagline* Kalla, "lebih

cepat lebih baik", dibalas Yudhoyono dengan "jangan takabur".

Kalla bantah

Jusuf Kalla menepis sinyalemen bahwa aparat pemerintahan berjalan sendiri-sendiri. Meski dirinya bersama Presiden Yudhoyono sudah menjadi capres dan sejumlah menteri menjadi anggota tim sukses, kegiatan pemerintahan tetap berjalan.

"Ah, tidaklah itu (jalan sendiri-sendiri). Kami tetap jalan dan tetap komit untuk bersama hingga akhir pemerintahan," kata Kalla di Lampung, Selasa. "Kalau kami pergi (sendiri-sendiri), itu karena wilayah negara kita sangat luas," lanjutnya.

Para anggota kabinet juga seperti terpolarisasi. Dari informasi yang diterima *Kompas*, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah cukup lama tidak menghadiri undangan rapat terbatas yang dipimpin Kalla di Istana Wapres.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani semalam menyatakan, dirinya menjalankan tugas sesuai dengan aturan. "Saya tetap menjalankan tugas-tugas sebagai menteri sesuai dengan aturan

dan asas-asas norma yang ada," ujarnya.

Sedangkan Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Win disebut-sebut tidak lagi "diundang" untuk rapat oleh Presiden. Oleh sebab itu, Fahmi lebih banyak "mengikuti" Kalla.

Rencananya, Rabu ini Presiden Yudhoyono akan memimpin sidang kabinet paripurna mengenai Rancangan Kerja Pemerintah 2010 di Kantor Presiden. Sebelumnya, di Istana Negara, pemerintah menjadi tuan rumah Rapat Konsultasi DPR-Pemerintah. Kedua acara itu akan dihadiri Wapres Kalla dan para menteri.

Tidak efektifnya pemerintahan belum berpengaruh banyak terhadap rakyat. Itu karena dalam 11 tahun terakhir kelangsungan kehidupan rakyat lebih ditentukan oleh jaringan sosial serta ekonomi yang mereka miliki dan bukan jaringan pemerintahan.

"Selama ini, yang menyelamatkan kita sebagai bangsa adalah kuatnya tertib ekonomi dan sosial," kata pengajar Sosiologi Universitas Airlangga, Daniel

Sparringa, Selasa.

Kuatnya tertib ekonomi ini, lanjut Daniel, terlihat dari besarnya keinginan dan usaha masyarakat untuk tetap bekerja dan berusaha agar bisa terus hidup. Sedangkan tertib sosial terlihat dari adanya jaringan sosial dan norma hidup yang mengikat dan menuntun masyarakat untuk hidup berdampingan.

Tamrin Amal Tomagola, sosiolog dari Universitas Indonesia, menambahkan, kehadiran pemerintahan hanya dirasakan saat mereka membuat kebijakan penting yang menyangkut kehidupan rakyat luas, seperti menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar minyak.

Peran pemerintahan dalam kehidupan rakyat makin berkurang ketika apa yang dipikirkan rakyat berbeda dengan yang digelisahkan oleh elite politik. "Akibatnya, kegiatan seperti pemilu lebih menjadi urusan elite politik dan bukan rakyat," kata Tamrin.

Menurut Tamrin, hal itu tidak akan terjadi jika elite politik dan partai politik memiliki ideologi dan keberpihakan yang jelas.

(INU/HAR/NWO)

KOMPAS KAMPIS, 28 MEI 2009

Panitia Angket Didorong

Demokrat Nilai F-PAN, F-PPP, dan F-KB Tak Elok

JAKARTA, KOMPAS — Selepas persetujuan DPR atas penggunaan hak angket mengenai pelanggaran hak konstitusional rakyat untuk memilih pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/5), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong agar Panitia Angket segera dibentuk.

Diharapkan pada Selasa (2/6) Rapat Paripurna DPR sudah bisa mengesahkan keanggotaan Panitia Angket agar panitia dapat selekasnya bekerja.

Hasto Kristiyanto, Yasonna H

Hak Angket DPR 1999-2009

Masa Pemerintahan: B.J. Habibie ■ Megawati Soekarnoputri ■ Susilo Bambang Yudhoyono

Tanggal	Kasus	Pengusul	Hasil
25 Agustus 1999	Kasus: Skandal Bank Bali	11 anggota DPR	
21 Januari 2002	Kasus: Dana nonbudgeter Bulog II	50 anggota DPR	
3 Maret 2005	Kasus: Kenaikan harga BBM	31 anggota	*6 fraksi menolak, 2 fraksi (F-PAN dan F-KB) tidak tegas
31 Mei 2005	Kasus: Lelang gula impor ilegal	16 anggota	*6 fraksi menolak, 3 fraksi menerima, dan 1 fraksi tidak tegas menyatakan menerima/menolak
3 Juni 2005	Kasus: Kredit macet Bank Mandiri	50 anggota	
7 Juni 2005	Kasus: Penjualan tanker milik Pertamina		*Rapat Paripurna DPR secara aklamasi menerima usulan penggunaan hak angket
24 Januari 2006	Kasus: Impor beras	106 anggota	*Dalam rapat paripurna 184 anggota menolak, 151 mendukung hak angket, dan 107 mendukung hak interpelasi
24 Juni 2006	Kasus: Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM	117 anggota	*Rapat Paripurna DPR dihadiri 360 anggota DPR, sebanyak 233 anggota mendukung angket dan 127 menolak
17 Februari 2009	Kasus: Penyelenggaraan ibadah haji	122 anggota	*Rapat Paripurna DPR diutuskan 122 anggota DPR dari 8 fraksi
27 April 2009	Kasus: Pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif	22 anggota	*Diutuskan 22 anggota 6 fraksi

PANITIA

Laoly, dan Gayus Lumbuan dari F-PDIP dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, menyatakan, F-PDIP menyadari adanya kemungkinan tarik-menarik dalam Panitia Angket nanti. Namun, Hasto menekankan, fraksi yang nyata-nyata menolak penggunaan hak angket seharusnya menyadari posisi mereka. "Diharapkan pimpinan yang proangket," ujar Hasto.

Gayus menyebutkan, lewat Panitia Angket harus dapat ditemukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal halangnya hak pilih rakyat pada pemilu lalu. Undang-undang menjamin bahwa penyelidikan lewat angket tidak terhalangi berakhirnya masa jabatan DPR. Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang atau pembubar-

an DPR yang membentuknya sampai DPR baru menentukan lain. Panitia Angket juga punya hak untuk memanggil siapa pun yang dianggap perlu dihadirkan.

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

KOMPAS, KAMIS, 25 MEI 2009

Panitia Angket Didorong

(Sambungan dari halaman 1)

Laoly menegaskan, pemerintah tak bisa lepas tanggung jawab soal keserawutan data pemilih. Sumber data pemilih, daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4), bersumber dari pemerintah. Padahal, dalam pembahasan RUU Pemilu, kesiapan pemerintah sudah dipertanyakan. Masalah yang masif menimbulkan kecurigaan, hal itu bukan sekadar kecerobohan, tetapi disengaja. "Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum siap-siap untuk diaudit atau diinvestigasi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, pemerintah tidak mengkhawatirkan hak angket yang telah disetujui DPR itu akan menjadi bola liar yang mengarah pada *impeachment* terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Pasalnya, KPU akan dapat menjelaskan persoalannya dengan baik," katanya.

Anggota KPU, Andi Nurpati Baharuddin, mengatakan, KPU siap bila diminta keterangan. "Ja-

di, kita lihat dulu, apakah KPU termasuk pihak yang diundang untuk memberikan keterangan. KPU harus siap memberikan penjelasan karena memang ada peran KPU dalam DPT (daftar pemilih tetap) walaupun tidak 100 persen," katanya.

Sementara itu, DPP Partai Demokrat menilai sikap Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa tak elok karena ikut menyetujui penggunaan hak angket tentang pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih.

"Bukan saja karena tengah dan terus akan membangun koalisi, tetapi juga karena amat jelas bahwa kewenangan DPT ada pada KPU," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dosen Politik dan Kebijakan Publik Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago, berpandangan, kalau F-Partai Golkar, F-PPP, dan F-PAN tak bisa menjelaskan alasan kuat persetujuan penggunaan angket, hal itu bisa memukul

balik partai. "Partai Golkar yang ketua umumnya adalah wakil presiden akan diminta tidak lari dari tanggung jawab. Begitu juga PPP dan PAN," ucapnya.

Namun, menurut Juru Bicara Komite Advokasi Suara Rakyat Adhie M Massardi, disetujuinya penggunaan hak angket itu jangan dilihat sebagai cermin pecahnya koalisi parpol pengusung Yudhoyono-Boediono atau pecahnya koalisi pemerintahan saat ini, terutama antara Partai Demokrat dan Partai Golkar.

"Hak angket merupakan hak politik DPR untuk menyelidiki persoalan yang tidak bisa diungkap oleh mekanisme hukum biasa. Jadi, bukan urusan koalisi karena koalisi hanya mengatur mekanisme dan porsi pembagian kekuasaan," ujar Adhie.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, penggunaan hak angket itu lebih ditujukan untuk menakar tanggung jawab KPU dalam menjalankan tugas.

"Penggunaan hak angket ini sebagai kritik terhadap KPU ka-

rena DPT itu memang kewenangan KPU. Jadi, angket tentang DPT itu menyangkut kontrol DPR terhadap KPU sebagai sasarannya," ujar Muhaimin.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan, proses angket ditindaklanjuti secara serius oleh DPR karena hal ini menyangkut penghilangan hak asasi rakyat.

Hal tersebut sangat penting bagi proses demokrasi. Terlebih, dalam Pemilu Legislatif 2009 ada indikasi bahwa DPT dimanipulasi untuk mendukung kemenangan parpol atau calon tertentu. "Dalam konteks angket, yang paling penting DPR segera menindaklanjuti, jangan lama-lama," kata Jeirry.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Daniel Zuchron, pengajuan hak angket DPR itu tak akan mampu menyelamatkan suara rakyat yang memiliki hak pilih, tetapi tak terdaftar.

(SIE/SUT/DIK/NWO/
DAY MZW/SIE/HAR)

KOMPAS, MINGGU, 31 MEI 2009

Mega-SBY Jabat Tangan

(Sambungan dari halaman 1)

Yudhoyono dan Megawati yang selalu ditunggu banyak orang. Bagi keduanya, pertemuan di muka umum di KPU ini pertama kalinya sejak Pemilu 2004. Yudhoyono dan Megawati sempat bersalaman dua kali, yakni sebelum dan sesudah pengundian.

Terlihat suasana berbeda saat Megawati bertemu Yudhoyono dan saat Megawati bertemu Kalla. Saat Megawati dan Yudhoyono berjumpa, mereka hanya bersalaman dan tidak saling bertegur sapa. Sebaliknya, pertemuan Megawati dengan pasangan capres-cawapres Kalla dan Wiranto serta Boediono terlihat hangat.

Megawati dan Kalla malah saling cium pipi kiri dan kanan, selain berjabat tangan dan bertegur sapa. Begitu juga Megawati dan Wiranto. Sedangkan dengan Boediono, Mega hanya bersalaman dan sempat berbincang sejenak.

Adapun Prabowo Subianto sebelum bersalaman dan berpelukan dengan Wiranto dan Yudhoyono menyempatkan memberikan sikap hormat militer kepada keduanya.

Kemurahan terlihat ketika semua pasangan capres telah mendapat nomor urut. Semua pendukung dari setiap pasangan capres dan cawapres menerima angka nomor urutnya. Pendukung pasangan JK-Wiranto bahkan sudah menyiapkan sejumlah poster yang bertuliskan angka 3. Mereka menyiapkan poster-pos-

ter bergambar JK-Wiranto dan bertuliskan angka satu sampai tiga.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengingatkan kepada semua pasangan capres-cawapres untuk tidak berkampanye di luar waktu yang sudah ditentukan KPU. Partai politik pengusul pasangan capres-cawapres tidak boleh menarik calonnya, serta capres-cawapres juga tidak boleh mengundurkan diri. Bila parpol menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka tidak boleh diganti.

Soal nomor

Yudhoyono menyambut gembara nomor urut dua pasangan dirinya dan Boediono pada Pemilihan Presiden Juli mendatang. "Yang memilihkan nomor kita adalah Tuhan yang Mahakuasa," ujar Yudhoyono di hadapan sekitar 2000 anggota tim kampanye nasional dan daerah dari Partai Demokrat dan koalisi 23 partai lainnya di Arena PRJ Kemayoran.

Yudhoyono menuturkan, ia meyakini nomor urut berapa pun yang didapat bisa membawa keberuntungan. "Nomor berapa pun nanti yang akan kita dapat adalah *barokah* dari Allah dengan catatan kita bersyukur, langsung berzikir, berdoa, mohon kepada Tuhan agar dengan nomor yang simbolik diperlukan dalam pilpres dan wapres ini betul-betul kita berhasil dan kita menang terhormat," ujarnya.

Soal nomor juga disampaikan pasangan JK-Wiranto. Kepada pers, Kalla menyatakan tidak terlaru mempersoalkan.

"Pada dasarnya semua nomor baik. Apalagi, kalau nomor tiga. Bukannya nomor tiga justru nomor yang lebih tinggi daripada nomor satu dan nomor dua. Nomor itu, juga, kan hanya tanda untuk membedakan dengan peserta yang lainnya," ujar Kalla.

Sebelum datang ke KPU, pendukung JK-Wiranto sudah menyiapkan tiga poster dengan nomor urut yang berbeda sehingga saat nomor urut undian ditetapkan, pasangan ini yang satu-satunya sudah mengacung-acungkan poster nomor urut pasangannya. Pendukung dua pasangan lainnya hanya mengacungkan jari tangan.

Dalam kaitan nomor urut, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, meminta masyarakat tidak terperangkap pada masalah-masalah yang bersifat irasional macam penerjemahan nomor-nomor urut para calon presiden dan calon wakil presiden serta bisa lebih memfokuskan diri pada visi, misi, dan program para kandidat.

Ikrar juga mengingatkan, dalam masa kampanye nanti para anggota tim sukses juga diminta untuk sama-sama menahan diri dan tidak mengulangi lagi aksi saling serang mereka seperti sempat terjadi sebelumnya. Tindakan macam itu, menurut Ikrar, bisa memperumit situasi.

"Masyarakat kita ini kan masih senang dengan hal-hal yang irasional macam menerjemahkan arti simbol atau angka nomor urut tadi seolah ada arti tertentu di baliknya. Padahal, nomor ya nomor saja. Tidak usah dikaitkan dengan figur pasangan," ujar Ikrar.

Ikrar juga mengingatkan, aksi saling serang dan aksi tidak etis lain, terutama yang dilakukan oleh antartim sukses, yang mengarah pada kampanye hitam terhadap sosok kandidat tertentu, seharusnya tidak perlu ada.

Dia menganggap aneh, misalnya, beberapa anggota tim sukses, yang kemarin melakukan penyerangan, beralasan hal itu dilakukan untuk bereaksi atas serangan terhadap figur yang dia dukung.

"Perlu diingat ya, serangan terhadap capres Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya terkait isu seperti busana muslim para istri setiap kandidat kan justru asalnya dari dalam lingkungan anggota koalisi partai politik pendukung pasangan Yudhoyono-Boediono sendiri, kan?" ujar Ikrar.

Dengan begitu, Ikrar mengharapkan dalam masing-masing internal tim sukses dan para kandidat sendiri harus mampu saling mengingatkan ke dalam. Jika tidak, masyarakat akan melihat terjadi blunder dalam politik di mana salah satu kandidat meminta pihak lain santun dan tidak menyerang tetapi hal itu malah dilakukan sendiri oleh tim suksesnya.

sesnya.

"Aksi saling serang dalam kampanye politik bukanlah sesuatu yang haram sepanjang hal itu memang dilakukan secara proporsional. Misalkan terkait masalah kebijakan, program, atau juga termasuk soal rekam jejak seseorang. Tetapi jangan dilarikan ke soal individual dan keluarga," ujar Ikrar.

DPT pilpres

Sementara itu, KPU merencanakan akan mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 31 Mei sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, KPU dapat menetapkan DPT pada satu bulan sebelum hari pemungutan suara atau 8 Juni.

"Tetapi undang-undang juga mengatur bahwa pemutakhiran data pemilih selama 30 hari. Jadi kita harus menetapkan DPT. Selain itu, KPU juga harus segera melaksanakan pengadaan dan distribusi surat suara yang waktunya hanya kurang dari satu bulan," kata Abdul Hafiz Anshary.

Menurut dia, sebelum menetapkan DPT, KPU akan mendengarkan laporan dari seluruh KPU provinsi pada Sabtu sore. "Hari ini sinkronisasi semua daerah, setiap KPU provinsi akan memaparkan berapa jumlah pemilih di setiap kabupaten/kota. Ini bukan penetapan, tetapi rekapitulasi," kata Hafiz.

(HAI/DAY/SIE/DWA)

SENIN PAHING 4 MEI 2009 (9 JUMADILAWAL 1942)

Lagi, Dibongkar Pabrik Sabu

30 Kg Senilai Rp 60 Miliar Siap Edar

JEPARA (KR) - Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polda Metro Jaya, Minggu (3/5) menggerebek sebuah rumah mewah di Jepara yang digunakan sebagai pabrik tempat memproduksi sabu-sabu. Dari TKP di Jalan Cik Lanang RT 04/RW 05 Kelurahan Kauman Kecamatan Kota, polisi berhasil mengamankan 30 kilogram sabu siap edar senilai Rp 60 miliar. Barang bukti lain yang disita yaitu selang, tabung bejana dan bahan pembuatan sabu.

Penggerebekan dipimpin Direktur Narkoba Polda Jateng Kombes (Pol) Harwiyanto dan Direktur Narkoba

Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Armand Depari. Tim gabungan menangkap tiga orang, dua di antaranya tenaga pembuat sabu masing-masing AY warga Jepara dan AN warga Jakarta. Sedang TEK, seorang perempuan yang diduga sebagai bendahara. Sementara tersangka lain berkebangsaan asing berhasil kabur.

Petugas kemudian menggerebek sebuah rumah di Gang Rejo No 11 RT 06 - RW 03 Desa Mulyoharjo Kecamatan Kota Jepara yang menjadi tempat persembunyian bos narkoba Tjeng Andi Kasim (TAK). Namun yang bersangkutan lolos dari

penggerebekan.

Kapolda Jateng Irjen Alex Bambang Riatmojo mengatakan, pabrik tersebut merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional Jakarta, Surabaya, Medan, Hongkong dan Bangkok. Hanya saja peredaran hasil produksinya diduga masih sebatas untuk kepentingan konsumsi dalam negeri, yaitu Jakarta dan sekitarnya. Pihaknya belum melihat adanya indikasi peredaran di Jawa Tengah.

"Kami masih melakukan pendalaman, apakah Jawa Tengah termasuk daerah peredaran pabrik tersebut. Saat ini kami juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas produksi pabrik sabu-sabu tersebut. Seluruh barang bukti yang ada telah kami bawa ke Puslabfor Mabes Polri di Semarang," ujarnya.

Kapolda meminta kepada seluruh masyarakat agar ikut berperan aktif mengungkap kasus-kasus kejahatan seperti narkoba. Bila menemui sesuatu yang mencurigakan, dipersilakan langsung telepon ke nomor handphone-nya 0816932443.

*Bersambung hal 27 kol 1

SEJUMLAH KASUS NARKOBA YANG TERBONGKAR	
Mei 2009	- 30 kg sabu-sabu, pabrik di Kauman, Jepara, Jateng. - 22.610 butir ekstasi Rp 3 M, di Bandara SUTAJakarta.
April 2009	- 425 butir ekstasi, di Kalimantan Barat.
Maret 2009	- 15.760 butir ekstasi, 1.250 butir pil happy five Rp 2 M di Jalan Daan Mogot Jakarta.
Februari 2009	- 250 butir pil ekstasi, cairan bahan ekstasi, di Desa Karya Mekar Bogor. - 1.500 dan 13.000 butir ekstasi, 12 ribu gram bubuk di Denpasar Bali. - Pabrik ekstasi dan peralatannya di Medan.
Januari 2009	- 17 kg sabu Rp17 M, 31.000 ekstasi Rp 5,7 M, dan 3 kg ketamine di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

KR, BAMBANG N / SUMBER: BNN

SENIN PAHING 4 MEI 2009 (9 JUMADILAWAL 1942)

Lagi, Sambungan hal 1



Tim petugas gabungan Polda Jateng dan Polda Metro Jaya memeriksa pabrik sabu-sabu.

Sementara Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Armand Depari menyatakan, produksi sabu yang ditemukan di Jepara termasuk kategori pabrik cukup besar. Pengungkapan pabrik sabu-sabu ini merupakan pengembangan jaringan di Jakarta milik TAK, sekaligus rangkaian Operasi Mutiara Polda Metro Jaya 2009 dalam rangka Indonesia Bebas Narkoba 2015.

"Kami masih mengembangkan kasus ini, dengan terus melakukan koordinasi dengan Polda Jateng. Salah satu tersangka yaitu TAK, kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sedang TEK selaku benda-

hara, berhasil kami aman-kan dan saat ini sedang kami periksa," jelasnya didampingi Direktur Narkoba Polda Jateng Kombes (Pol) Harwiyanto.

Sementara itu, pemilik rumah di jalan Cik Lanang Andreas A Widodo mengungkapkan, rumahnya dikontrak seseorang bernama Andi sekitar dua bulan lalu dengan harga Rp 30 juta untuk masa satu tahun. Andi yang dimaksud diduga Tjeng Andi Kasim. Kepada Andreas, Andi mengatakan rumah tersebut akan digunakan untuk bisnis mebel rumah tangga.

"Awalnya saya meminta harga Rp 35 juta. Namun

Pak Andi meminta dikurangi menjadi Rp 30 juta, dengan alasan saat ini bisnis mebel sedang sepi. Saya benar-benar tidak tahu kalau akhirnya digunakan sebagai tempat produksi sabu-sabu. Saya tahu setelah dikabari petugas," katanya.

Salah seorang warga setempat Jasmo menjelaskan, selama ini rumah tersebut sepi dan tidak ada aktivitas. Namun, pada Jumat (1/5) malam, di rumah tersebut terlihat seperti sedang mengadakan pesta. Banyak pria dan wanita masuk ke rumah tersebut. Hanya saja ia tidak tahu kalau rumah itu menjadi pabrik sabu-sabu.

(Trq/Has)-z



RABU WAGE 6 MEI 2009 (11 JUMADILAWAL 1942)

Rani' Sambungan hal 1

mengarah pada keterlibatan Antasari. Karena tidak ada bukti langsung, penyelidikan dilakukan dengan mengejar para pelaku di lapangan. Tapi di mana keberadaan Rani masih misterius. Berbagai kabar menyebut Rani berada di Serang, di rumah orangtuanya. Sedang yang lainnya menyebut dia berada di apartemen di Jakarta, di tempat persembunyian polisi.

Saksi lainnya yakni sopir Antasari. Pria yang belum diketahui identitasnya itu disebut seorang perwira polisi mengetahui jadwal kunjungan Antasari bertemu Rani, ataupun kala menemui Sigid dan Williard Wizar (WW). "Dia tahu kemana Antasari pergi dan menemui siapa," ujar perwira yang enggan disebut namanya.

Kemarin Antasari kembali diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, Antasari dicecar 10 pertanyaan. "Ada sepuluh pertanyaan, namun belum menyentuh materi," ujar salah seorang pengacara Antasari, Deni Kailimang.

Dalam pemeriksaan tersebut, Antasari ditanya mengenai hubungannya dengan tersangka lainnya yakni Sigid Haryo Wibisono dan Kombes Williard Wizar. Antasari juga ditanya hubungannya dengan Rani, caddy yang disebut-sebut sebagai pemicu penembakan Nasrudin. "Dia mengaku kenal. Kenal dengan SH, kenal dengan WW, kenal dengan Rani. Bagaimana hubungannya, kenal di mana. Antasari mengaku kenal semua," ujar Deni Kailimang.

Menurut Deni Kailimang, tidak ada satu pun yang disembunyikan Antasari mengenai hubungannya dengan para tersangka, termasuk dengan Nasrudin. Deni Kailimang sangat yakin Antasari bukan otak dalam perencanaan pembunuhan Nasrudin. Pihaknya belum mengetahui bukti apa yang mendasari sehingga Antasari ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. (Ful/Edi/Imd/Mgn/Sim/Don)-e

JUMAT LEGI 8 MEI 2009 (13 JUMADILAWAL 1442)

Deklarasi 'JK-Wir' Dilaksanakan di Yogya

Mega-Prabowo, Alot

JAKARTA (KR) - Koalisi bersama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra, terancam batal. Meski sepakat berkoalisi, namun keduanya belum juga menemukannya kata sepakat siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. PDIP tetap mengajukan Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden (Capres) sementara Gerindra menolak jika Prabowo Subianto dijadikan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Komunikasi politik yang dilakukan antara Puan Maharani-Prabowo Subianto, Rabu (6/5) berakhir *deadlock*. "Ya gimana? Semuanya mau jadi capres," kata anggota Dewan Pimpinan DPP PDIP, Saham Sirait kepada wartawan yang mengunjunginya di kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (7/5).

Dalam pertemuan itu, baik PDIP dan Gerindra tidak menemui kata sepakat mengenai posisi capres-cawapres

yang merupakan wujud koalisi yang hendak dibangun. Maka langkah realistis yang bisa ditempuh adalah tidak saling memaksakan kehendak satu sama lain.

"Dia (Prabowo) kan punya pendirian. Kita hargai tekadnya," sambung mantan Sekjen PDIP itu.

Sesuai aturan perundang-undangan terbaru, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan Capres dan Cawapres bila memenuhi batas dukungan kursi di parlemen

sebanyak 20 persen, atau 25 persen suara. Baik PDIP maupun Gerindra, setelah perhitungan *parliamentary threshold* telah mendapatkan dukungan kursi lebih 20 persen.

Dari perhitungan suara KPU, PDIP memperoleh suara 14,52 persen dan Gerindra 4,51 persen. Meski memperoleh suara lebih kecil, Gerindra dengan dukungan Prabowo memiliki logistik yang kuat. Kedua partai ini sama-sama berbasis wong cilik.

TARIK-MENARIK KOALISI PDIP-GERINDRA	
Dukungan Suara (sementara): 14,52%	Dukungan Suara (sementara): 4,51%
Jaringan partai kuat	Logistik kuat

Masing-masing menyatakan berbasis massa wong cilik

Berbeda dengan kubu PDIP-Golkar, kubu Partai Golkar dan Partai Hanura mulai bergerak dengan rencana deklarasi duet pasangan Capres dan Cawapres. Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman mengemukakan, deklarasi pertama pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Wir) akan dilakukan di Yogyakarta. "Rencananya kita akan mengambil tempat di JEG, sedang tanggalnya menyusul. Kita sudah mensosialisasikan dengan DPD II se DIY. Mereka mendukung," ujarnya.

Sementara itu, Kader Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) DIY dan Simpatik DPW PAN I mendukung rencana Soetno Bachir (SB) untuk munc dari jabatan Ketua Umum DPP PAN, dengan melakukan sujud syukur di Kantor DPW PAN DIY Jalan Ngeksigon Yogyakarta, Kamis (7/5).

"Jika SB benar-benar mundur, kami sangat bersyukur. Kemundurannya akan menjadi suasana di tubuh partai kembali kondusif, ya berdampak positif bagi kejuaran partai," kata Ketua DPW PAN DIY, Ahmad Yohan, didampingi Ketua Simpatik DIY Rusni Abdullah dan Sekretaris BM PAN DIY E Masruri.

(Jon*/4/Edi/Mgn/Sim)

SELASA KLIWON 12 MEI 2009 (17 JUMADILAWAL 1942)

Jalin Komunikasi, SBY dengan Mega Merapat Kian Kuat, Boediono Cawapres

JAKARTA (KR) - Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi figur kuat untuk menduduki posisi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mantan Menko Perekonomian yang dekat dengan Megawati Soekarnoputri menjadi faktor penengah bahkan di tengah kesulitan memiliki Cawapres dari partai koalisi.

Menurut informasi yang beredar kuat saat ini, keberadaan Boediono selain dibutuhkan kemampuannya untuk mendampingi SBY, juga mampu menjadi penengah dari kekuatan politik besar yang ada.

Sementara guna memperkuat basis dukungan koalisi,

kubu Partai Demokrat dengan PDIP melakukan komunikasi yang lebih intensif, meski dilakukan melalui utusan.

Untuk memuluskan langkah ini Susilo Bambang Yudhoyono sengaja mengutus Mensesneg Hatta Radjasa ke kubu Megawati. Bahkan per-

temuan terakhir, Senin (11/5) untuk kedua kalinya mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan komunikasi seperti yang selama ini telah terjalin.

"Saya berkunjung ke Teuku Umar (rumah Ibu Mega) untuk melakukan suatu ko-

munikasi yang selama ini sudah terjalin. Komunikasi yang sangat baik antara saya sebagai utusan Pak SBY dengan Pak Taufiq, Ibu Mega, Mas Pram, demi kepentingan sesuatu yang besar buat bangsa dan negara," kata Hatta begitu keluar dari rumah Mega, yang didampingi Sekjen PDIP Pramono Anung dan Taufiq Kiemas.

Hatta Radjasa menolak memberikan jawaban dengan dalih bukan kompetensinya. "Saya tidak bicara soal itu sama sekali. Tapi komuni-

kasi ini saya sampaikan sangat baik," kata Hatta politisi PAN itu.

Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan, yang disampaikan Hatta merupakan bagian komunikasi yang sudah dilakukan antara Mega dan SBY. "Walaupun masih melalui 'messenger' orang yang memang diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan baik dari Mega ke Pak SBY maupun dari SBY ke Ibu Mega," jelasnya.

* Bersambung hal 23 kol 4 Boediono



KR-AN

SELASA KLIWON 12 MEI 2009 (17 JUMADILAWAL 1942)

Kian Kuat,

Dari Puri Cikeas Bogor SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, membenarkan saat ini sedang dilakukan komunikasi politik antara PD dengan PDIP.

"Benar bahwa komunikasi politik dengan PDIP terus dilakukan. Kita saling menghormati, saya menghormati Ibu Megawati, PDIP juga menghormati langkah kita," tegas SBY saat menggelar syukuran Minggu (10/5) malam atas kemenangan PD pada Pileg 9 April lalu.

Secara terpisah, Capres yang diusung Partai Golkar Jusuf Kalla, menghormati koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat (PD) yang

makin terbuka lebar seperti diungkapkan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Itu merupakan masalah PDIP sendiri, namun demikian kami menghormati keputusan itu," tegas Jusuf Kalla se usai bersama pasangannya Wiranto bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di kantornya, Jalan Menteng Raya Jakpus, Senin (11/5).

Sekalipun demikian Jusuf Kalla mengingatkan, PDIP masih masuk dalam koalisi besar yang telah dibangun beberapa waktu lalu. "Beberapa waktu lalu PDIP dalam kerangka membangun koalisi

Sambungan hal 1

bersama telah sama-sama kita tandatangani," papar Jusuf Kalla mengingatkan.

Pada pertemuan itu yang merupakan sowan pertama kali kepada tokoh nasional sejak deklarasi Minggu (10/5), duet Jusuf Kalla-Wiranto didampingi pengurus partai masing-masing. Selain itu juga hadir Ny Mufidah Jusuf Kalla dan Ny Uga Wiranto.

Pada tanggal 15 Mei melaksanakan deklarasi yang kemudian tanggal 16 Mei-nya secara resmi dilakukan pendaftaran oleh Partai Demokrat dan lain-lain tentang Capres dan Cawapres yang diusulkan," tambahnya.

(Jon/Mgn/Sim/Edi)-a

JUMAT PON 15 MEI 2009 (20 JUMADILAWAL 1942)

Tersendat, Duet Mega-Prabowo

PKS Tetap Ancam Tarik dari Koalisi PD

JAKARTA (KR) - Rencana deklarasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto kembali tersendat. Negosiasi kedua kubu, antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra masih alot. Peluncuran duet Mega-Bowo yang sedianya digelar Kamis (14/5) sore kemarin terus mengalami penundaan.

Sampai berita ini diturunkan, peluncuran duet tersebut belum bisa dilaksanakan. Seharusnya peluncuran ditunda hingga pergantian malam, ternyata juga kembali mundur.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi, Emir Mois, penjelasan soal duet ini akan disampaikan usai salat Jumat, hari ini.

"Besok (hari ini-red) DPP yang ngomong," ujar Mois yang ditemui di kediaman Megawati Soekarnoputri Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (14/5).

Menurut Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, pengumuman duet pada Jumat ini akan menentukan masa perjalanan 5 tahun ke depan. "Jumat ini merupakan saat penentuan bagi PDI Perjuangan," kata Sekjen PDIP, Pramono Anung di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (14/5).

Seperti diketahui hingga saat ini, Megawati dan Prabowo masih tarik ulur dalam

memastikan maju bersama atau tidak di Pemilu Presiden 2009. Baik Megawati maupun Prabowo masih bersikeras ingin jadi calon presiden. Sementara batas waktu pengajuan capres/cawapres pada Sabtu (16/5) besok.

Pihak PDIP sendiri sudah ancap-ancah jika ternyata duet ini gagal terwujud. Menurut putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, hal terburuk jika hingga detik terakhir belum juga ada kesepakatan, maka PDIP siap menjadi oposisi.

"Walaupun ada kemungkinan terburuk tidak jadi, opsi terburuk pun PDIP siap menjadi oposisi tanpa mencalonkan capres," ujar dia kepada wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, antara dua kubu, sama-sama tetap mengajukan capres, baik Megawati maupun Prabowo. Namun perkembangan terakhir, pihak Gerindra mau mengalah, yakni Prabowo menjadi cawapres.

Namun informasi terakhir,

ternyata negosiasi masih alot. Baik PDIP dan Gerindra kembali belum menemukan titik temu soal penentuan capres-cawapres. Sejauh ini Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto dikabarkan sudah mempersiapkan masalah administrasi untuk menjadi capres.

"Tapi yang pasti Pak Prabowo itu sudah mempersiapkan diri terkait dengan perlengkapan administrasi sebagai capres," ujar Ketua Gerindra Media Center Haryanto Taslam di kantornya, Jalan Prapanca, Kamis (14/5).

Semua surat mulai dari ijazah hingga surat kelakuan baik dari pihak kepolisian, diakui Haryanto, sudah selesai diurus. Amanat partai dalam rapimnas yang menginginkan Prabowo tetap menjadi capres juga masih kuat.

"Itu amanat partai yang diberikan kepada Prabowo untuk dicanangkan dalam pilpres dan diperjuangkan sampai akhir," jelasnya.

Haryanto mengaku PDIP masih tetap menjadi prioritas koalisi dengan partainya.

Secara terpisah, PKS urung mengeluarkan ancamannya untuk keluar dari koalisi parpol pendukung capres Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan masih menimbang-nimbang sekaligus mendalami lebih jauh lagi.

* Bersambung hal 27 kol 6

JUMAT PON 15 MEI 2009 (20 JUMADILAWAL 1942)

Tersendat, Sambungan hal 1



PROFIL MEGA-PRABOWO

Megawati Soekarnoputri

Lahir: Yogyakarta, 23 Januari 1947
 Partai Politik: PDI Perjuangan (Ketua Umum)
 Agama: Islam
 Orang Tua: Dr Ir Soekarno (presiden I)
 Karier:
 - Ketua DPC PDI Jakarta 1986-1993
 - Ketua DPP PDI (didongkel Orta)
 - Ketua Umum PDI Perjuangan (sampai sekarang)
 - Wakil Presiden (1999-2001)
 - Presiden (1991-2004)

Letjen (Purn) Prabowo Subianto

Lahir: Jakarta 17 Oktober 1951
 Partai Politik: Gerindra (Ketua Dewan Pembina)
 Agama: Islam
 Orang tua: Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo (begawan ekonomi)
 Karier:
 - Danjen Kopassus 1995-1998
 - Pangkostrad 1998
 - Ketua Umum HKTI 2004-sekarang
 - Ketua Umum IPSI 2007-sekarang
 - Ketua Umum APPSI 2008-sekarang



FOTO-ANTARA

KR-JONI/GRAFIS JOS

PKS belum memutuskan apakah keluar atau tidak dalam parpol anggota koalisi pendukung SBY. Jadi masih menimbang-nimbang, mendalami dan mencerna kalimat anything can be happen-nya SBY, kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada pers di ruang Fraksi PKS gedung DPR Senayan Jakarta Kamis (14/5).

Mahfudz Siddiq mengatakan, masih ada dua hari lagi ke depan ini, untuk melihat wujud akhir anything can be happen itu apa. Pasalnya kesalahan memaknai politik itu bisa membuat blunder, jelasnya lagi.

Ia membenarkan bahwa PKS sudah menyiapkan cadangan alternatif, bila terjadi

deadlock (jalan buntu). "Namun untuk sekarang masih bersabar dan sikap itu akan kita sampaikan kalau memang ambang batas itu sudah terlewati," bebernya lagi.

Pernyataan senada disampaikan Sekjen PKS Anis Matta sekitar penarikan dukungan terhadap Partai Demokrat dan SBY. Pada tanggal 15 Mei, PKS baru memberikan keputusan.

Anis mengaku PKS tidak memperlakukan pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY. Namun, pola komunikasi yang dibangun SBY dan Partai Demokrat sebagai mitra koalisi itu yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan itu Mahfudz Siddiq juga minta agar Partai Demokrat (PD) dan SBY tidak takabur.

Apalagi melalui Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarak menyebut peran Tuhan dalam menentukan soal cawapres Boediono hanya 1 persen.

Menurut Dr Abdul Gaffar Karim dosen Fisipol UGM, pilihan SBY terhadap Boediono sebagai calon Wakil Presiden mengundang resistensi, terutama dari kalangan partai Islam seperti PPP, PKS dan PAN. Meski begitu, posisi sebagai incumbent menjadi keuntungan pasangan SBY-Boediono untuk bisa sukses dalam pilpres.

(Jon/Sim/Edi/Mgn/Asp)-n

RABU PON 20 MEI 2009 (25 JUMADILAWAL 1942)

Penggembosan Bayangi Koalisi Parpol

Semua Pasangan Capres-Cawapres Lolos Tes Kesehatan

JAKARTA (KR) Aksi penggembosan yang dilakukan beberapa orang kader membayangi koalisi parpol dalam pemilihan presiden (pilpres). Dalam koalisi di Partai Demokrat (PD) muncul isu adanya pengurus parpol peserta koalisi yang pindah dukungan. Sedang di lingkungan Partai Golkar merembak adanya manuver untuk melengserkan Jusuf Kalla dari jabatan ketua umum partai bergambar pohon beringin ini.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima laporan hasil pemeriksaan kesehatan tiga pasangan capres-cawapres. Seluruh pasangan dinyatakan lolos tes dan siap melaksanakan tugas seandainya terpilih nantinya.

"Alhamdulillah 3 pasangan mempunyai kemampuan kesehatan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden," kata pengarah

Pokja Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden KPU Syamsulbahri di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/5) tadi malam.

Terkait isu penggembosan, fungsionaris PD Sutan Bathoegana menyangkal adanya aksi loncat pagar pendukung koalisi ke pasangan JK-Wiranto. Kalau ada yang loncat pagar, menurutnya, tak lebih dari oknum perseorangan. "Tidak ada yang lari dari Demokrat kok. Yang dimaksud lari itu hanya oknum-oknumnya saja," ujarnya. Menurut Sutan, 23 parpol masih eksis mendukung SBY-Boediono.

Bahkan, katanya, PD optimistis parpol-parpol itu tidak akan mencabut kontrak koalisi yang sudah disepakati. Ia bilang, beberapa oknum anggota koalisi PD yang mendukung JK-Wiranto berasal dari PAN, tetapi dia menolak menyebutkan siapa itu. "Ah nggak enak. Nggak etis bila disebutkan namanya," katanya mengelak. Sebelumnya, disebut-sebut Amien Rais loncat mendukung JK-Wiranto. Namun hal itu dibantah setelah Amien menerima penjelasan SBY jika Boediono tidak beraliran neoliberal. Selain itu, kader PAN, yakni Drajad Wibowo, dikabarkan

masuk tim sukses JK-Wiranto.

Drajad tidak mengiyakan atau memberi konfirmasi perihal kabar itu. Selain kader PAN, kader PPP yakni Lukman Hakiem (Ketua Fraksi PPP di DPR RI) dikabarkan juga berpaling ke JK-Wiranto. Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP ini, juga disebut-sebut membelot ke JK-Wiranto. Ia menjadi juru bicara calon presiden (capres) Jusuf Kalla (JK). Padahal, PPP telah menentukan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Jika berita itu benar, Lukman Hakiem jelas-jelas telah melanggar kebijakan partai. "Ini melanggar kebijakan partai. PPP kan sudah mengambil keputusan dukung SBY dan itu mengikat se-

mus pengurus dan kader," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Ditegaskan, kasus Lukman Hakiem ini akan dibawa ke rapat internal PPP.

Sementara itu di lingkungan Partai Golkar muncul manuver untuk melengserkan Jusuf Kalla dari jabatan ketua umum partai ini. Iskandar Mandji, Wakil Sekjen Partai Golkar mengakui adanya manuver sejumlah elite Partai Golkar untuk melakukan pendongkolan tersebut. "Saya memang dengar ada sekelompok elite yang bermanuver seperti itu," kata Iskandar Mandji di Jakarta, Selasa (19/5).

Iskandar mendengar, skenario yang dilakukan yaitu mendongkel Jusuf Kalla dari ketua umum. Setelah JK diganti, pengurus yang baru bakal mengubah dukungannya ke salah satu capres yang saat ini sedang bertarung.

"Mereka hanya orang yang haus kekuasaan. Pasti masyarakat bakal menertawai mereka," ujarnya.

Untuk itu Iskandar menilai sangat aneh bila sebagian elite justru ingin mengganti ketua umumnya di saat partainya sedang mengusung capres. Selain itu, dirinya mempertanyakan dasar mengadakan Munaslub. "Apalagi, proses pencalonan JK menjadi capres dilakukan secara organisasional," ujarnya.

Sebelumnya, wacana yang mengemuka mengenai pertemuan di rumah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan sejumlah tokoh Partai Golkar, di antaranya membicarakan mengenai percepatan Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Jusuf Kalla.

JUMAT KLIWON 22 MEI 2009 (27 JUMADILAWAL 1942)

Sebagian Korban Hercules Belum Teridentifikasi 109 Tewas, 5 dari Yogya

MAGETAN (KR) (Bangsa Indonesia kembali berduka) Sedikitnya 109 orang tewas dalam musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Desa Geplak Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Rabu (20/5). Sementara 15 korban lainnya berhasil selamat meski dalam kondisi kritis dan luka-luka.

Dalam musibah yang terjadi tepat pada Hari Kebangkitan Nasional ini, 5 orang asal Yogya ikut jadi korban meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kelima orang tersebut adalah Pangkosek IV Biak Marsma TNI Harsono dan istri Jati Wulandari yang beralamat di Jalan Kaliurang Ngaglik Sleman, Mayor Drs Agustinus Agus Wigit Santosa MSI alamat Ngrenak Sidomoyo Godean Sleman, Serda Danuri alamat Mriyan Timbulharjo Sewon Bantul, Prada Wisnu Triyadi alamat Rendeng Wetan Timbulharjo Sewon Bantul. Sedangkan yang mengalami luka-luka Prada Purwanto alamat Mandingan Ringinharjo Bantul.

Kecelakaan pesawat angkut jenis C-130 Hercules Alpha 1325 milik TNI AU tersebut diawali dengan lepasnya salah satu sayap pe-

sawat. Kesaksian ini diungkapkan Agus Yulianto, warga Desa Geplak yang sempat melihat proses sebelum jatuhnya pesawat.

Menurut Agus, sejak sekitar dua kilometer arah utara dari lokasi kecelakaan, pesawat sudah terlihat oleng. Pesawat yang berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Lanud Iswahyudi Madiun ini makin menukik dan menyambar tiga rumah, sebelum akhirnya jatuh di persawahan dan terbakar hebat.

Menurut Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Iswahyudi Madiun Marsekal Pertama TNI Bambang Samodra, sebanyak 17 korban tewas jatuhnya Hercules C-130 tersebut, hingga Kamis (21/5) pagi belum teridentifikasi. "Jumlah korban hingga saat ini ada 109 orang

yang terdiri atas kru dan penumpang pesawat, serta 15 korban selamat, tapi jumlah itu belum termasuk warga yang rumahnya tertimpa pesawat yakni dua orang," katanya setelah melepas keberangkatan 58 jenazah korban tewas jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Hanggar Skwadron Udara-15 Lanud Iswahyudi Madiun.

Menurut Bambang, 14 dari 17 jenazah itu sudah berada di RS TNI AU Lanud Iswahyudi, sedangkan tiga jenazah lainnya diduga masih terjepit di antara bangkai pesawat. "Data itu setelah kami cocokkan dengan manifest yang kami terima dari petugas Halim Perdanakusuma. Jadi, jumlah penumpang keseluruhan adalah 112 orang," katanya.

Dari korban tewas itu, diketahui 41 anggota militer (penumpang), 11 anggota militer (kru pesawat) dan sisanya dari keluarga anggota militer tersebut, misalnya istri, anak dan kerabat lainnya. Tiga korban yang terjepit di dalam bangkai pesawat itu, dua di antaranya

berhasil dievakuasi dengan memotong bangkai pesawat, sedangkan satu korban lainnya masih terjepit.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengucapkan duka yang mendalam kepada keluarga korban. Bahkan pesawat yang naas

itu juga membawa kenangan bagi Presiden. Sebab ketika masih berdinast, sering naik pesawat tersebut. "Kejadian ini benar-benar musibah. Kami bisa merasakan apa yang bapak dan ibu rasakan. Saya juga keluarga prajurit," kata Presiden di Landasan Udara

Halim Perdanakusuma belum bertolak ke Jakarta Timur, Kamis (21/5).

Sebelumnya, Presiden telah menginstruksikan pada seluruh jajaran TNI terutama TNI Angkatan Udara, untuk terus

*Bersambung hal 23 ke

JUMAT KLIWON 22 MEI 2009 (27 JUMADILAWAL 1942)

109 Tewas,

melaksanakan investigasi atas kecelakaan pesawat C 130 Hercules di Madiun Jawa Timur, sambil terus melaksanakan tugas-tugas rutin pertahanan negara sebagaimana mestinya. Presiden juga meminta agar spekulasi lain yang tidak perlu terhadap kecelakaan ini tidak perlu dikembangkan. Dari penjelasan pimpinan TNI dan pimpinan TNI AU yang diterima SBY, semuanya sudah jelas dan gamblang.

Sementara itu dari evakuasi para korban pesawat Hercules C 130 tersebut, gelombang kedua pengantaran jenazah kemarin tiba di Jakarta. Pesawat Hercules Tipe A1315 membawa 14 jenazah korban. Pesawat yang membawa 14 jenazah itu mendarat pada pukul 14.20 di Bandara Halim Perdanakusuma Ja-

karta Timur.

Setibanya di Halim, jenazah langsung diturunkan dan disaksikan Presiden serta keluarga korban. Setelah itu, jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibarangkatkan ke rumah duka dan akhirnya dimakamkan.

Sementara itu saat yang hampir bersamaan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla juga melayat dan bertemu keluarga korban. Keduanya tiba di ruang VIP Sukma 2, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan langsung disambut Komandan Pangkalan Halim Marsma TNI Boy.

Wapres pun memeluk para keluarga korban dan turut larut dalam duka keluarga. Untuk kesekian kalinya, Wapres kembali menegaskan pentingnya pemenuhan ang-

garan untuk memperbarui Alutsista TNI.

Pada penerbangan pertama, Hercules A1323 telah membawa sebanyak 16 jenazah dari Lapangan Udara Iswahyudi Madiun. Semua jasad telah diantar ke daerah masing-masing dan langsung dimakamkan. Namun demikian, menurut Kepala Penerangan lapangan Udara Halim Perdanakusuma Mayor Sus Ali Amri Lubis, setelah dilakukan pencarian para korban ternyata masih ada lima jasad yang belum dapat diidentifikasi.

Sementara itu, Panitia Penyelidik Kecelakaan Pesawat Udara (PPKPU) Mabes TNI AU, kemarin turun ke lokasi kejadian untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. "Tim investigasi sudah masuk lebih awal, tapi seka-

Sambungan hal 1

rang PPKPU turun ke lapangan untuk menindaklanjuti hasil investigasi awal itu, karena tim PPKPU sendiri baru terbentuk," kata Kepala Dinas Keselamatan Pesawat dan Kerja, Mabes TNI AU Marssekal Pertama TNI I Wayan Suwitra.

Didampingi Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Iswahyudi Marssekal Pertama TNI Bambang Samoedra, Wayan mengatakan persiapan penyelidikan sudah dilakukan mulai dari pengamanan lokasi kejadian hingga pembentukan tim/panitia yang dibutuhkan.

Bambang Samoedra menambahkan, penyebab kecelakaan pesawat itu hingga kini masih dalam penyelidikan PPKPU yang bekerjasama dengan pihak terkait di Magetan. "Tim evakuasi sudah turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi. Tim itu dibentuk sendiri oleh Mabes TNI AU, karena hasilnya akan dilaporkan ke Kepala Staf TNI AU, sedangkan kami di Magetan hanya membantu," katanya. (Mgn/Sim/Ful/Edi/Ati/Lng/Has)-e

JUMAT KLIWON 22 MEI 2009 (27 JUMADILAWAL 1942)

Sebagian Korban Hercules Belum Teridentifikasi 109 Tewas, 5 dari Yogya

MAGETAN (KR) (Bangsa Indonesia kembali berduka) Sedikitnya 109 orang tewas dalam musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Desa Geplek Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Rabu (20/5). Sementara 15 korban lainnya berhasil selamat meski dalam kondisi kritis dan luka-luka.

Dalam musibah yang terjadi tepat pada Hari Kebangkitan Nasional ini, 5 orang asal Yogya ikut jadi korban meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kelima orang tersebut adalah Pangkosek IV Biak Marsma TNI Harsono dan istri Jati Wulandari yang beralamat di Jalan Kaliurang Ngaglik Sleman, Mayor Drs Agustinus Agus Wigit Santosa MSI alamat Ngrenak Sidomoyo Godean Sleman, Serda Danuri alamat Miryan Timbulharjo Sewon Bantul, Prada Wisnu Triyadi alamat Rendeng Wetan Timbulharjo Sewon Bantul. Sedangkan yang mengalami luka-luka Prada Purwanto alamat Mandingan Ringinharjo Bantul.

Kecelakaan pesawat angkut jenis C-130 Hercules Alpha 1325 milik TNI AU tersebut diawali dengan lepasnya salah satu sayap pe-

sawat. Kesaksian ini diungkapkan Agus Yulianto, warga Desa Geplek yang sempat melihat proses sebelum jatuhnya pesawat.

Menurut Agus, sejak sekitar dua kilometer arah utara dari lokasi kecelakaan, pesawat sudah terlihat oleng. Pesawat yang berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Lanud Iswahyudi Madiun ini makin menukik dan menyambar tiga rumah, sebelum akhirnya jatuh di persawahan dan terbakar hebat.

Menurut Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Iswahyudi Madiun Marskal Pertama TNI Bambang Samodra, sebanyak 17 korban tewas jatuhnya Hercules C-130 tersebut, hingga Kamis (21/5) pagi belum teridentifikasi. "Jumlah korban hingga saat ini ada 109 orang

yang terdiri atas kru dan penumpang pesawat, serta 15 korban selamat, tapi jumlah itu belum termasuk warga yang rumahnya tertimpa pesawat yakni dua orang," katanya setelah melepas keberangkatan 55 jenazah korban tewas jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Hanggar Skwadron Udara-16 Lanud Iswahyudi Madiun.

Menurut Bambang, 14 dari 17 jenazah itu sudah berada di RS TNI AU Lanud Iswahyudi, sedangkan tiga jenazah lainnya diduga masih terjepit di antara bangkai pesawat. "Data itu setelah kami cocokkan dengan manifest yang kami terima dari petugas Halim Perdanakusuma. Jadi, jumlah penumpang keseluruhan adalah 112 orang," katanya.

Dari korban tewas itu, diketahui 41 anggota militer (penumpang), 11 anggota militer (kru pesawat) dan sisanya dari keluarga anggota militer tersebut, misalnya istri, anak dan kerabat lainnya. Tiga korban yang terjepit di dalam bangkai pesawat itu, dua di antaranya

berhasil dievakuasi dengan memotong bangkai pesawat, sedangkan satu korban lainnya masih terjepit.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengucapkan duka yang mendalam kepada keluarga korban. Bahkan pesawat yang naas

itu juga membawa kenangan bagi Presiden. Sebab ketika masih berdinast, sering naik pesawat tersebut. "Kejadian ini benar-benar musibah. Kami bisa merasakan apa yang bapak dan ibu rasakan. Saya juga keluarga prajurit," kata Presiden di Landasan Udara

Halim Perdanakusuma belum bertolak ke Jakarta Timur, Kamis (21/5).

Sebelumnya, Presiden telah menginstruksikan pada seluruh jajaran TNI Angkatan Udara, untuk terus

***Bersambung hal 23 ke**

SELASA WAGE 26 MEI 2009 (1 JUMADILAKHIR 1942)

'Sindiran' Capres

Sambungan hal 1

5 atau 10 tahun terakhir ini," kata SBY saat menerima perwakilan Jam'iyah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Puri Cikeas Bogor, Senin (25/5).

Menurut SBY, pihaknya tidak ingin ikut-ikutan gaya pasangan capres-cawapres lainnya. Namun yang penting banyak program-program peningkatan kesejahteraan rakyat telah dilakukan pemerintah dalam lima tahun terakhir dan banyak dari program tersebut yang terbukti berhasil meringankan beban dan memberdayakan rakyat miskin.

"Maka tidak perlu kita bersuara sangat lantang menebarkan angin surga ke sana kemari seolah-olah yang paling dekat dengan rakyat. Lebih baik rakyat melihat apa yang telah dilakukan secara konkrit," sambung SBY.

SBY mengungkapkan, tiga capres telah berkomitmen kampanye secara etika santun dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

"Beberapa saat yang lalu

dengan Ibu Megawati, kami sepakat untuk memelihara akhlak dan budi pekerti di dalam kompetisi politik sekarang," jelas SBY yang sebelumnya juga berkomitmen dengan calon lainnya, Jusuf Kalla (JK).

Secara terpisah, salah seorang petinggi Partai Golkar, Prof Muladi, membenarkan isu yang beredar seputar tuntutan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Muladi bahkan berharap secara 'legowo' JK mundur kalau terpental di Pilpres 8 Juli 2009 mendatang.

Pengakuan Muladi ini tentu saja memunculkan persoalan baru di internal Partai Golkar di tengah-tengah persiapan duet JK-Win menuju pilpres. Soliditas Partai Golkar digoyang isu munaslub yang ingin menyingkirkan Jusuf Kalla dari posisi Ketua Umum.

"Isu Munaslub Golkar itu saya kira sudah terdengar," ujar Muladi menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Muladi, kemarin, datang ke Senayan selaku Gubernur Lembaga Keta-

hanan Nasional (Lemhanas). Meski demikian ia juga mengakui bahwa partainya saat ini masih berkonsentrasi dulu pada pemilihan presiden.

Sedangkan Lembaga Studi Demokrasi (LSD), sebagai bagian dari masyarakat madani, mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SB-Boediono) pada Pilpres 8 Juli 2009, kata Direktur Eksekutif LSD Denny JA, PhD. "Dukungan kepada SBY-Boediono didasarkan sesuai dengan misi berdirinya Lembaga Studi Demokrasi yaitu Pemerintahan Yang Kuat dan Konsolidasi Demokrasi," katanya.

Denny mengatakan, latar belakang dukungannya berdasarkan pasangan SBY-Boediono lebih menjamin terbentuknya pemerintahan yang kuat karena didukung koalisi partai dengan jumlah suara lebih dari 50 persen dari total kursi di DPR 2009-2014.

Sementara itu, hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebutkan bahwa pasangan

SBY-Boediono bisa menang dalam satu putaran. Menurut Direktur Eksekutif LSN, Umar S Bakry, pasangan ini bisa gagal dalam satu putaran jika terjadi kecelakaan politik atau upaya yang sangat spektakuler dari para kompetitornya. Hasil survei terbaru LSN yang dilaksanakan 15-21 Mei mengungkapkan bahwa tingkat elektabilitas SBY-Boediono unggul jauh dari pasangan Megawati-Prabowo maupun JK-Wiranto.

Dari hasil itu menyebutkan bahwa sebanyak 67,1 persen responden mengaku akan memilih pasangan SBY-Boediono jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini. Sebanyak 11,8 persen responden menyatakan akan memilih Megawati-Prabowo dan hanya 6,7 persen yang mengatakan akan memilih pasangan JK-Wiranto.

Peluang SBY lolos putaran pertama itu, karena mayoritas responden (88 persen) mantap dengan pilihannya. Sedangkan 10,9 persen masih ada kemungkinan berpaling pada pasangan lain. (Jon/Mgn/Edi/Sim)-n

RABU KLIWON 27 MEI 2009 (2 JUMADILAKHIR 1942)

Koalisi Partai Demokrat Digembosi DPR Setuju Hak Angket DPT

JAKARTA (KR) - Setelah melalui perundingan yang alot, DPR RI akhirnya menyetujui hak angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009 melalui voting dalam Rapat Paripurna, Selasa (26/5). Pendukung hak angket memenangi proses ini dengan 129 suara dari total jumlah anggota DPR yang hadir sebanyak 203 orang. Sedangkan, pihak yang menolak berjumlah 73 suara dan abstain 1 orang.

Partai yang setuju hak angket

terdiri dari Partai Golkar, PDIP, PPP dan PAN. Sedangkan yang menolak adalah Partai Demokrat, PKS dan PDS. Sedangkan PKB terbelah menjadi 3 kelompok, 16 orang setuju, satu menolak dan satu abstain.

Hasil ini seakan mengamburkan belum kuatnya koalisi yang dibangun Partai Demokrat menjelang Pilpres. Bahkan kesepakatan dengan Partai Golkar untuk tetap menjaga koalisi hingga akhir pemerintahan, mulai dipertanyakan.

Tiga partai peserta koalisi yang dipimpin Partai Demokrat yakni PPP, PKB dan PAN justru balik mendukung hak angket yang dimotori Golkar dan PDIP. Sedangkan PKS tetap setia bersama Partai Demokrat untuk menolaknya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hassan kepada wartawan mengaku, kejadian ini sangat memukul partainya dan menjadi pelajaran berharga. "Ini merupakan pelajaran bagi Demokrat, bahwa yang namanya koalisi harus betul-

betul berkomitmen dan bukan hanya karena kepentingan," kata Syarif.

Hasil ini dijadikan bahan evaluasi partainya terkait kelanjutan koalisi yang dibangun pihaknya bersama tiga partai tadi. Dia mengaku sangat menyayangkan ketiga partai itu tidak sejalan dengan Partai Demokrat.

"Demokrat akan lakukan evaluasi, saya akan lapor ini ke ketua kami tentang kondisi koalisi saat ini," tandasnya.

Selain itu, pihak Partai Demokrat juga kecewa atas sikap Partai Golkar yang mendukung pengesahan hak angket daftar pemilih tetap (DPT). Golkar dinilai tidak konsisten mendukung pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

"Saya kecewa dengan Golkar yang katanya masih berkoalisi dengan kami, yang ingin tetap solid ke depan mendukung pemerintah ternyata tidak konsisten," keluh Syarif.

"Bersambung hal 23 kol 4"

DPR Setuju Sambungan hal

Semestinya Golkar tetap konsisten mendukung Partai Demokrat di parlemen seperti yang sering terjadi selama ini. Kerja sama kedua partai ini menurutnya bagian dari koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh SBY-JK.

Ia mensinyalir ada unsur politis meloloskan hak angket

yang dimotori oleh anggota DPR dari PDIP ini. "Karena substansinya tidak tepat. Angket ditujukan kepada pemerintah, padahal yang bertanggungjawab kan KPU. Jadi kami menduga ada unsur politisasi di situ," tegas Syarif.

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Mu-

hammad Ikandari digelar terkait hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memilih. Sementara terkait dukungan PPP terhadap hak angket Ketua Fraksi PPP, Lukman Hakim mengungkapkan, tidak ada keinginan mengembosi koalisi dengan Partai Demokrat. (Jon/Edi)

JUMAT PAHING 29 MEI 2009 (4 JUMADILAKHIR 1942)

Ambalat Memanas, TNI Kirim Pesawat Intai Kapal Perang Malaysia Diusir

JAKARTA (KR) Kawasan Perairan Ambalat di perbatasan RI - Malaysia kembali memanas. Kapal-kapal perang TNI AL terpaksa mengusir kapal perang Malaysia yang mendekati Ambalat.

TNI AU juga mengirim satu pesawat intai maritim Boeing 737 untuk mendeteksi helikopter dan pesawat Malaysia yang masuk wilayah NKRI hingga sejauh 40 mil laut.

Sejumlah aksi pelanggaran perbatasan yang dilakukan pihak Malaysia, membuat Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso meminta pemerintah segera menuntaskan masalah Ambalat tersebut. "TNI berharap pemerintah segera menyelesaikan proses perundingan perihal Ambalat dengan pihak Malaysia," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri seminar 'Memahami Indonesia Yang Asing: Realitas Sosial Budaya di Perbatasan RI-Malaysia' di Jakarta, Kamis (28/5).

Djoko memastikan militer Indonesia tak akan menambak kekuatan armada perang di wilayah itu. Namun tetap akan secara ketat mengamanakannya sesuai prosedur

standar operasional pengamanan perbatasan wilayah laut.

Djoko mengakui, kapal-kapal perang Malaysia kerap melanggar perbatasan wilayah perairan Ambalat. Hal itu karena kedua pihak punya dasar hukum yang kuat atas batas kedua negara di Ambalat. "Jadi, batas wilayah kedua negara di Ambalat yang masih disengketakan ini harusnya segera diselesaikan oleh pemerintah kedua negara," katanya.

Sambil menunggu hasil perundingan kedua pemerintahan mengenai Ambalat, TNI tetap melakukan pengamanan yang sesuai dengan prosedur standar operasional TNI dan Malaysia. Angkatan bersenjata kedua negara kerap bertemu secara rutin untuk membahas berbagai persoalan di perbatasan kedua negara, baik perbatasan laut maupun darat.

"Senin lalu, KRI Untung

Surapati berhasil mengusir sebuah kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang mencoba memasuki wilayah NKRI di perairan Blok Ambalat. Kapal perang RI yang dikomandani Mayor Laut (P) Salim tersebut saat itu sedang mengadakan operasi penegakan kedaulatan di laut wilayah RI, khususnya Laut Sulawesi dan sekitarnya," ungkap Panglima.

Saat kapal perang Malaysia muncul, anak buah kapal KRI Untung Surapati mengambil posisi tempur bahaya permukaan dan mencoba menjalin kontak komunikasi lewat radio. Kapal TLDM itu akan ke Tawau, namun haluan kapal bertentangan dengan yang diinformasikan, bahkan malah hendak memasuki wilayah Indonesia sambil menambah kecepatan.

"Akhirnya, KRI Untung Surapati-872 yang berjenis korvet kelas Parchim eks Jerman itu mengejar sekalgus menghalaunya keluar dari wilayah NKRI. Sehari sebelumnya, KRI Hasanudin juga mengusir KD Baung-3509 dan heli Malaysian Ma-

ritime Enforcement Agency serta pesawat dari jenis 'beechcraft' yang mencoba ke Blok Ambalat," jelas Panglima.

Sementara Kapen Koopsau II Mayor Sonaji Wibowo menginformasikan, TNI AU mengerahkan satu flight pesawat intai maritim jenis Boeing 737 untuk melaksana-

kan patroli dan pengamatan dari udara di kawasan yang kaya kandungan minyak itu. Tepat pukul 08.40 wita, pesawat Boeing 737 yang diterbangkan Mayor Pnb Beny dan copilot Lettu Pnb Agus *take off* dari Lanud Sultan Hasanudin Makassar menuju Ambalat area.

"TNI AU sendiri, dalam hal ini Koopsau II secara rutin terus melaksanakan patroli dan pengamanan di kawasan Ambalat. Dalam kalender Koopsau II, pengamanan wilayah Ambalat merupakan operasi yang dilaksanakan sepanjang tahun.

"Bersambung hal 27 kol 1

Kapal Sambungan hal 1

Pesawat yang dilibatkan dalam operasi Ambalat meliputi pesawat Boeing 737 dan Sukhoi Su-27/30 MK. Kedua jenis pesawat ini selalu *standby on call*. Sementara koordinasi dengan pihak TNI AL, dalam hal ini Koarmatim juga terus dilakukan guna mendapatkan data-data maupun informasi yang *up to date* seputar keamanan wilayah Ambalat,"

Menanggapi ini, Ketua Komisi I DPR-RI Theo L. Sambuaga mengharapkan pemerintah mempercepat penyelesaian kasus Ambalat dari gangguan kapal asing yang berkeliaran di perairan wilayah itu. Gangguan kapal asing di perairan Nunukan, Ambalat akhir-akhir ini terus meningkat, terutama dari negara Malaysia. (Edi/Has)-n

BIODATA



Yulius Dwi Pramono adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir di Koba, Bangka-Belitung, pada tanggal 16 Juli 1985.

Anak kedua dari pasangan F.A Mardiyono dan Theresia Sumini ini mengawali pendidikan formal pada tahun 1992 di SD Negeri No.

294 Lubuk Besar, setelah lulus SD ditahun 1997, Ia melanjutkan di SMP Negeri 1 Koba. Ia Menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2000 dan ditahun yang sama pula, ia melanjutkan sekolahnya ke SMA Swadaya Pangkalpinang sampai akhirnya lulus pada tahun 2003.

Setelah tamat SMA, Ia pun melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan tercatat sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, sebagai tempat menuntut ilmu. Pendidikan strata satu (S1) diselesaikan dengan menyusun skripsi berjudul *“Jurnalisme Makna Dalam Berita Utama Harian Kompas dan Kedaulatan Rakyat Bulan Mei 2009 dan Implementasinya Dalam Bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Semester II .”*